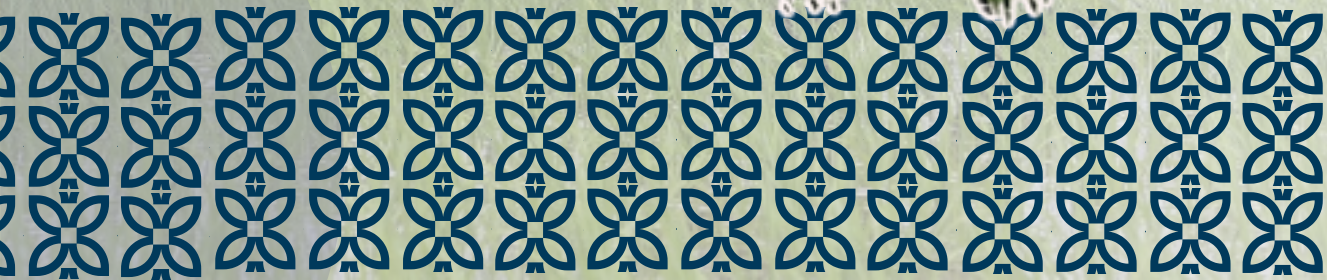


LAPORAN TAHUNAN **BALAI BESAR PENERAPAN** STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN



Laporan Tahunan
BALAI BESAR PENERAPAN
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
TAHUN 2023

Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Kementerian Pertanian
2023

Penanggung Jawab:

Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc

Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Penyusun/Penyunting:

Laila Kadar, SE, M.Si

Ir. Yusuf, M.Si

Rima Purnamayani, SP., M.Si

Ir. Ari Murtiningsih

Adhe Phoppy Wira Ethika, SP, M.Si

Tania Pra Dhani, STP, M.M

Widia Siska, SP, M.Si

Sabilal Fahri, S.Pi, M,Si

Bambang Suryaningrat, SP

Nafiah Afaf, SE., MM

**BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya laporan tahunan Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP). Laporan Tahunan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan mandat BBPSIP Tahun 2023.

Laporan Tahunan disusun untuk digunakan sebagai acuan atau dasar pertimbangan pembelajaran dan referensi pada masa yang akan datang, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi dalam upaya perbaikan kinerja BBPSIP pada masa yang akan datang.

Laporan Tahunan BBPSIP tahun 2023 berisi tentang capaian hasil kegiatan dalam mendukung kegiatan strategis Kementerian Pertanian, dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Selama pelaksanaan kegiatan, tentunya telah banyak hal-hal yang dicapai dalam tahun 2023, namun tidak luput pula dari berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan upayan mencari solusi yang terbaik.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Tahunan ini diucapkan terima kasih. Harapan kami, laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan, khususnya dalam perbaikan kinerja BBPSIP ke depan.



Bogor, Januari 2024
Kepala Balai Besar,

Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Visi	1
1.2. Misi	1
1.3. Tujuan	1
1.4. Sasaran	2
II. SUMBER DAYA MANUSIA	5
III. PROGRAM DAN ANGGARAN	9
3.1. Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Unit Kerja BBPSIP TA. 2024	9
3.2. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Lingkup BBPSIP TA. 2023 dan 2024	10
3.3. Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran TA. 2024 lingkup BBPSIP	14
3.4. Revisi DIPA dan POK BBPSIP TA. 2023	16
IV. QUICK WIN BSIP	17
4.1. Pedoman Umum Tata Kelola UPBS	17
4.2. Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Ayam KUB di Jawa Tengah	19
4.3. Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Komoditi Kisan di Sulawesi Utara	23
V. PENGELOLAAN PRODUK HASIL STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	25
5.1. Perbenihan Tanaman Pangan	25
5.2. Perbenihan Hortikultura	27
5.3. Perbenihan Perkebunan	28
5.4. Perbibitan Peternakan	28
5.5. Bimtek Perbenihan	29

VI. PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN	33
6.1. Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi	33
6.2. Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian	35
6.3. Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	42
6.4. ICARE	44
VII. PENYEBARLUASAN STANDAR	47
7.1. Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	47
7.2. Taman Agro Standar dan Agro Eduwisata	49
7.3. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil SIP pada Pekan Nasional Petani Nelayan ke XVI tahun 2023	56
7.4. Penyusunan dan Perbanyak Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian	57
7.5. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Instrumen Pertanian	58
VIII. DUKUNGAN DAN PEMANFAATAN HASIL STANDARDISASI	63
8.1. Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas Implementasi Kerjasama	63
8.2. Implementasi Kerjasama Luar Negeri	63
8.3. Implementasi Kerjasama Dalam Negeri	66
8.4. Pemanfaatan Instalasi Pengujian dan Penerapan SIP	74
8.5. Pengembangan Laboratorium	76
8.6. Kerjasama Kemitraan	83
8.7. Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	91
8.8. Penyediaan Bahan Informasi Standar Instrumen Pertanian (Medsos)	93
8.9. Temu Informasi Seputar Standardisasi (Temu Inspirasi)	94
8.10. Perpustakaan	95
IX. PETUNJUK PELAKSANAAN	97
9.1. Juklak Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	97
9.2. Juklak Penerapan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi	98
9.3. Juklak Tata Kelola UPBS	98
X. KINERJA KEUANGAN	103
XI. PENUTUP	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target 2023-2024 Sesuai Renstra BBPSIP	2
Tabel 2.	Keragaan jumlah pegawai lingkup BBPSIP berdasarkan pendidikan formal tahun 2023	6
Tabel 3.	Keragaan Jumlah Jabatan fungsional berdasarkan jenjang jabatan lingkup BBPSIP Tahun 2023	8
Tabel 4.	Renja Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	9
Tabel 5.	Indikator, target Perjanjian Kinerja Lingkup BBPSIP Tahun 2023	11
Tabel 6.	Sasaran, Indikator, Target Perjanjian Kinerja lingkup BBPSIP pada PK Revisi-1 dan Revisi-2 Tahun 2023	12
Tabel 7.	Anggaran Lingkup BBPSIP Per Progam Pada PK Revisi-1 dan Revisi-2 Tahun 2023	12
Tabel 8.	Indikator dan Target Perjanjian Kinerja lingkup BBPSIP Tahun 2024	13
Tabel 9.	Anggaran Lingkup BBPSIP Per Progam Pada PK Revisi-1 dan Revisi-2 Tahun 2024	14
Tabel 10.	Rekap Anggaran Per Program pada Pagu Alokasi Anggaran Lingkup BBPSIP TA 2024	14
Tabel 11.	Persentase dan Prioritas Penerapan Aspek <i>Good Breeding Practice</i> pada aNAK aKUB	20
Tabel 12.	Potensi induk dan DOC ayam KUB	21
Tabel 13.	Komposisi pakan ayam KUB petelur pada pabrik pakan mini aNAK aKUB	21
Tabel 14.	Jumlah telur, hen day, DOC dan daya tetas telur Produksi telur ayam KUB	22
Tabel 15.	Realisasi Perbanyak Benih Padi dan Jagung Tahun 2023	26
Tabel 16.	Realisasi Perbanyak Benih Jeruk Tahun 2023	28
Tabel 17.	Realisasi Perbanyak Benih Kakao, Kelapa, dan Kopi Tahun 2023	28
Tabel 18.	Perkembangan Perbanyak Bibit Domba dan Ayam Tahun 2023	29
Tabel 19.	Lembaga Penerap SNI Lingkup BBPSIP Tahun 2023	36
Tabel 20.	Ouput pendampingan penerapan standar instrumen pertanian di BPSIP Tahun 2023	38
Tabel 21.	Lokasi dan komoditas ICARE di 9 Provinsi	45

Tabel 22. Materi yang Disampaikan pada Layanan Pendampingan/Bimtek periode April-Desember 2023	54
Tabel 23. Materi Keragaan Mahasiswa PKL/Magang/Penelitian di BBPSIP	56
Tabel 24. Data pengunjung pada area Gelar Percontohan lingkup BSIP	57
Tabel 25. Daftar judul materi penyuluhan	57
Tabel 26. Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap SIP lingkup BBPSIP 2023	58
Tabel 27. Lokus Kabupaten lokasi pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas penerap standar tahun 2023	59
Tabel 28. Respon peserta terhadap pelaksanaan penguatan kapasitas penerap standar, Tahun 2023	60
Tabel 29. Sasaran Kuantitatif Kegiatan AFACI	65
Tabel 30. Data Kerjasama BBPSIP dengan Kelembagaan Lainnya	67
Tabel 31. Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup BBPSIP	70
Tabel 32. Data Laboratorium Eksisting BPSIP Tahun 2023	77
Tabel 33. Peningkatan Kapasitas SDM Laboratorium Lingkup BPPSIP Tahun 2023	78
Tabel 34. Kerja Sama Laboratorium BPSIP	79
Tabel 35. Pemanfaatan Jasa Laboratorium BPSIP	80
Tabel 36. Rencana Penambahan Ruang Lingkup Analisis Laboratorium BPSIP	81
Tabel 37. Pengembangan Laboratorium Menuju LSPro	81
Tabel 38. Tahapan Pelaksanaan Bimtek SNI ISO/IEC 17065:2012	81
Tabel 39. Kegiatan kemitraan BBPSIP TA 2023	83
Tabel 40. Kegiatan Kemitraan Lingkup BBPSIP	83
Tabel 41. Daftar Hasil Penilaian Tahap Pertama Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BBPSIP TA 2023	92
Tabel 42. Pelaksanaan Temu Inspirasi Tahun 2023	94
Tabel 43. Realisasi Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	105
Tabel 44. Realisasi Anggaran Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	106
Tabel 45. Realisasi Anggaran Dukungan dan Manajemen	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi BBPSIP	4
Gambar 2.	Keragaan Pegawai BBPSIP dan BPSIP Tahun 2023	5
Gambar 3.	Keragaan Pegawai Lingkup BBPSIP berdasarkan jenis kelamin Tahun 2023	6
Gambar 4.	Sebaran pegawai lingkup BBPSIP berdasarkan golongan Tahun 2023	7
Gambar 5.	Cover Pedum Tata Kelola UPBS	18
Gambar 6.	Tampilan halaman Dashboard Admin SI UPBS	19
Gambar 7.	Dokumentasi Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Ayam KUB di Jawa Tengah	22
Gambar 8.	Dokumentasi Penerapan Standar Instrumen Pertanian Komoditi Krisan di Sulawesi Utara	23
Gambar 9.	Realisasi produksi instrumen pertanian Tahun 2023	25
Gambar 10.	Bimtek Perbibitan Ternak Sapi Potong dan Perbibitan Ayam KUB Tersandar di Jawa Tengah	30
Gambar 11.	Bimbingan Teknis Perbenihan Padi Terstandar di Kebun Bibit Ujung Menteng Jakarta Timur	32
Gambar 12.	Identifikasi Kebutuhan SNI Lingkup BBPSIP TA 2023	33
Gambar 13.	Jenis SNI yang diidentifikasi lingkup BBPSIP Tahun 2023	33
Gambar 14.	FGD dengan pelaku utama dan pelaku usaha ubi kayu, serta stakeholders (Penyuluh dan Dinas Pertanian) di Desa Bunder, Kecamatan Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta	34
Gambar 15.	FGD inventarisasi dan identifikasi standar budidaya jagung di Gorontalo	34
Gambar 16.	FGD bersama peternak domba batur di Desa Batur Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah	35
Gambar 17.	Sebaran pendampingan komoditas ekspor yang dilaksanakan di BPSIP TA 2023	37
Gambar 18.	Pelaksanaan pengujian penerapan budidaya cabai rawit Hiyung di Poktan Kurnia Mandiri Kelurahan Lianganggang Utara Kec. Lianganggang Kota Banjarbaru dan Kelompok tani Karya Baru Desa Hiyung Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin, Kalimantan Selatan.	44
Gambar 19.	Pelaksanaan Pengujian Penerapan standar instrumen manggis di Kelompoktani Sari Puspa, Desa Puspahiang, Kecamatan Puspahiang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.	44
Gambar 20.	Lokasi dan komoditas ICARE di 9 Provinsi	45

Gambar 21. Demfarm perbenihan jagung di Desa Rap-Rap Kecamatan Airmadidi, Kab. Minahasa Utara, Sulut.	46
Gambar 22. Survei penilaian kinerja rantai nilai eksisting komoditas jeruk di Kalimantan Barat	46
Gambar 23. Workshop penyusunan rencana bisnis koperasi di Hotel Urban Pringsewu, Lampung	46
Gambar 24. SNI yang didiseminasikan lingkup BBPSIP berdasarkan sub sektor komoditas	47
Gambar 25. SNI yang didiseminasikan lingkup BBPSIP berdasarkan jenis SIP	48
Gambar 26. SNI yang didiseminasikan lingkup BBPSIP berdasarkan bentuk SIP	48
Gambar 27. Metode Diseminasi yang digunakan	49
Gambar 28. Teknologi Inovatif yang diterapkan Taman Agro Standar	49
Gambar 29. Pendampingan Kebun Sekolah di SMPN 4 Bogor	50
Gambar 30. Pendampingan di KWT Sempur	52
Gambar 31. Pendampingan di KWT Kemuning	52
Gambar 32. Peserta Kegiatan Magang/PKL/Penelitian	55
Gambar 33. Komposisi Peserta Penguatan Kapasitas Penerap Standar	60
Gambar 34. Penguatan kapasitas Penerap Standar di Sulawesi Selatan	61
Gambar 35. Penguatan kapasitas Penerap Standar di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah	61
Gambar 36. Penguatan kapasitas Penerap Standar di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur	61
Gambar 37. Pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan Posluhdes di GOR Sungai Riam, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan.	66
Gambar 38. Praktek identifikasi sumberdaya desa dan penggunaan media di Desa Sukaresi, Kec Tamansari, Kab. Bogor, Jawa Barat.	66
Gambar 39. Dokumentasi Penandatanganan MoU antara Kepala BSIP dengan Gubernur Riau	68
Gambar 40. Dokumentasi Kegiatan Mahasiswa PKL	69
Gambar 41. Dokumentasi penyerahan benih pada kegiatan Bakti Sosial Go Green kerjasama dengan RS Hermina Mekarsari	70
Gambar 42. Sebaran IP2SIP Lingkup BBPSIP	75
Gambar 43. Sebaran IP2SIP lingkup BBPSIP berdasarkan agroekosistem	75
Gambar 44. Sebaran IP2SIP Lingkup BBPSIP Berdasarkan Pemanfaatannya	76

Gambar 45. Jenis Laboratorium lingkup BBPSIP	78
Gambar 46. Bimtek Penyusunan Dokumen Sistem Mutu SNI/IEC 17024:2012	86
Gambar 47. Sebaran profesi dan usia Peserta	88
Gambar 48. Pembukaan Bimtek dan Praktikum GAP Kopi Arabika di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan	89
Gambar 49. Pembukaan Bimtek dan Praktikum GHP Kopi Arabika di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan	89
Gambar 50. Bimtek P2L di Kabupaten Maros, Sulsel, 1 Desember 2023	90
Gambar 51. Bimtek P2L di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulsel, 4 Desember 2023	91
Gambar 52. Bimtek P2L di Kabupaten Pare pare, Sulsel, 6 Desember 2023	91
Gambar 53. PPID BBPSIP menerima penghargaan keterbukaan informasi publik dengan predikat satker “Informatif” kategori pelaksana UPT eselon 2.	93
Gambar 54. Perbandingan jumlah pengikut, jumlah postingan dan jangkauan medsos BBPSIP (Instagram, Facebook dan X) tahun 2023	94
Gambar 55. Sertifikat Akreditasi A Perpustakaan BBPSIP pada kategori Perpustakaan Khusus	96
Gambar 56. Proses Bisnis Pelaksanaan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	97
Gambar 57. Diagram Kegiatan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi	98
Gambar 58. Skema Sistem Tata Kelola UPBS Terstandar	99
Gambar 59. Cover Juklak Tata Kelola UPBS Tahun 2023	100
Gambar 60. Cover pedum Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian	101
Gambar 61. Alokasi anggaran lingkup BBPSIP TA 2023	103
Gambar 62. Kinerja keuangan lingkup BBPSIP Tahun 2021 – 2023	104

I. PENDAHULUAN

BBPSIP merupakan *Business Unit* Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Berdasarkan *hierarchical strategic plan*, maka visi dan misi BBPSIP mengacu pada visi dan misi pembangunan pertanian dan prioritas program BSIP dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2022 – 2024 Kementerian Pertanian, dimana pembangunan pertanian diarahkan untuk dapat menjamin ketahanan pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional.

Secara hierarki pada visi dan misi yang ditetapkan harus mengakomodir perkembangan masa depan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis dan harus mampu menjadi salah satu akselerator pembangunan pertanian dan perdesaan.

Setiap unit kerja dituntut untuk memiliki *standard performance* sesuai standar mutu dalam pelayanan terhadap masyarakat, serta mempunyai konsistensi dan komitmen terhadap mutu manajemen. Struktur Renstra BBPSIP 2023-2024 dijabarkan dalam misi, tujuan, indikator kinerja dan sasaran.

1.1. Visi

Visi BBPSIP adalah “Menjadi lembaga terkemuka dalam penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing mendukung pertanian maju, mandiri dan modern”.

1.2. Misi

Misi BBPSIP adalah: 1) Menerapkan standar instrumen pertanian spesifik lokasi berdasarkan kebutuhan nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri; 2) Mendiseminasikan dan mengkoordinasikan penerapan standar instrumen pertanian secara efektif dan menyeluruh, serta 3) Melaksanakan birokrasi BBPSIP yang transparansi, profesionalisme dan akuntabel.

1.3. Tujuan

Tujuan BBPSIP adalah: 1) Meningkatkan penerapan standar instrumen pertanian dengan indikator tujuan : a) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan dan b) Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian; 2) Meningkatkan produksi instrumen pertanian standar dengan indikator tujuan jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan; 3) Terwujudnya reformasi birokrasi BBPSIP yang efektif dan efisien

dan berorientasi pada layanan prima dengan indikator nilai pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM BBPSIP, dan 4) Terkelolanya anggaran BBPSIP yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator nilai kinerja anggaran BBPSIP.

1.4. Sasaran

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi BBPSIP, maka sasaran BBPSIP adalah:
1) Meningkatnya pengelolaan standar

instrumen pertanian; 2) Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar; 3) Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima; dan 4) Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Sasaran, indikator kinerja dan target capaian untuk Tahun 2023-2024 sesuai Renstra BBPSIP Tahun 2023-2024 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target 2023-2024 Sesuai Renstra BBPSIP

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target		Alokasi Anggaran (Rp 000)	
				2023	2024	2023	2024
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri						46.259.611	44.150.000
Kegiatan : Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian							
	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian						
		1. Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan	SNI	34	34		
		2. Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian	Lembaga	34	34		
Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas						32.900.000	41.525.000
Kegiatan : Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar							
	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan	Unit	167.610,5	298.927		
Program Dukungan Manajemen						284.919.962	278.531.375
Kegiatan : Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian							
	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Nilai	81	82		
	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Nilai	91,5	91,5		

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, BBPSIP memiliki fungsi yaitu: 1) Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran penerapan standar instrumen pertanian; 2) Pelaksanaan koordinasi penerapan standar instrumen pertanian; 3) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan produk instrumen pertanian terstandar spesifik lokasi; 4) Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian regional dan nasional; 5) Pelaksanaan pengendalian efektivitas penerapan standar instrumen pertanian; 6) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerapan standar instrumen pertanian; 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan standar instrumen pertanian; dan 8) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPSIP.

Dalam rangka mensinergikan kegiatan penerapan standar instrumen pertanian, maka BBPSIP mengkoordinasikan kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian. Disamping melaksanakan tugas pokoknya, BBPSIP diberi mandat untuk membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian

(BPSIP) seluruh Indonesia. Struktur Organisasi BBPSIP berdasarkan Permentan No 13/Permentan/2023 dapat dilihat pada Gambar 1.

Pada Tanggal 2 Januari 2024 telah dilakukan pengukuhan kelompok substansi dan ketua tim kerja yang ditetapkan melalui keputusan Kepala BSIP Nomor 32/Kpts/OT.050/H/01/2024 tentang Kelompok Subtansi dan Ketua Tim Kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Berdasarkan surat keputusan tersebut struktur organisasi BBPSIP hanya mempunyai dua pejabat struktural yaitu Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian dan Kepala Bagian Tata Usaha. Pimpinan tertinggi adalah Kepala BBPSIP, yang dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha membawahi Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga, Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara dan Ketua Tim Kerja Kepegawaian. Ketua Kelompok Program dan Evaluasi dibantu oleh Ketua Tim Kerja Program dan Ketua Tim Kerja Evaluasi. Ketua Kelompok Penerapan dan Pengelolaan Standardisasi Instrumen Pertanian dibantu oleh Ketua Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Spesifik Lokasi dan Ketua Tim Kerja Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian.



STRUKTUR ORGANISASI

BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN



Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc
Kepala Balai Besar Penerapan
Standar Instrumen Pertanian



Ir. Yusuf, M.Si
Kepala Bagian Tata Usaha

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional
lingkup Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian

	Laila Kadar, SE, M.Si Ketua Kelompok Program dan Evaluasi		Rima Purnamayani, SP, M.Si Ketua Kelompok Penerapan & Pengelolaan Standardisasi Instrumen Pertanian (P2SIP)		Mumuh Muharam, SE, M.Si Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga
	Adhe Phoppy Wira Ethika, SP, M.Si Ketua Tim Kerja Program		Didu Wahyudi, SE, M.Si Ketua Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Spesifik Lokasi		Gita Murdianti, SE Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
	Ir. Ari Murtiningsih Ketua Tim Kerja Evaluasi		Ume Humaedah, SP, M.Si Ketua Tim Kerja Penerapan Standar Instrumen Pertanian		Revi Sepriana, S.Sos Ketua Tim Kerja Kepegawaian

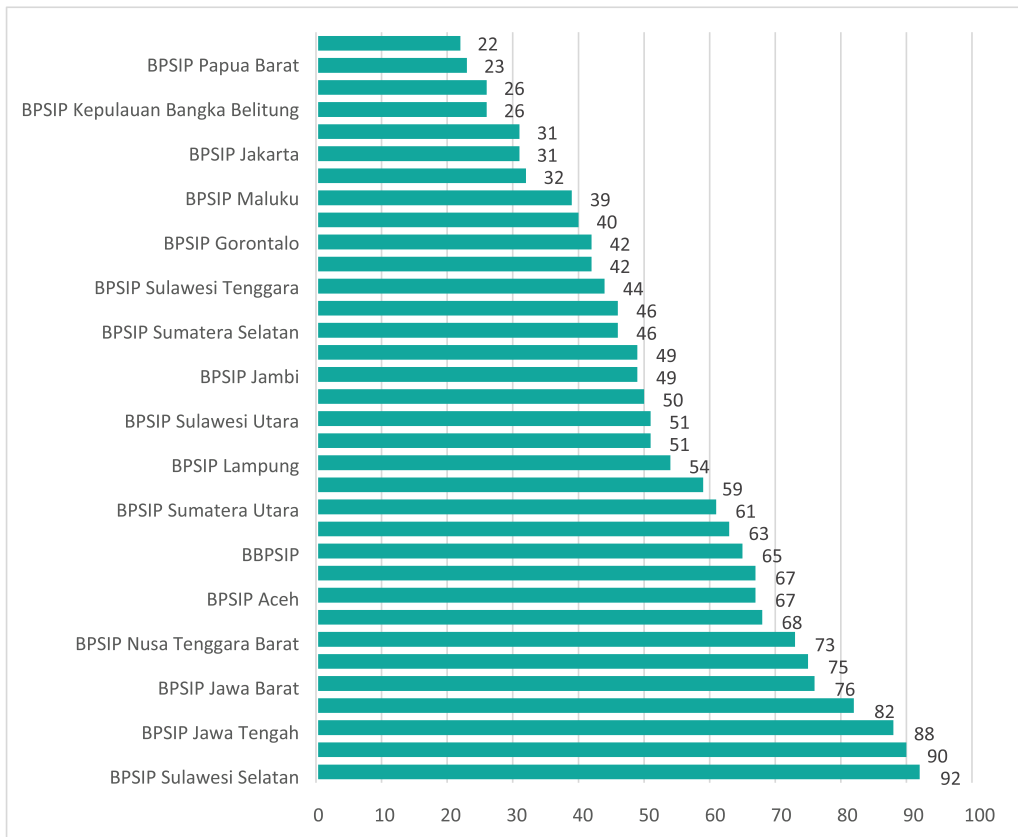


Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Pengkajian

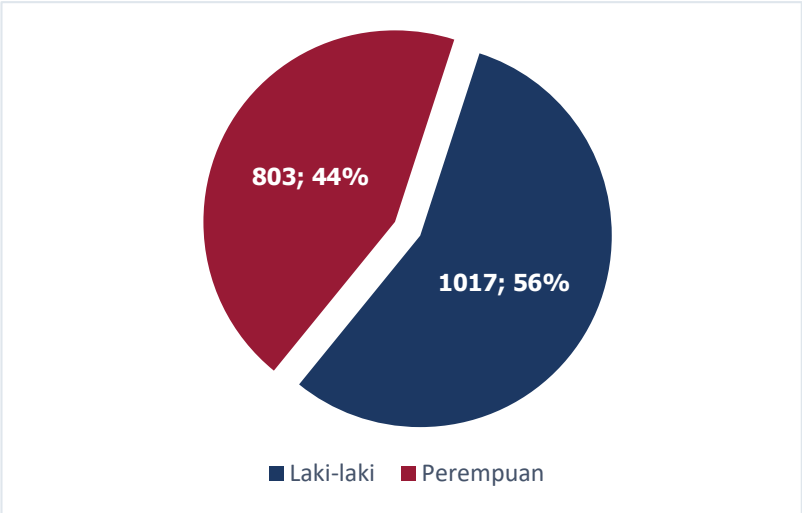
II. SUMBER DAYA MANUSIA

BPSIP dalam menjalankan tugas dan fungsinya, didukung sumber daya manusia yang handal dan profesional, sesuai dengan kompetensinya. Jumlah pegawai BBPSIP Tahun 2023 sebanyak 65 orang dan pegawai BPSIP adalah sebanyak

1.755 pegawai, sehingga total keseluruhan pegawai lingkup BBPSIP adalah 1.820 orang. Keragaan jumlah pegawai lingkup BBPSIP dapat di lihat pada Gambar 2, dan keragaan pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 2. Keragaan Pegawai BBPSIP dan BPSIP Tahun 2023



Gambar 3. Keragaan Pegawai Lingkup BBPSIP berdasarkan jenis kelamin Tahun 2023

BBPSIP sebagai koordinator penerapan standar instrumen pertanian dari 33 BSIP harus menjadi contoh dalam pelaksanaan pelayanan administrasi di lingkup BSIP. BBPSIP dan lingkup BBPSIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh Sumberdaya dari berbagai tingkatan jenjang Pendidikan yang terdiri dari 66 pegawai dengan tingkat Pendidikan S3, 402 pegawai dengan tingkat

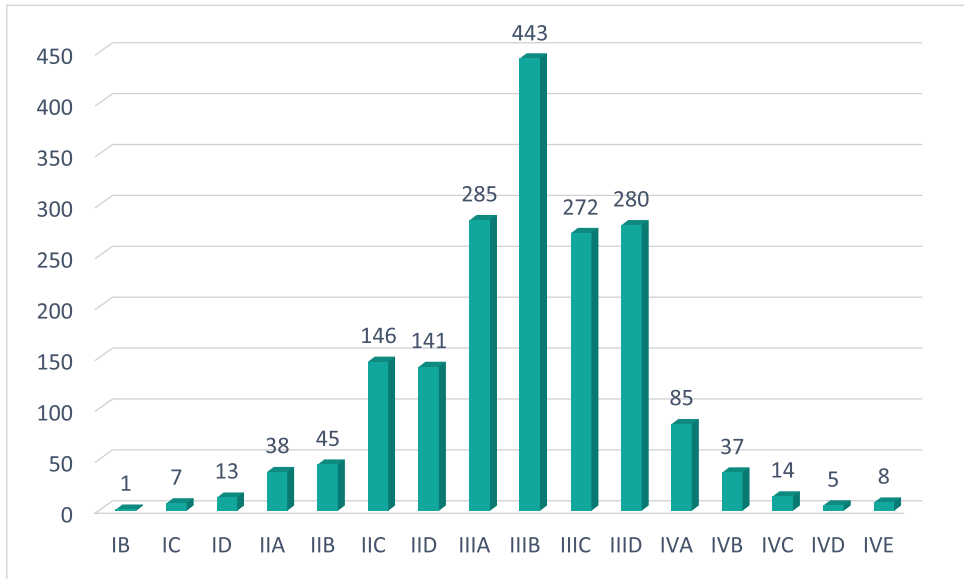
Pendidikan S2, 518 pegawai dengan tingkat Pendidikan S1, 133 pegawai dengan tingkat pendidikan D3, 2 pegawai dengan tingkat Pendidikan D2, 2 pegawai dengan tingkat Pendidikan D1, 505 orang berpendidikan SLTA, 34 orang berpendidikan SLTP/SMP dan 40 orang berpendidikan SD. Keragaan jumlah pegawai BBPSIP dan Lingkup BBPSIP berdasarkan Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Keragaan jumlah pegawai lingkup BBPSIP berdasarkan pendidikan formal tahun 2023

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai	%
1.	SD	40	2,20
2.	SMP	34	1,87
3.	SMA	505	27,75
4.	D1	2	0,11
5.	D2	2	0,11
6.	D3	133	7,31
7.	D4	111	6,10
8.	S1	518	28,46
9.	S2	409	22,47
10.	S3	66	3,63
Jumlah		1.820	100,00

Jika dilihat dari jumlah golongan pegawai di lingkup BBPSIP yaitu 21 pegawai Golongan I, 370 Golongan II, 1280 pegawai Golongan III dan 149 pegawai dengan Golongan IV. Jumlah Golongan pegawai yang paling tinggi berada di golongan III B

yang berjumlah 443 pegawai sedangkan jumlah pegawai dengan golongan I B paling sedikit yaitu 1 pegawai. Keragaan Jumlah pegawai lingkup BBPSIP berdasarkan Golongan dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Sebaran pegawai lingkup BBPSIP berdasarkan golongan Tahun 2023

Kelompok fungsional lingkup BBPSIP yaitu: Analis Standardisasi, Penyuluh Pertanian, Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), Pengawas Benih Tanaman (PBT), Pengawas Mutu Hasil Perhatian (PMHP), Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Analis Sarana dan Prasarana Pertanian,

Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, serta kelompok fungsional lainnya yang mendukung kegiatan pada UK dan UPT (Perencana, Pranata Komputer, Analis Kerja Sama, Pranata Humas, dan lain-lain). Keragaan Jumlah Jabatan Fungsional berdasarkan jenjang jabatan lingkup BBPSIP dapat di lihat Tabel 3.

Tabel 3. Keragaan Jumlah Jabatan fungsional berdasarkan jenjang jabatan lingkup BBPSIP Tahun 2023

No	JABATAN	Jumlah
1	Pelaksana/JFU	861
2	Penyuluh Pertanian	414
3	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	102
4	Pengawas Benih Tanaman	101
5	Struktural	68
6	Analisis Standardisasi	50
7	Teknisi Litkayasa	43
8	Pranata Keuangan APBN	28
9	Peneliti	22
10	Pustakawan	22
11	ANALIS KEPEGAWAIAN	21
12	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	19
13	Arsiparis	11
14	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	10
15	Perencana	8
16	Pranata Komputer	8
17	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	5
18	Pengawas Bibit Ternak	5
19	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	5
20	Analisis Kebijakan	4
21	Analisis Prasarana Dan Sarana Pertanian	4
22	Medik Veteriner	3
23	Pengawas Mutu Pakan	3
24	Pranata Humas	2
25	Paramedik Veteriner	1
26	Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	0
27	Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian	0
28	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	0
29	Perekayasa	0
30	Statistisi	0
Total		1820

Jika dilihat dari Tabel 3, jumlah pegawai yang paling banyak menduduki jabatan pelaksana atau jabatan fungsional dengan jumlah pegawai 861 dan penyuluh pertanian sebesar 414 pegawai, sedangkan jabatan yang paling sedikit adalah

paramedik veteriner yaitu 1 orang pegawai. Ada beberapa jabatan yang belum diisi yaitu analisis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengawasan alat dan mesin pertanian, perancang peraturan perundang-undangan, perekayasa dan statistisi.

III. PROGRAM DAN ANGGARAN

3.1. Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Unit Kerja BBPSIP TA. 2024

Rencana Kerja (Renja) unit kerja disusun mengacu pada Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Renja yang disusun juga berdasarkan Struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) beserta tugas dan fungsi unit kerja maupun satker. Rencana kerja disusun dalam bentuk program, sasaran program, kegiatan, sasaran kegiatan, klasifikasi rincian output, Rincian output dan komponen.

Dalam penyusunan Renja memerlukan pembahasan intensif dengan unit kerja lain di Lingkup BSIP, Sekretariat BSIP, Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Bappenas untuk menetapkan nomenklatur kegiatan, pemilihan KRO dan penentuan RO sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja beserta satker di bawahnya. Renja di unit kerja BBPSIP terdiri dari tiga program yakni: 1) Program nilai tambah dan daya saing industri, 2) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dan 3) Program dukungan manajemen. Renja UK BBPSIP seperti disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Renja Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Kode	Program/Kegiatan/Output	Satuan
018.09	BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	
018.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
018.EC.6916	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	
018.EC.6916. ADA	Standardisasi Produk	
018.EC.6916. ADA.114	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang Dibutuhkan	Dokumen
018.EC.6916. AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	
018.EC.6916. AEF.109	Standar Instrumen Pertanian yang Diseminasikan	Orang
018.EC.6916. BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	
018.EC.6916. BDB.101	Lembaga Penerap Standar yang didampingi	Lembaga
018.EC.6916. QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	
018.EC.6916. QDB.101	<i>Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment</i>	Lembaga
018.09.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	
018.HA.6915	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	
018.HA.6915.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
018.HA.6915.CAG.101	Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar	Ton/Stek
018.HA.6915.CAG.102	Produk Instrumen Tanaman Perkebunan Terstandar	Individu

Kode	Program/Kegiatan/Output	Satuan
018.HA.6915.CAG.103	Produk Instrumen Tanaman Hortikultura Terstandar	Ton/Kg/Gram/ Stek/Batang
018.HA.6915.CAG.104	Produk Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Terstandar	Ekor/Polis
018.09.WA	Program Dukungan Manajemen	
018.WA.6918	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	
018.WA.6918.AEC	Kerja sama	
018.WA.6918.AEC.502	Layanan Kerjasama	Kegiatan
018.WA.6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
018.WA.6918.EBA.956	Layanan BMN	Layanan
018.WA.6918.EBA.962	Layanan Umum	Layanan
018.WA.6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan
018.WA.6918.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
018.WA.6918.EBB.951	Layanan Sarana Internal	Unit
018.WA.6918.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	Unit
018.WA.6918.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	
018.WA.6918.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan
018.WA.6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan
018.WA.6918.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan

3.2. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Lingkup BBPSIP TA 2023 dan TA.2024

3.2.1. PK Awal TA 2023

Perjanjian Kinerja (PK) yang disusun mulai dari Level 1 sampai dengan Level 4 dan terascading dengan baik, karena data perjanjian kinerja yang diinput melalui aplikasi e-PK akan digunakan dalam menyusun SKP Pegawai. Perjanjian Kinerja yang disusun adalah Perjanjian Kinerja pada level Kepala Unit Kerja dan Kepala Satker serta Perjanjian Kinerja Kepala Tata Usaha (Pusat dan Balai Besar) dan Kepala Sub Tata Usaha (Balai). Perjanjian Kinerja disusun paling lambat 30 hari setelah DIPA terbit. Dalam penyusunan PK dan Renaksi harus dipastikan selaras dengan sasaran strategis Kementan dan BSIP, untuk PK

Unit Kerja Level 2 mengikuti Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan yang ada pada lampiran Renstra Kementan dan BSIP.

PK Awal Kepala BBPSIP TA 2023 di tanda tangani pada tanggal 17 Desember 2022 dengan pagu total lingkup BBPSIP sebesar Rp 264,15 Milyar. PK awal TA.2023 hanya mengampu Program Dukungan Manajemen dengan dua sasaran dan dua indikator (Tabel 5). Hal ini terkait transformasi BSIP yang masih menunggu terbitnya Permentan yang mengatur Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) BSIP sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomer 117 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian sehingga program teknis lingkup BSIP masih belum terakomodir program/kegiatan dan anggarannya. PK Awal BBPSIP TA 2023 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Indikator, target Perjanjian Kinerja Lingkup BBPSIP Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Birokrasi Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (Nilai)	81
2.	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (berdasarkan regulasi yang berlaku (Nilai)	91,5

3.2.2. Revisi PK Tahun 2023

Revisi PK ke-1 Tahun 2023 dikarenakan adanya pergantian pimpinan di BBPSIP dan perubahan pagu anggaran serta target *output* disebabkan penambahan program/kegiatan dan anggaran teknis di lingkup BBPSIP seiring dengan terbitnya Permentan Nomer 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup BSIP sehingga total pagu lingkup BBPSIP mengalami perubahan menjadi sebesar Rp364.079.573.000. Revisi Perjanjian Kinerja Kepala BBPSIP yang ditandatangani tanggal 17 Mei 2023 telah mengakomodir empat Sasaran yang mendukung 3 Program Kementan, yaitu :

1. Sasaran 1 (SK1) Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian (SK1) adalah mendukung Program Nilai Tambah dan Daya Saing
2. Sasaran 2 (SK2) Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar mendukung Program Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
3. Sasaran 3 (SK3) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

4. Sasaran 4 (SK4) Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas merupakan sasaran yang mendukung Program Dukungan Manajemen.

Secara lebih rinci sasaran, indikator dan target PK Revisi -1 Kepala BBPSIP dapat dilihat pada Tabel 6. Target yang tercantum pada PK Kepala BBPSIP merupakan target lingkup BBPSIP, hal ini terkait fungsi koordinasi dari BBPSIP untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan diseluruh BSIP.

3.2.3. Revisi -2 PK TA 2023

Revisi PK ke-2 TA 2023 mengakomodir perubahan target perbenihan serta perubahan anggaran per program yang disebabkan adanya refocusing dan realokasi belanja pegawai mendukung upaya khusus percepatan produksi padi dan jagung yang menjadi program strategis Kementan melalui kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan penambahan anggaran Hibah Luar Negeri (AFACI). Revisi PK ke-2 TA 2023 ditandatangani oleh Kepala BSIP dan kepala BBPSIP pada tanggal 28 Desember 2023 dengan total anggaran sebesar Rp 353.771.118.000. Sasaran, indikator, target perjanjian kinerja

lingkup BBPSIP pada PK Revisi-1 dan Revisi-2 Tahun 2023 dapat di lihat pada Tabel 6, sedangkan anggaran Lingkup

BBPSIP Per Progam pada PK Revisi-1 dan Revisi-2 Tahun 2023 diapad di lihat pada Tabel 7.

Tabel 6 . Sasaran, Indikator, Target Perjanjian Kinerja lingkup BBPSIP Pada PK Revisi-1 dan Revisi-2 Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Revisi-1	Revisi-2
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI)	34	34
		2. Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (Lembaga)	34	34
3.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	167.607,5	167.610,5
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	81	81
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	91,5	91,5

Tabel 7. Anggaran Lingkup BBPSIP Per Progam Pada PK Revisi-1 dan Revisi-2 Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran	
		Revisi-1	Revisi-2
	TOTAL	364.079.573.000	353.771.118.000
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	46.259.611.000*)	59.107.278.000*)
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	46.259.611.000	59.107.278.000
	Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	32.900.000.000*)	32.474.589.000*)
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	32.900.000.000	32.474.589.000
	Program Dukungan Manajemen	284.919.962.000*)	262.189.251.000*)
3	Dukungan Manajemen Fasilitas dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian Pertanian	71.397.371.000	71.009.818.000
4	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	213.522.591.000	191.179.433.000

3.2.4. PK Tahun 2024 Awal

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan DIPa yang terbit tanggal 23 November 2024 dengan pagu lingkup BBPSIP sebesar Rp 364.206.375.000. Perjanjian Kinerja Kepala BBPSIP telah mengakomodir empat Sasaran yang mendukung 3 Program Kementan, yaitu:

1. Sasaran 1 (SK1) Meningkatkan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian (SK1) adalah mendukung Program Nilai Tambah dan Daya Saing.
2. Sasaran 2 (SK2) Meningkatkan Produksi Instrumen Pertanian Terstandar mendukung Program Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.
3. Sasaran 3 (SK3) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima.
4. Sasaran 4 (SK4) Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas merupakan sasaran yang mendukung Program Dukungan Manajemen.

Secara lebih rinci sasaran, indikator dan target PK TA 2024 Kepala BBPSIP dapat dilihat pada Tabel 8, dan anggaran Lingkup BBPSIP Per Program Pada PK Revisi-1 dan Revisi-2 Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 9. Target yang tercantum pada PK Kepala BBPSIP merupakan target lingkup BBPSIP, hal ini terkait fungsi koordinasi dari BBPSIP untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan diseluruh BSIP.

Tabel 8 . Indikator dan Target Perjanjian Kinerja lingkup BBPSIP Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI)	34
		2. Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (Lembaga)	34
3.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	298.927
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	82
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	91,5

Tabel 9. Anggaran Lingkup BBPSIP Per Progam Pada PK Revisi-1 dan Revisi-2 Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran
	TOTAL	364.206.375.000
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	44.150.000.000*)
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	44.150.000.000
	Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	41.525.000.000*)
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	41.525.000.000
	Program Dukungan Manajemen	278.531.375.000*)
3	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	278.531.375.000

3.3. Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran TA. 2024 Lingkup BBPSIP

Pagu Anggaran TA 2024

Pagu indikatif lingkup BBPSIP TA 2024 sebesar Rp 349.413.065.000, terdiri dari program Nilai tambah dan daya saing industri sebesar Rp 36.950.000.000; Program ketersediaan akses pangan berkualitas sebesar Rp 57.124.056.000 dan program Dukungan Manajemen sebesar Rp 255.339.009.000.

Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) TA 2024

Pagu definitif lingkup BBPSIP TA 2024 secara total adalah Rp 364.206.375.000 yang meliputi 3 Program yaitu: Program Nilai Tambah dan Daya Saing Rp 44.150.000.000; Program Ketersediaan dan Akses Pangan Berkualitas Rp 44.525.000.000; dan Program Dukungan Manajemen Rp 278.531.375.000. Pagu definitif lingkup BBPSIP TA 2024 secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Rekap Anggaran Per Program pada Pagu Alokasi Anggaran Lingkup BBPSIP TA 2024

No	Satker	PAGU ALOKASI ANGGARAN TA 2024 (Rp000)			
		Program Ketersediaan	Program Nilai Tambah	Program Dukman	Total
	TOTAL ANGGARAN	41.525.000	44.150.000	278.531.375	364.206.375
1	BBPSIP	-	2.890.000	17.854.756	20.744.756
2	BPSIP Aceh	1.321.858	590.000	7.898.655	9.810.513
3	BPSIP Sumatera Utara	958.625	570.000	9.013.553	10.542.178
4	BPSIP Sumatera Barat	918.750	590.000	10.322.549	11.831.299
5	BPSIP Riau	450.000	520.000	7.274.349	8.244.349
6	BPSIP Jambi	874.991	540.000	8.324.332	9.739.323
7	BPSIP Bangka Belitung	415.367	440.000	5.712.675	6.568.042
8	BPSIP Sumatera Selatan	1.260.000	490.000	7.339.644	9.089.644
9	BPSIP Lampung	3.261.371	3.000.000	8.622.282	14.883.653

No	Satker	PAGU ALOKASI ANGGARAN TA 2024 (Rp000)			
		Program Ketersediaan	Program Nilai Tambah	Program Dukman	Total
10	BPSIP Bengkulu	562.500	460.000	7.941.711	8.964.211
11	BPSIP Banten	888.150	490.000	6.727.745	8.105.895
12	BPSIP DKI Jakarta	175.000	440.000	4.988.007	5.603.007
13	BPSIP Jawa Barat	5.737.043	3.400.000	9.655.211	18.792.254
14	BPSIP Jawa Tengah	2.655.260	3.500.000	11.874.734	18.029.994
15	BPSIP DI Yogyakarta	544.772	470.000	9.375.146	10.389.918
16	BPSIP Jawa Timur	4.080.260	3.500.000	10.799.958	18.380.218
17	BPSIP Bali	903.498	610.000	8.412.529	9.926.027
18	BPSIP NTB	1.055.260	3.400.000	9.981.232	14.436.492
19	BPSIP NTT	1.804.960	690.000	10.741.745	13.236.705
20	BPSIP Kalimantan Barat	1.415.445	3.400.000	7.000.995	11.816.440
21	BPSIP Kalimantan Tengah	899.575	460.000	6.980.081	8.339.656
22	BPSIP Kalimantan Selatan	533.497	540.000	8.640.658	9.714.155
23	BPSIP Kalimantan Timur	1.962.350	590.000	8.360.496	10.912.846
24	BPSIP Sulawesi Utara	250.000	2.600.000	6.735.342	9.585.342
25	BPSIP Gorontalo	467.588	470.000	6.078.965	7.016.553
26	BPSIP Sulawesi Tengah	484.948	490.000	6.781.595	7.756.543
27	BPSIP Sulawesi Selatan	2.913.682	2.400.000	15.332.290	20.645.972
28	BPSIP Sulawesi Tenggara	288.938	3.400.000	8.267.855	11.956.793
29	BPSIP Maluku	1.253.623	570.000	6.122.720	7.946.343
30	BPSIP Papua	851.774	590.000	6.927.631	8.369.405
31	BPSIP Maluku Utara	760.000	520.000	4.816.450	6.096.450
32	BPSIP Papua Barat	400.000	530.000	5.287.347	6.217.347
33	BPSIP Sulawesi Barat	975.915	520.000	4.833.333	6.329.248
34	BPSIP Kepulauan Riau	200.000	480.000	3.504.804	4.184.804

Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024 mengalami pemblokiran anggaran sebesar Rp 91.711.924.000 yang terdiri dari: (1) Blokir pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 14.508.802.000 dengan catatan blokir adalah ketidaksesuaian anggaran antar program dengan SPAA; (2) Blokir di Program nilai tambah dan daya saing industri sebesar Rp 7.200.000.000 dengan catatan blokir adalah ketidaksesuaian anggaran antar program dengan SPAA; (3) Blokir Program

ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas sebesar Rp 41.525.000.000 dengan catatan blokir adalah belum ada dasar hukum pengalokasian anggaran dalam hal perbenihan yang dilaksanakan BSIP; (4) Blokir PNPB senilai Rp 3.478.104.000 dengan catatan blokir belum memiliki dasar hukum pengalokasian untuk izin penggunaan PNPB; dan (5) Blokir pada kegiatan i-care senilai Rp 25.000.000.000 dengan catatan blokir belum ada NoL atas AWP.

Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024 yang tidak diblokir adalah sebesar Rp 272.494.451.000 dengan rincian Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 260.544.451.000 dan Program Nilai Tambah sebesar Rp 11.950.000.000.

3.4. Revisi DIPA dan POK BBPSIP TA. 2023

DIPA awal lingkup BBPSIP TA.2023 ditandatangani pada tanggal 30 November 2022 dengan pagu awal sebesar Rp 15.539.928.000,-. Sampai dengan akhir tahun 2023, BBPSIP telah melakukan revisi DIPA/POK sebanyak 21 kali revisi yang terdiri dari delapan kali revisi top down (DJA), dua kali revisi halaman III DIPA (Kanwil DJPB), 9 kali revisi POK (mekanisme pemutahiran KPA), dan dua kali revisi DIPA (Kanwil DJPB).

IV. QUICK WIN BSIP

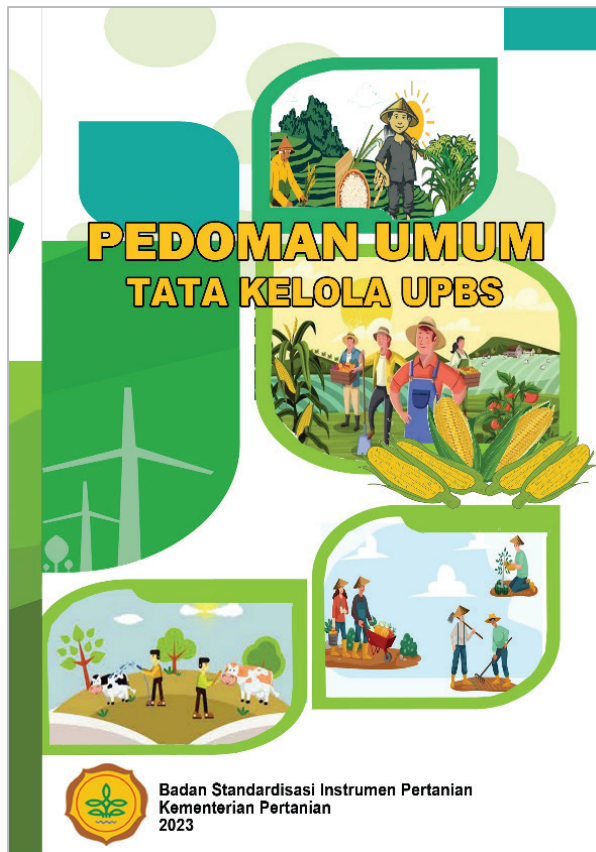
4.1. Pedoman Umum Tata Kelola UPBS

Unit Pengelola Benih ter-Standar (UPBS) merupakan salah satu unit yang terdapat di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) seluruh Indonesia, dibawah koordinasi Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP). UPBS BPSIP diharapkan berperan penting dalam proses persiapan, produksi, hingga pendistribusian benih/bibit, didukung sarana dan prasarana yang memadai serta tenaga terampil, guna memenuhi kebutuhan benih/bibit di daerah dan *stakeholders*, serta program nasional. Hal ini dilakukan agar ketersediaan benih/bibit dapat memenuhi prinsip 7 tepat (jenis, varietas, mutu, jumlah, waktu, lokasi, dan harga). Untuk itu, disusun Pedoman Umum Tata Kelola UPBS lingkup BBPSI. Cover Pedum Tata Kelola UPBS dapat di lihat pada Gambar 5.

Maksud penyusunan pedoman umum tata Kelola UPBS adalah untuk menyediakan panduan tata kelola UPBS tanaman/ternak lingkup BBPSIP. Tujuan pedoman tata kelola UPBS adalah untuk menjadi panduan bagi seluruh UPBS lingkup BBPSIP dalam pengelolaan benih/bibit yang terstandar. Sasaran yang ingin dicapai yaitu terwujudnya UPBS sesuai standar dan memiliki kapasitas jaminan

mutu. Ruang Lingkup pedoman umum tata kelola UPBS meliputi kegiatan UPBS di seluruh BPSIP se-Indonesia, yaitu:

1. Komponen Lembaga/organisasi tata kelola UPBS terdiri dari: a). Sumber daya manusia; b). Sarana dan prasarana (sarpras); c). Pendanaan dan Pengelolaan Keuangan; d). Kerja sama.
2. Sistem Pengelolaan Benih/Bibit terstandar Suatu rangkaian proses pengelolaan benih terstandar benih/bibit ternak, terdiri dari: (1) Produksi perbanyakan benih/bibit; (2) panen; (3) pasca panen, dan proses pengemasan, pelabelan, dan pengangkutan untuk benih/bibit; (4) Distribusi.
3. Sistem Manajemen Mutu Sistem Manajemen Mutu (SMM) tata kelola UPBS tanaman dan ternak mengikuti pedoman SNI 9001:2015 tentang persyaratan sistem manajemen mutu, meliputi: a. Pengendalian mutu benih terstandar, terdiri dari: monitoring, evaluasi, koreksi, dan tindakan korektif. b. Sertifikasi produk.
4. Sistem Informasi Sistem informasi merupakan sebuah sistem formal dan terorganisir yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi.



Gambar 5. Cover Pedum Tata Kelola UPBS

Sistem Informasi UPBS

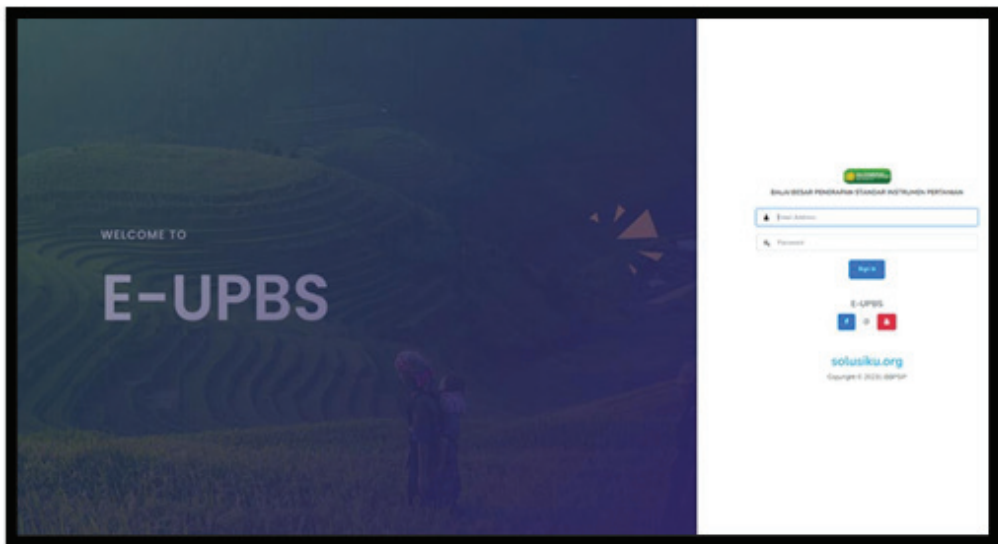
Tata kelola UPBS seringkali melibatkan proses yang kompleks, seperti pemantauan dan pengelolaan inventaris benih, pemantauan mutu benih, dan distribusi benih. Pengembangan sistem informasi dapat membantu menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan tata kelola ini. Sistem informasi diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan benih. Dengan adanya sistem informasi UPBS, ketersediaan dan distribusi benih, dapat diakses dengan mudah dan dipantau oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena

itu, tim UPBS telah membuat rancangan SI UPBS secara komprehensif, namun untuk operasional direncanakan pada tahun 2024. Tampilan halaman *Dashboard Admin* SI UPBS terdapat pada Gambar 6.

SI UPBS memuat:

1. Backend System E-UPBS (*Dashboard Admin*). Merupakan tampilan untuk BBPSIP sebagai admin, yang berfungsi untuk memantau data SI UPBS yang di update oleh BPSIP di 33 Provinsi
2. Menu Master Provinsi
3. Menu Master Unit Kerja (UK)

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 4. Menu Master Sub Sektor | 13. Menu Progress |
| 5. Menu Master Komoditas | 14. Menu Sertifikasi |
| 6. Menu Master Varietas | 15. Menu Penerima |
| 7. Menu Prodistok Kopi | 16. Menu Tahapan Kegiatan |
| 8. Menu Prodistok Tanaman Pangan | 17. Menu SDM |
| 9. Menu Target Realisasi dan Produksi | 18. Menu Sarana dan Prasarana Tersedia |
| 10. Menu Anggaran | 19. Menu Sarana dan Prasarana Belum Tersedia |
| 11. Menu PNBP | 20. Menu PJ dan Lokasi |
| 12. Menu Diseminasi | |



Gambar 6. Tampilan halaman *Dashboard Admin* SI UPBS

4.2. Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Ayam KUB di Jawa Tengah

Pemasyarakatan ayam Kampung Unggul Balitbangtan (KUB) di seluruh Provinsi Jawa Tengah mencapai terus meningkat, dilihat dari Pemesanan DOC ayam KUB pada UPBS ayam KUB hingga akhir tahun 2023. Peningkatan populasi ayam KUB perlu dukungan dan peran kelompok peternak ayam KUB yang secara teknis

sesuai dengan standar instrument Bibit DOC ayam KUB/ SNI 8405-1:2017.

Pendampingan penerapan standar instrument ayam KUB dilaksanakan pada Perkumpulan peternak ayam KUB (aNAK aKUB) Jawa Tengah. Perkumpulan peternak aNAK aKUB Jawa Tengah beralamat di Jl. Pos Tingkir-Suruh Km 1, Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir, Salatiga.

Tujuan kegiatan pendampingan penerapan dan diseminasi standar ayam KUB (SNI 8405-1:2017) adalah: (1) Melakukan pendampingan dalam memproduksi DOC sesuai SNI 8405-1:2017; (2) Melakukan pendampingan dalam memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI dan (3) Mendiseminasikan SNI 8405-1:2017.

Pedoman pembibitan ayam lokal yang baik menurut peraturan menteri pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/10/2006 terdiri dari 5 aspek yaitu bibit, prasarana pembibitan, proses produksi bibit,

pelestarian fungsi lingkungan hidup dan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Penerapan GBP dan prioritas penerapan GBP oleh aNAK aKUB

Pedoman pembibitan ayam lokal yang baik menurut peraturan menteri pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/10/2006 terdiri dari 5 aspek yaitu bibit, prasarana pembibitan, proses produksi bibit, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Penerapan GBP dan prioritas penerapan GBP oleh aNAK aKUB sebagaimana Tabel 11.

Tabel 11. Persentase dan Prioritas Penerapan Aspek *Good Breeding Practice* pada aNAK aKUB

No	Aspek <i>Good Breeding Practice</i>	Nilai (%)	Ranking
1	Prasarana Pembibitan	86,20	1
2	Bibit	80,00	2
3	Proses Produksi Bibit	56,50	3
4	Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	50,00	4
5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	40,00	5

Sarana dan prasarana menjadi aspek utama yang di bahas dalam Pedoman Pembibitan Ayam Lokal yang baik, karena menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan sebelum memulai untuk menjalankan usaha. Pemeliharaan ayam dengan kandang intensif dapat meningkatkan produktivitas, ditunjang kemampuan pengelolaan aspek cara

pembibitan secara teknis yang bersifat praktis.

Pemeliharaan ayam KUB yang dilakukan oleh aNAK aKUB sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Juknis Budidaya Ayam KUB, pendekatan GBP dan Panduan Mutu aNAK aKUB. Perbandingan SOP aNAK aKUB dengan SNI 8405-1:2017 sebagaimana Tabel 12.

Tabel 12. Potensi induk dan DOC ayam KUB

No	Uraian Potensi Induk KUB-1	SNI 8405-1:2017	Penerapan aNAK aKUB
1.	Umur pertama bertelur	20-22 minggu	20 minggu
2.	Bobot badan pertama bertelur	1,2-1,5 kg	1,3 kg
3.	Puncak produksi telur hen day	65%-70%	68%
4.	Bobot telur	36 g -45 g	Minimum 36 g
Uraian DOC ayam KUB-1			
1.	Bobot Kuri di penetasan	Minimum 26 gram	Minimum 26 gram

Selain bibit, pakan merupakan faktor yang penting dan merupakan komponen biaya paling tinggi dalam usaha ayam untuk berproduksi dengan optimal diperlukan pakan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisinya dan secara kuantitas tercukupi.

Formulasi pakan ayam KUB produksi pabrik pakan mini aNAK aKUB yang dianalisis proksimat oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, Laboratorium Pakan Kabupaten Semarang. Hasil analisis proksimat pakan ditunjukkan pada Tabel 13.

Tabel 13. Komposisi pakan ayam KUB petelur pada pabrik pakan mini aNAK aKUB

Kandungan Nutrisi	Pakan Petelur (%)	SNI 7783-3-2022
Kadar Air	11,16	Maks. 13,00
Kadar Bahan Kering	88,84	Min. 87,00
Kadar Abu	14,54	Maks. 14,00
Kadar Protein Kasar	20,21	Min. 16,00
Kadar Lemak Kasar	4,02	Min. 2,50
Kadar Serat Kasar	6,1	Maks. 8,00

Kandungan protein kasar pada pakan adalah 20,21% (lebih tinggi 4%) sehingga mempunyai tingkat efisiensi protein yang tinggi, Kandungan protein yang disarankan pada ayam KUB adalah 16-17%. Kadar abu pada pakan lebih tinggi 0,54% dari yang

disarankan. Kualitas pakan yang baik dan terstandar, serta penanganan budidaya yang baik, dihasilkan jumlah telur optimal dan kualitas telur yang ditandai daya tetas tinggi. Jumlah telur yang dihasilkan dan daya tetas dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Jumlah telur, hen day, DOC dan daya tetas telur Produksi telur ayam KUB

No	Bulan	Jumlah Telur (butir)	Hen Day (%)	Jumlah DOC (ekor)	Daya Tetas (%)
1	Mei	9.741	53,60	8.805	89,49
2	Juni	8.476	53,15	7.283	85,60
3	Juli	7.135	56,54	6.159	85,97
4	Agustus	7.057	55,78	6.113	86,54
5	September	8.755	54,77	7.666	85,69
6	Oktober	7.101	55,62	6.022	80,84
7	November	7.070	55,90	6.005	81,56
8	Desember	8.953	57,49	2.986*	79,90
Jumlah		64.288	55,36	48.053	84,45

Hasil pendampingan menunjukkan beberapa hal, yaitu : 1) Produksi DOC ayam KUB aNAK aKUB memenuhi kriteria SNI 8405-1:2017; 2) Proses produksi bibit ternak dan perkumpulan peternak aNAK aKUB Jawa Tengah telah memenuhi kesesuaian pedoman sertifikasi produk benih dan bibit ternak (PSBBBT) dan Bibit ternak (DOC) yang dihasilkan memenuhi kriteria SNI dimaksud. Ayam KUB 1 dan

direkomendasikan untuk penerbitan sertifikat kesesuaian SNI; dan 3) Diseminasi SNI 8405-1:2017 dilakukan melalui *platform* media sosial, media tercetak, pameran, bimtek dan media massa.

Dokumentasi Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Ayam KUB Di Jawa Tengah dapat di lihat Pada Gambar 7.



Gambar 7. Dokumentasi Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Ayam KUB di Jawa Tengah

4.3. Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Komoditi Krisan di Sulawesi Utara

Kota Tomohon di Sulawesi Utara dikenal sebagai kota bunga Timur Indonesia. Krisan mempunyai banyak keragaman, baik dari segi penampilan, warna dan bentuk bunga. Kota Tomohon memiliki potensi sebagai sentra florikultura di Kawasan Timur Indonesia. Potensi besar ini ditandai dengan budaya menanam bunga sudah sejak zaman dahulu. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kelompok tani bunga sekitar 42 kelompok, 38 kios-kios tanaman hias/floris di Kota Tomohon. Produksi krisan tahun 2020 mencapai 5 juta tangkai dengan luas panen hampir mencapai 5 juta tangkai, dan harga jual Rp. 3.500 per tangkai bunga.

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah membangun kawasan agribisnis bunga



Gambar 8. Dokumentasi Penerapan Standar Instrumen Pertanian Komoditi Krisan di Sulawesi Utara

krisan yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian berbasis *Good Agriculture Practice* (GAP) dan *Good Handling Practice* (GHP) dan melakukan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian komoditi krisan berbasis GAP dan GHP.

Lokasi kegiatan di Kawasan Agribisnis Pertanian Komoditi Krisan Kelurahan Kakaskasen Dua Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon pada kelompok tani krisan pendampingan BSIP Sulawesi Utara. Kegiatan bersinergi dengan *stakeholder*, seperti: Dinas Pertanian dan Perikanan kota Tomohon, BPP Kecamatan Tomohon Utara, BPSB Kota Tomohon, petani/kelompok tani yang berada di Kecamatan Tomohon Utara, serta Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado dan instansi terkait lainnya.

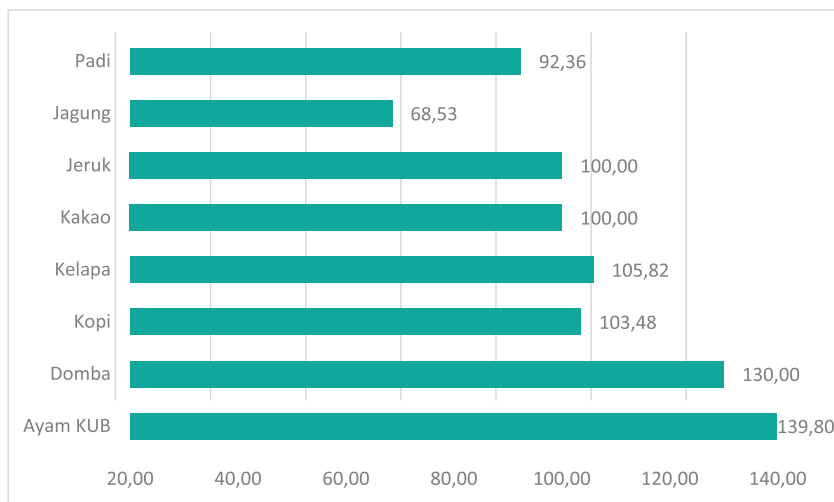
Hasil pendampingan BSIP Sulawesi Utara, menunjukkan petani sudah menerapkan standar yang sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) atau Standar Operasional Prosedur (SOP) instrumen pertanian. Data yang diambil menunjukkan dari hasil rata-rata pengukuran SNI Krisan Potong Nomor 4478 tahun 2014 terlihat kelas mutu sudah berada pada grade AA. Keuntungan rata-rata adalah sebesar Rp 3.954.000 dalam satu kali musim tanam untuk luasan lahan *green house* berukuran 18 x 8 m. Dokumentasi Penerapan Standar Instrumen Pertanian Komoditi Krisan di Sulawesi Utara terdapat pada Gambar 8.



V. PENGELOLAAN PRODUK HASIL STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

Jumlah produksi instrumen pertanian yang diimplementasi ke dalam kegiatan perbanyakan benih/bibit Tahun Anggaran 2023 lingkup BBPSIP terdiri dari 8 komoditas yang terbagi kedalam : subsektor Tanaman Pangan (padi dan jagung), hortikultura (jeruk), perkebunan (kakao, kopi dan kelapa), dan peternakan (Ayam KUB dan domba). Total

anggaran sebesar Rp. 6,6 milyar. Target produksi benih/bibit, masing-masing: 190,5 ton (padi), 38 ton (jagung), 10.000 batang (jeruk), 7.000 pohon (kakao), 95.503 pohon (kopi), 10.500 pohon (kelapa), 10 ekor (domba), dan 44.369 ekor (ayam KUB). Kinerja produksi instrument pertanian, masing-masing komoditas sebagaimana Gambar 9.



Gambar 9. Realisasi produksi instrumen pertanian Tahun 2023

Realisasi perbanyakan benih/bibit mencapai 189.173 unit atau sebesar 112,9% dari target capaian sebesar 167.610,5 unit. Perbanyakan benih yang dapat mencapai target adalah jeruk, kakao dan kelapa serta perbanyakan bibit domba dan ayam KUB. Sedangkan untuk perbanyakan benih yang belum dapat mencapai target adalah komoditas padi, jagung dan kopi.

5.1. Perbenihan Tanaman Pangan

Perbanyakan benih padi mencapai 175,9 ton dari target 190,5 ton dengan capaian 92,4%. Sebagian besar UPBS mencapai target sesuai rencana. Namun demikian, beberapa BPSIP tidak mencapai target yaitu Sumsel, NTT, Sulut, Sulteng, Papua dan Kepri serta Sultra. Secara umum

capaian perbanyak benih jagung belum dapat mencapai target, sampai dengan bulan Desember baru dapat mencapai 68,5% dengan capaian 26 ton dari target 38 ton. UPBS yang dapat mencapai target yaitu Kalimantan Timur, Maluku dan Sulawesi Barat. Sedangkan

UPBS yang belum dapat mencapai target yaitu BPSIP Sumatera Selatan, Gorontalo, Papua, Kepri, dan Maluku Utara. Bahkan UPBS pada BPSIP Sulawesi Utara belum menghasilkan perbanyak benih. Secara rinci realisasi perbanyak benih padi dan jagung disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Realisasi Perbanyak Benih Padi dan Jagung Tahun 2023.

No	BPSIP	Komoditas	Satuan	Benih		
				Target	Sertifikat	%
Sub Jumlah		Padi	Ton	190,5	175,95	92,36
1	Aceh	Padi	Ton	7	7,00	100,0
2	Sumatera Utara	Padi	Ton	6	6,91	115,1
3	Sumatera Barat	Padi	Ton	7	7,02	100,2
4	Riau	Padi	Ton	5	5,00	100,0
5	Jambi	Padi	Ton	7	7,00	100,0
6	Sumatera Selatan	Padi	Ton	12	9,70	80,8
7	Bengkulu	Padi	Ton	7	7,00	100,0
8	Banten	Padi	Ton	9	9,46	105,1
9	DKI Jakarta	Padi	Ton	4	4,50	112,5
10	Jawa Barat	Padi	Ton	8	8,00	100,0
11	Jawa Tengah	Padi	Ton	10	11,05	110,5
12	DI Yogyakarta	Padi	Ton	5	5,00	100,0
13	Jawa Timur	Padi	Ton	7	7,08	101,1
14	NTB	Padi	Ton	10	10,00	100,0
15	NTT	Padi	Ton	15	9,79	65,2
16	Kalimantan Barat	Padi	Ton	6,5	6,88	105,8
17	Kalimantan Tengah	Padi	Ton	9	9,47	105,2
18	Kalimantan Selatan	Padi	Ton	5,5	5,94	108,0
19	Kalimantan Timur	Padi	Ton	7	8,20	117,1
20	Sulawesi Utara	Padi	Ton	6	0,00	0,0
21	Gorontalo	Padi	Ton	5	6,12	122,4
22	Sulawesi Tengah	Padi	Ton	6,5	3,75	57,7
23	Papua	Padi	Ton	6	4,40	73,3
24	Maluku	Padi	Ton	6	7,00	116,7
25	Kepulauan Riau	Padi	Ton	3	2,50	83,3
26	Sulawesi Tenggara	Padi	Ton	6	0,00	0,0
27	Maluku Utara	Padi	Ton	5	7,20	144,0

No	BPSIP	Komoditas	Satuan	Benih		
				Target	Sertifikat	%
Sub Jumlah		Padi	Ton	190,5	175,95	92,36
1	Sumatera Selatan	Jagung	Ton	4	2,24	56,0
2	Kalimantan Timur	Jagung	Ton	3	3	100,0
3	Sulawesi Utara	Jagung Hibrida	Ton	4	0	0,0
4	Gorontalo	Jagung	Ton	4	1,7	42,5
5	Papua	Jagung	Ton	4	3,5	87,5
6	Maluku	Jagung	Ton	6	6	100,0
7	Kepulauan Riau	Jagung	Ton	3	1,1	36,7
8	Sulawesi Barat	Jagung	ton	5	5	100,0
9	Maluku Utara	Jagung	ton	5	3,5	70,0

Belum tercapainya target disebabkan karena beberapa hal yaitu: Campuran varietas lain (CVL) adalah suatu tanaman atau benih yang satu atau lebih karakteristiknya berbeda dari deskripsi varietas yang ditetapkan (Kepmentan No.991, 2018). CVL di perbanyak benih padi BPSIP Papua lebih dari 60% pada fase generatif (pemeriksaan lapang tahap 3) sehingga tidak dapat dijadikan benih. CVL apat terjadi karena sumber telah campur, percampuran fisik benih atau bibit di persemaian. Dan saat tanam atau panen ketika perontokan gabah menggunakan alat yang habis dipakai untuk merontokan gabah lain, dan kontaminasi dari tanaman musim sebelumnya. Calon benih padi BPSIP Sulteng dan NTT masing-masing sebanyak 3,050 ton dan 5,410 ton daya kecambah dibawah 80% sehingga oleh BPSB setempat dinyatakan tidak lolos Uji. Kondisi yang terjadi di BPSIP Sultra yaitu terjadi kekeringan pada lahan sawah akibat adanya perbaikan saluran irigasi di wilayah wawotobi dan akibat el nino mengakibatkan embung kekeringan. Sehingga kurangnya suplai air di lahan sawah mengakibatkan pertumbuhan padi tidak maksimal yang berdampak pada fase pengisian bulir padi menjadi kosong. Perubahan iklim juga menyebabkan

terjadinya peningkatan serangan OPT (tikus dan burung pipit). Calon Benih padi di BPSIP Kepri masih dalam proses sertifikasi oleh BPPSP TPHP Prov Kepri, sehingga dimungkinkan untuk realisasi produksi benih padinya bertambah.

Tidak tercapainya target produksi benih jagung disebabkan beberapa hal, yaitu ; terjadinya musim kemarau yang lebih Panjang, el nino di Gorontalo dan Maluku Utara, menyebabkan tanaman tidak tumbuh dan berkembang baik, sebaliknya perbanyak benih jagung di Papua pada fase awal pertumbuhan mengalami gangguan akibat terdampak banjir. Sedangkan pada BPSIP Kepri masih proses sertifikasi oleh Balai Perbenihan Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan (BPPSP TPHP) Provinsi Kepri, sehingga dapat diharapkan terjadi penambahan realisasi produksi.

5.2. Perbenihan Hortikultura

Jeruk merupakan satu-satunya komoditas yang diperbanyak dari sub sektor hortikultura dapat mencapai produksi perbanyak benih 100% dari target 10.000 batang yang dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Realisasi Perbanyak Benih Jeruk Tahun 2023

No	BPSIP	Komoditas	Satuan	Benih		
				Target	Sertifikat	Prosentase
BBPSIP		Jeruk	Batang	10.000	10.000	100,0
1	Riau	Jeruk	Batang	10.000	10.000	100

5.3. Perbenihan Perkebunan

Kakao, kopi dan kelapa adalah komoditas yang diperbanyak dari sub sektor perkebunan. Kopi menjadi komoditas yang paling banyak dikembangkan, yaitu di 8 BPSIP (Aceh, Bangka Belitung, Lampung, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Papua Barat), selanjutnya kelapa di BPSIP Bali dan Kalimantan Barat dan Kakao di BPSIP Papua Barat. Secara umum realisasi

perbanyak benih di sektor perkebunan dapat mencapai bahkan melebihi target, terutama kelapa dan kopi. Sebanyak 611 pohon (5,8 %) benih kelapa diproduksi lebih banyak dari target yang 10.500 pohon. Benih Kopi dihasilkan lebih banyak 3.319 pohon (3,50%) dari target 95.500 pohon. Realisasi kegiatan perbanyak benih kakao, kopi, dan kelapa dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Realisasi Perbanyak Benih Kakao, Kelapa, dan Kopi Tahun 2023

No	BPSIP	Komoditas	Satuan	Benih		
				Target	Sertifikat	%
BBPSIP		Kakao	Pohon	7.000	7.000	100,0
1	Papua Barat	Kakao	Pohon	7.000	7.000	100,0
BBPSIP		Kelapa	Pohon	10.500	11.111	105,8
1	Bali	Kelapa	Pohon	6.000	6.608	110,1
2	Kalimantan Barat	Kelapa	Pohon	4.500	4.503	100,1
BBPSIP		Kopi	Pohon	95.503	98.819	103,5
1	Aceh	Kopi	Pohon	14.000	14.000	100,0
2	Bangka Belitung	Kopi	Pohon	20.000	20.000	100,0
3	Lampung	Kopi	Pohon	13.501	15.450	114,4
4	Bali	Kopi	Pohon	11.001	11.264	102,4
5	Papua Barat	Kopi	Pohon	7.000	8.000	114,3
6	Sulawesi Barat	Kopi	pohon	8.000	8.000	100,0
7	Sulawesi Tenggara	Kopi	Pohon	10.000	10.067	100,7
8	Sulawesi Selatan	Kopi	Pohon	12.001	12.038	100,3

5.4. Perbibitan Peternakan

Perbanyak bibit sub sektor peternakan yaitu: domba dan ayam KUB. Seluruh komoditas dapat mencapai target

produksi bibit bahkan melebihi target sebesar 139,8 % atau sebanyak 62.028 ekor. Perbanyak bibit ayam KUB yang dicapai oleh BPSIP Yogyakarta jauh di atas target yaitu sebanyak 9.406 ekor

dari target 4.025 ekor atau tercapai 233,69%. Capaian yang sangat tinggi tersebut didukung oleh beberapa faktor diantaranya daya tetas yang tinggi dan produksi telur yang banyak. Sedangkan

untuk domba sebanyak 13 ekor dari target 10 ekor atau tercapai 130%. Secara rinci capaian perbanyak bibit domba dan ayam KUB dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Perkembangan Perbanyak Bibit Domba dan Ayam Tahun 2023

No	BPSIP	Komoditas	Satuan	Benih		
				Target	Sertifikat	%
BBPSIP		Domba	Ekor	10	13	130,0
1	DI Yogyakarta	Domba	Ekor	10	13	130,0
BBPSIP		Ayam KUB	Ekor	44.369	62.028	139,8
1	Sumatera Utara	Ayam KUB	Ekor	10.344	14.350	138,7
2	Sumatera Barat	Ayam KUB	Ekor	4.000	5.169	129,2
3	Banten	Ayam KUB	Ekor	5.000	5.085	101,7
4	Jawa Tengah	Ayam KUB	Ekor	7.900	9.480	120,0
5	DI Yogyakarta	Ayam KUB	Ekor	4.025	9.406	233,7
6	Jawa Timur	Ayam KUB	Ekor	600	600	100,0
7	NTB	Ayam KUB	Ekor	6.000	11.671	194,5
8	NTT	Ayam KUB	Ekor	1.000	1.019	101,9
9	Kalimantan Selatan	Ayam KUB	Ekor	2.500	3.073	122,9
10	Sulawesi Tengah	Ayam KUB	Ekor	1.000	75	7,5
11	Sulawesi Selatan	Ayam KUB	Ekor	2.000	2.100	105,0

5.5. Bimtek Perbenihan

Bimtek Aspirasi

Kegiatan Bimtek aspirasi dilaksanakan di 21 BPSIP yaitu BPSIP Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Jambi, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Maluku, Papua, Malut, Sulsel dan Sulbar. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 24,9 Milyar dengan realisasi sampai dengan bulan Desember sebesar 22,72 M (91,18%). Target SDM yang memperoleh Bimtek sebanyak 16.980 orang dengan realisasi sebanyak 18.520 orang (109%) sampai dengan bulan Desember. Proses pelaksanaan sampai dengan bulan Desember sudah seluruhnya melaksanakan bimtek.

Sebagai salah satu contoh pelaksanaan kegiatan bimtek perbenihan dengan melibatkan aspirasi adalah Bimtek Perbibitan ayam KUB. Dalam rangka hilirisasi teknologi budidaya sapi potong dan ternak ayam Kampung Unggul Balitbangtan (KUB) untuk menghasilkan hasil yang baik terstandar, BPSIP Jawa Tengah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis dengan Tema “Perbibitan Sapi Potong Terstandar”. Disamping itu, BSIP melalui BPSIP Jawa Tengah pada tahun 2023 juga melaksanakan kegiatan Bimtek perbibitan ayam KUB Terstandar, guna mendesiminasikan inovasi Ayam terstandar, sehingga dapat meningkatkan produksi telur maupun daging, yang bisa meningkatkan pendapatan peternak

Secara kuantitas atau volume kebutuhan bibit ternak maupun ayam KUB di Provinsi Jawa Tengah belum terpenuhi atau masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi benih. Permasalahan tersebut terkait dengan belum optimalnya kinerja kelembagaan pembibitan serta kurangnya perhatian para pelaku pembibitan ternak sapi potong dalam ayam KUB dalam menerapkan inovasi teknologi pembibitan. Pemerintah sebagai regulator perbenihan memiliki peran penting untuk meningkatkan kinerja kelembagaan perbenihan termasuk untuk pembibitan komoditas sapi potong dan ayam KUB.

Dalam rangka hilirisasi teknologi budidaya sapi potong dan ternak unggas untuk menghasilkan hasil yang baik terstandar, BSIP melalui BPSIP Jawa Tengah pada tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan “Bimtek Perbibitan Ternak Sapi Potong Terstandar” dan “Perbibitan

KUB Terstandar di Kabupaten Cilacap. Melalui kegiatan Bimtek ini, diharapkan mampu membantu para petani dalam menumbuhkan kembali berbagai ide, kreatifitas, gagasan kegiatan yang efektif dan efisien dalam mengimplementasikan berbagai inovasi untuk meningkatkan pendapatan keluarganya.

Peserta yang ikut dalam Bimtek Perbibitan Ternak Sapi Potong dan Perbibitan Ayam KUB Tersandar, masing-masing sebanyak 100 orang. Peserta Bimtek berasal dari yang tersebar di Kecamatan Jeruk Legi dan Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Dari sejumlah peserta tersebut, yang memperoleh media diseminasi yaitu peserta Bimtek Perbibitan Ayam KUB, berupa buku panduan Petunjuk Teknis Perbibitan KUB Terstandar. Dokumentasi Bimtek Perbibitan Ternak Sapi Potong dan Perbibitan Ayam KUB Tersandar dapat di lihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Bimtek Perbibitan Ternak Sapi Potong dan Perbibitan Ayam KUB Tersandar di Jawa Tengah

Bimtek Non Aspirasi

BPSIP yang melaksanakan Bimtek Non Aspirasi sebanyak 12 BPSIP adalah BPSIP Riau, Bengkulu, Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kepulauan

Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat. Anggaran Bimtek Non Aspirasi sebesar Rp 1,3 Milyar, sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp 1,16 M (93%). SDM yang dilibatkan ditargetkan sebanyak 1.005 orang dan terealisasi sebanyak 1.326

orang sampai dengan bulan Desember (131,94%).

Bimbingan teknis terbagi dalam 4 sub sektor yaitu tanaman pangan (BPSIP Riau, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, DIY, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau), hortikultura (Riau), perkebunan (Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Papua Barat) dan peternakan (DIY, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah) dengan cakupan komoditas padi, kopi, kakao, ayam KUB

Sebagai salah satu contoh pelaksanaan kegiatan bimtek perbenihan yaitu Bimtek Perbenihan Padi di DKI Jakarta. Jakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang masih memiliki ketersediaan lahan sawah dengan luasan berkisar ± 400 ha. Padi merupakan salah satu komoditas pertanian yang masih ditanam oleh petani Jakarta. Ketersediaan benih menjadi salah satu kunci keberlanjutan budidaya. Benih berkualitas diperoleh dari pelaku perbenihan yang berkualitas. Melalui bimbingan teknis diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan para pelaku perbenihan di DKI Jakarta, sehingga ketersediaan benih padi tersedia secara berkesinambungan, terjamin jenis, varietas dan mutunya. Melalui bimbingan teknis juga diharapkan mempercepat sosialisasi instrumen perbenihan padi terstandar kepada pengguna.

Pengembangan budidaya tanaman padi yang sudah dilakukan di Jakarta antara lain melalui budidaya tanaman padi di lahan tidur dan lahan milik Pemerintah daerah. Kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan untuk produksi akan tetapi juga ditujukan untuk edukasi dan rekreasi masyarakat.

Kegiatan budidaya padi di Jakarta telah lama dilakukan, namun demikian, dampak produksi dari kegiatan budidaya tanaman tersebut belum terasa secara signifikan, salah satu penyebabnya dikarenakan terkendala ketersediaan benih varietas unggul yang berkualitas sehingga sering kali petani menanam benih yang tidak berlabel.

Permasalahan keberlanjutan ketersediaan benih padi masih belum cukup teratasi, belum adanya petani penangkar menjadi salah satu faktor pengungkit. Kesadaran petani padi untuk menjadi penangkar dan melakukan kegiatan perbenihan untuk keberlanjutan usahataniya juga masih dirasa kurang, terkadang benih label ungu yang diberikan oleh petugas lapang, diproduksi hanya untuk beras konsumsi, tidak diproduksi sebagai benih. Oleh karena itu, kegiatan bimbingan teknis ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kesadaran petani akan pentingnya keberlanjutan produksi benih dan meningkatkan pengetahuan petani padi, penyuluh dan petugas lapang terkait proses produksi benih yang berkualitas dan sesuai standar sehingga dapat menghasilkan benih padi yang bermutu berkualitas dan berkesinambungan ketersediaannya.

Bimbingan Teknis dilaksanakan di Kebun Bibit Ujung Menteng, dengan mengusung tema bimbingan teknis perbenihan padi terstandar. Bimbingan teknis dihadiri oleh 83 orang dan diikuti oleh 54 orang peserta yang terdiri dari petani padi Jakarta Timur dan Jakarta Utara, Universitas, Petugas Lapang Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta (Penyuluh dan Petugas lapang Jakarta Timur dan Jakarta Utara, Pusbangbenih dan Proteksi Tanaman, PPSHP, PBT dan

POPT), Petugas Lapang Dinas Pertanian Kota Bekasi dan Depok dan PT. Sang Hyang Seri. Dokumentasi bimbingan teknis perbenihan padi terstandar di Kebun Bibit Ujung Menteng Jakarta Timur dapat dilihat pada Gambar 11.

Salah satu tujuan bimbingan teknis adalah mengenalkan instrumen dan teknik perbenihan padi terstandar kepada peserta bimbingan teknis. Pada saat pemaparan materi bimtek telah dilakukan pengenalan instrumen dan teknik perbenihan padi terstandar kepada peserta bimtek. Telah dilakukan pemaparan materi dan dialog interaktif antara narasumber dan peserta bimtek. Adapun materi yang disampaikan

meliputi : Teknik Produksi Benih Padi yang disampaikan oleh Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Tanaman Padi, Etika Bisnis Penangkaran Benih oleh BPSIP DKI Jakarta dan *success story* penangkaran benih padi oleh petani penangkar.

Bimbingan teknis yang dilakukan juga bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta dalam melakukan perbenihan padi terstandar dan menjaring minat petani untuk menjadi penangkar benih padi. Selain dibekali dengan pengetahuan teknik perbenihan padi terstandar peserta juga dibekali benih dan saprodi pendukung sebagai bahan praktek penerapan pasca bimbingan teknis.



Gambar 11. Bimbingan Teknis Perbenihan Padi Terstandar di Kebun Bibit Ujung Menteng Jakarta Timur

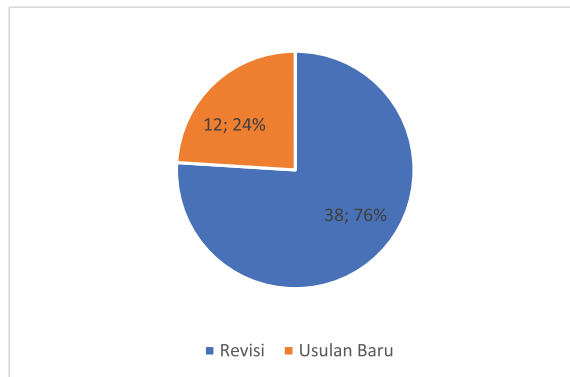
VI. PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

6.1. Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi

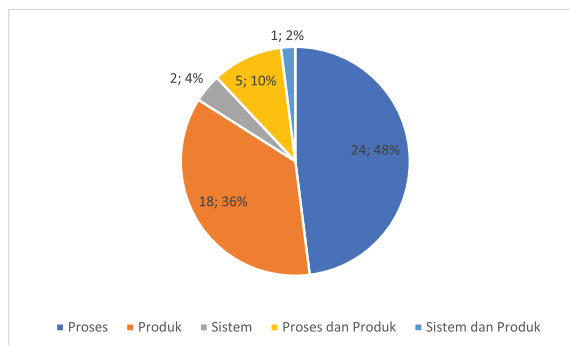
Salah satu tugas dan fungsi BPSIP yang dilaksanakan melalui kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tahun 2023 menghasilkan 50 dokumen sebagai bahan usulan PNPS. Kebutuhan berupa usulan baru dan revisi, revisi sebanyak 12 dan 38 usulan baru SNI. Jenis SNI yang menjadi fokus identifikasi meliputi 24 SNI proses, 18 SNI Produk, 2 SNI sistem, dan 5 SNI proses dan produk,

serta 1 SNI sistem dan produk. Kebutuhan SNI dan jenis SNI yang telah diidentifikasi, dapat dilihat pada Gambar 12 dan 13.

Komoditas meliputi sub sektor hortikultura seperti bawang merah, alpokat, cabai Rawit, jeruk, Mangga, Manggis, Sukun, Salak dan Pisang. Sub sektor perkebunan meliputi kakao, pala, Kopi, Kopra dan pinang. Sub sektor peternakan meliputi ayam, kambing, dan sapi. Sub sektor tanaman pangan yaitu jagung, padi, talas beneng, ubi kayu, dan sorgum.



Gambar 12. Identifikasi Kebutuhan SNI Lingkup BBPSIP TA 2023



Gambar 13. Jenis SNI yang diidentifikasi lingkup BBPSIP Tahun 2023

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan identifikasi adalah: 1). Belum tersinkronisasinya dengan kegiatan pendampingan, pengujian dan penerapan standardisasi instrumen pertanian; 2) SDM petani yang masih rendah; 3). Masih lemahnya penerapan SNI di kalangan pelaku usaha/petani/UMKM, hal tersebut disebabkan karena pelaku usaha belum atau tidak mengetahui SNI/

SOP pendukungnya; dan 4). adanya gap yang cukup banyak antara SNI dengan kebutuhan standar sehingga diperlukan verifikasi lebih lanjut untuk menentukan jenis kebutuhan standar yang benar-benar mewakili kebutuhan pelaku usaha.

Dokumentasi kegiatan identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, dapat dilihat pada Gambar 14-16.



Gambar 14. FGD dengan pelaku utama dan pelaku usaha ubi kayu, serta *stakeholders* (Penyuluh dan Dinas Pertanian) di Desa Bunder, Kecamatan Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta



Gambar 15. FGD inventarisasi dan identifikasi standar budidaya jagung di Gorontalo



Gambar 16. FGD bersama peternak domba batur di Desa Batur Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

6.2. Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Pada tahun 2023, BBPSIP melakukan pendampingan penerapan Standar Instrumen Pertanian terhadap 53 lembaga penerap. Lembaga Penerap yang didampingi meliputi kelompok tani, koperasi, Industri Kecil Menengah, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Kelompok Wanita Tani, Perseroan Terbatas, CV, asosiasi pelaku usaha serta pondok pesantren. Jenis SNI yang diterapkan yaitu 44 SNI Produk, 5 SNI sistem, 3 SNI proses dan 1 SNI Personil. Lebih rinci, Lembaga penerap dan SNI yang diterapkan dapat di lihat pada Tabel 19.

Berbagai komoditas pertanian yang menjadi fokus dalam penerapan standar yaitu sapi, ayam KUB, cabai, bawang merah, cokelat, aren, jahe, kakao, kelapa, nanas, kopi, krisan, lada, manggis, padi, pala, pinang, pisang, pupuk organik, vanili, bayam merah, pakcoy, dan sayur segar lainnya. Sebaran pendampingan komoditas ekspor yang dilaksanakan di BPSIP TA 2023 dapat di lihat pada Gambar 17.

Pendampingan Lembaga penerap ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar instrumen pertanian yang ditetapkan terimplementasi dengan baik pada setiap tahapan produksi dan pengolahan komoditas pertanian. Dengan adanya penerapan standar yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keamanan produk pertanian serta memberikan manfaat yang lebih baik bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Pendampingan penerapan standar yang dilakukan oleh BPSIP selama tahun 2023 telah memperoleh hasil diantaranya: telah diperolehnya sertifikat SNI pada Lembaga yang didampingi oleh BSIP Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Gorontalo, Banten, Sulawesi Barat, serta dibangunnya *screenhouse* untuk komoditas krisan di Sulut dan vanili di NTB. Lebih rinci, *output* pendampingan penerapan standar instrumen pertanian di BPSIP Tahun 2023 disajikan pada Tabel 20.

Tabel 19. Lembaga Penerap SNI Lingkup BBPSIP Tahun 2023

No	Satker	Lembaga Penerap		SNI yang diterapkan
1	BPSIP NAD	1	Koperasi Baburrrayyan	SNI 01-2907-2008: Biji Kopi
2	BPSIP Sumatera Sumut	2	IKM Motung	SNI 01-3542-2004 kopi bubuk
		3	IKM Muda Kopi	SNI 01-3542-2004 kopi bubuk
3	BPSIP Sumatera Barat	4	Kelompok Tani Inovasi	SNI 2323 :2008/Amd1: 2010 Biji kakao Amandemen
		5	IKM Chokato	SNI 2323 :2008/Amd1: 2010 Biji kakao Amandemen
4	BPSIP Riau	6	IKM Seroja	SNI 8370-2018-Keripik buah
		7	IKM Restu	SNI 8370-2018-Keripik buah
		8	usaha penggilingan padi	SNI 6128:2020 tentang Beras
5	BPSIP Jambi	9	MPIG Pinang Betara Jambi	SNI 01-3450-1997
6	BPSIP Bangka Belitung	10	Bumdesma Mitra Lada Bersatu	SNI 0004:2013 Lada Putih
7	BPSIP Sumatera Selatan	11	Kelompok Wanita Tani Beguyur	SNI 8964-2021 Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk
		12	CV Yohanes Mitra Kakao Mandiri	SNI 7934:2014 Cokelat dan Produk-produk cokelat
		13	UMK Kopi Pondok Indah	SNI 01-3542-2004 Kopi Bubuk
		14	CV Kopi Anand	SNI 01-3542-2004 Kopi Bubuk
		15	PT Kulaku Indonesia	SNI 7381:2022 Minyak kelapa virgin (<i>Virgin coconat oil</i>)
		16	CV Biji Kopi	SNI 01-3542-2004 Kopi Bubuk
		17	UMK Al Fath	SNI 3722:2018 Minuman serbuk Berperisa
8	BPSIP Lampung	18	KWT Mawar	SNI 01-2907-2008: Biji Kopi
9	BPSIP Bengkulu	19	Bukit <i>Coffee</i>	SNI 01-2907-2008 tentang biji kopi dan SNI 8964-2021 Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk
10	BPSIP Banten	20	CV. Mitra Mandala	SNI 3743:2021
11	BPSIP DKI Jakarta	21	Poktan Sejahtera Makmur	PTM (Kepmentan No 380 tahun 2023), Permentan No 53 2018 (PSAT) dan SNI Bina UMK (PP no 5 2021)
		22	Poktan <i>New Garden Hydro</i>	PSAT PDUK 3173405010031123
		23	Dodol Rogayah	SNI 2986:2013 - Dodol beras ketan
		24	Leon <i>Kitchen</i>	SNI 01-2976-2006 - Saus cabe
		25	Stik kentang Uyunk	SNI 4031:2018 - Keripik kentang
12	BPSIP Jawa Barat	26	Poktan	SNI 3211:2009
13	BPSIP Jawa Tengah	27	aNAKaKUB	SNI 8405-1:2017
		28	KWT Sri Lestari	SNI 3211-2009
14	BPSIP Yogyakarta	29	KT Tani Rukun	Penerapan SNI Pembibitan Bawang Merah no. SNI 01-6999-2004 Pendampingan penerapan SOP Pupuk organik padat yang memenuhi standar mutu sesuai Kepmentan. no. 261/KPTS/SR.310/M/4/2019.
		30	KT Mekar	
		31	KWT Subur makmur	
15	BPSIP Jawa Timur	32	Asosiasi Mangga Situbondo (AMS)	1. SNI 3164:2009 (Mangga) 2. SNI 7387:2009 (Batas Maksimum Cemaran Logam Berat Dalam Pangan)

No	Satker	Lembaga Penerap	SNI yang diterapkan
16	BPSIP Bali	33 Unit pengolahan hasil belok bon kopi	SNI 01-2907-2008
17	BPSIP NTB	34 yayasan Ponpes Nurul Haramain	SNI 01-7156-2006
18	BPSIP NTT	35 Poktan Pemula	SNI 7651-4:2020 Tentang Bibit Sapi Potong Bali
		36 CV. Abon Jaya	SNI 3707:2021 Tentang Abon Daging
19	BPSIP Kalimantan Barat	37 Poktan Harapan Baru	SNI 6729-2016 (Sistem Pertanian Organik)
20	BPSIP Kalimantan Tengah	38 Gabungan Poktan di Desa Kahingai, Kec. Belantikan Raya	SNI 01-2907-2008 (bijit kopi)
21	BPSIP Kalimantan Selatan	39 Poktan Karya Baru	PTM Perbenihan Cabai (Kepmentan No. 42 Tahun 2019)
22	BPSIP Kalimantan Timur	40 Gapoktan Berkah Bersatu	SNI 6729:2016 Sistem Pertanian Organik
23	BPSIP Sulawesi Utara	41 Kelompok tani Berkat Taniku	SNI 4478: 2014 Krisan Potong
24	BPSIP Gorontalo	42 Koperasi Sukma Melati Hutabohu (Korporasi Petani), Desa Hutabohu, Kec. Limboto Barat, Kab. Gorontalo, Provinsi Gorontalo	SNI 7763:2018, SNI Pupuk Organik Padat
25	BPSIP Sulawesi Tengah	43 IKM Suluh Gesang Desa Kospa Duata Karya Kec. Masama Kab. Banggai	SNI 7381:2022 Minyak Kelapa Virgin (VCO)
26	BPSIP Sulawesi Selatan	44 UMKM KOPI 1000 NURHIDAYAH	Biji <i>Roasted beans</i> dan Kopi Bubuk Arabika SNI 1003381112021
27	BPSIP Sulawesi Tenggara	45 PT. Kakao Kolut Madani	Biji Kakao SNI 2323:2008/Amd1: 2010
		46 CV Afnan Syariah	Biji Kakao SNI 2323:2008/Amd1: 2010
28	BPSIP Maluku	47 PT Kamboti Ewang Maluku	SNI 0006-2015 Pala
29	BPSIP Papua	48 CV. Maju Tama Agro	SNI Mutu Beras
30	BPSIP Maluku Utara	49 Poktan Mirimoi	SNI 6729:2016 (Sistem Pertanian Organik)
		50 Poktan Lestari	SNI 8969:2021 (IndoGAP)
31	BPSIP Papua Barat	51 Koperasi Ebier Suth Cokran	SNI 01-2323-2008 (Biji Kakao) dan SNI 2323:2008/Amd1:2010
32	BPSIP Sulawesi Barat	52 CV. Poki Cahaya Abadi	SNI 6729-2016 (Sistem Pertanian Organik)
33	BPSIP Kepulauan Riau	53 Kelompok Tani Sumber Kelapa	SNI 01-7157-2006 (Benih kelapa dalam (<i>Cocos nucifera</i> L. var. <i>Typica</i>))



Gambar 17. Sebaran pendampingan komoditas ekspor yang dilaksanakan di BPSIP TA 2023

Tabel 20. Ouput pendampingan penerapan standar instrumen pertanian di BPSIP Tahun 2023

No	BPSIP	Output Kegiatan
1	BPSIP NAD	1. Peningkatan pemahaman dan kapasitas tenaga pendamping lapangan lingkup BPSIP Aceh dan instansi lainnya tentang teknis penerapan standar kopi Arabika Gayo. 2. Terinventarisir potensi dan permasalahan dalam penerapan standar dan SNI pada tingkat eksportir dan stakeholder 3. Komponen SNI <i>green bean</i> kopi sudah diterapkan dalam SCAA yang digunakan
2	BPSIP Sumatera Sumut	1. Terdampinginya 1 lembaga penerap 2. Dokumen mutu yang tersusun 3. Pendaftaran, pemeriksaan tim auditor (sni 01-3542-2004 (kopi bubuk) 4. Sertifikat sni yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk
3	BPSIP Sumatera Barat	1. Pendampingan 13 Lembaga / Kelompok Tani di 4 Kab/ Kota Sumatera Barat 2. 11 Sertifikat Tanda Daftar SNI Bina UMK 3. 2 Lembaga belum karena beresiko menengah-tinggi
4	BPSIP Riau	1. Koordinasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan 2. Identifikasi calon pelaku usaha nanas penerap standar instrumen pertanian 3. Sosialisasi penerapan SNI nanas 4. Survey kondisi eksisting pada calon lembaga penerap potensial mengenai fasilitas sarana eksisting sesuai hasil gap analisis 5. Pendampingan penerapan SNI 8370-2018 di 2 UMK yakni UMK Restu dan UMK Seroja 6. 2 Sertifikat Bina UMK
5	BPSIP Jambi	1. Dokumen kesediaan/komitmen Lembaga MPIG Pinang Betara Jambi menerapkan SNI:01-3450-1997 Biji Pinang Bukan untuk Obat dan SOP Budidaya dan Pasca Panen Pinang. 2. Dokumen Buku Deskripsi Indikasi Geografis Pinang Betara (syarat sertifikat IG Pinang Betara)
6	BPSIP Bangka Belitung	1. Diperolehnya tanda SNI BINA UMK oleh BUMDESMa Mitra Lada Bersatu dan Hangu Grup 2. Tersusunnya dokumen2 mutu pada Bumdesma Mitra Lada Bersatu 3. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran UMK dalam penerapan SNI, GAP, GMP, ISO 9001 4. Terlaksananya proses sertifikasi oleh LSPro, PT Multicert Global Indonesia
7	BPSIP Sumatera Selatan	1. Hasil GAP Analisa UMKM kemudian membandingkan kondisi UMKM tersebut dengan Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB). 2. dokumen mutu HACCP, manual mutu dan formulir mutu. 3. Sertikat tanda daftar SNI untuk aneka produk coklat dan kopi bubuk
8	BPSIP Lampung	1. Sosialisasi pertama dilaksanakan dengan jumlah peserta sebanyak 75 orang terdiri dari penyuluh pendamping, kelompok tani/KWT/UMKM yang berada di Kec. Belalau, Gedung Surian, Sumber Jaya, Sekincau, Way Tenong, 2. Air Hitam, Balik Bukit dan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat dan selanjutnya khusus pada KWT Mawar 3. Praktek olahan kopi cara basah untuk menghasilkan olahan kopi terstandar (<i>green bean</i> dan kopi bubuk) 4. Pengujian olahan kopi terstandar (<i>green bean</i> dan kopi bubuk) dalam proses
9	BPSIP Bengkulu	1. Penerapan SNI 01-2907-2008 tentang biji kopi oleh IKM Bukit <i>Coffee</i> 2. Penerapan SNI 8964-2021 tentang kopi sangrai dan kopi bubuk oleh IKM Bukit <i>Coffee</i>

No	BPSIP	Output Kegiatan
10	BPSIP Banten	1. Tersertifikasinya produk gula semut aren sesuai SNI (1 lembaga) 2. Diperolehnya data mutu produk gula semut aren sesuai parameter uji pada SNI (5 set data) 3. Diperolehnya data rantai pasok produk gula semut aren (1 laporan) 4. Terlaksananya sosialisasi penerapan SNI gula palma (40 orang)
11	BPSIP DKI Jakarta	1. Sertifikasi/pelabelan benih alpukat ke PPSHP Poktan Sejahtera Makmur (Ahmad Rizal) sudah dapat label, Ada rencana proses label <i>batch</i> selanjutnya 2. SNI Bina UMK Tiga UMK Olahan yang mendapat SNI Bina UMK (Nurul-Stik kentang; Sunarti Leonard-Sambal; Mayang-Dodol) 3. Sertifikat PSAT sayuran hidroponik <i>New Garden Hydro</i> (La Ode) sudah mendapatkan rekomendasi teknis dari OKPPD Kotamadya Jakarta Selatan (nomor registrasi/izin edar)
12	BPSIP Jawa Barat	1. Sosialisasi SNI 3211:2009 Manggis 2. Sertifikat Registrasi Kebun (GAP) 3. Sertifikat Organik 4. Pengesahan kelompok tani Sari Puspa Garawangi sebagai badan hukum 5. Penerapan standar instrumen pertanian budidaya komoditas manggis (<i>Good Agricultural Practices/GAP</i>) khususnya pemupukan dan sanitasi kebun untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas buah manggis sehingga berdampak pada peningkatan ekspor
13	BPSIP Jawa Tengah	1. Pendaftaran sertifikasi SNI 6729:2016 pada LSO Prov. Jateng 2. Verifikasi dokumen sudah dilakukan dan beberapa temuan ketidaksesuaian dokumen sudah dilengkapi 3. Inspeksi lapang
		1. Memproduksi DOC sesuai SNI 8405-1:2017 2. Memperoleh Sertifikat SNI Bibit Ayam KUB 1 Umur Sehari 3. Mendiseminasikan SNI 8405-1:2017 kepada peternak kelompok ternak dan pelaku usaha.
14	BPSIP Yogyakarta	1. Pupuk PON Sesuai Standar Mutu SNI 7763:2018 2. Beras Organik No Loses 446-LSPR-092-IDR-09-22 3. Bimtek dan Pendampingan Pembuatan Pupuk Organik Sesuai Standar 4. Pembuatan Pupuk Organik Sesuai Kepmentan RI No. 261/KPTS/SR.310/M4/2019 5. Pendampingan GAP Produksi Bibit Bawang Merah Kelas Benih Sebar (BR) Menuju SNI 01-6999-2004
15	BPSIP Jawa Timur	1. Sosialisasi SNI 3164:2009 Mangga 2. Pengujian Sampel Tanah 3. Temu Usaha (Sinkronisasi SOP dengan Swasta) 4. Bimtek Perijinan Pertanian (NIB, Sertifikat PSAT) 5. Bimtek SNI bina UMK (Penggunaan Logo SNI bina UMK) 6. Pendampingan Legalitas Badan Hukum (Akta dan SK Badan Hukum Terbaru) (<i>on-going</i>)
16	BPSIP Bali	1. 2 unit Demplot Penerapan GAP (Budidaya kopi arabika Kintamani) 2. Peningkatan kapasitas SDM dalam penerapan GAP 3. Produk biji kopi terstandar (belum tersertifikasi) ▪ Menerapkan standar proses SOP Puslit Koka ▪ Sudah memenuhi syarat mutu cacat biji ▪ Sudah melakukan sortasi

No	BPSIP	Output Kegiatan
17	BPSIP NTB	1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani terhadap penerapan standar budidaya vanili organik, standar produksi benih vanili organik. 2. Peningkatan Produktivitas vanili organik di tingkat petani binaan 3. Terbentuknya Kebun Benih Induk Vanili Organik yang terstandar 4. Kelembagaan dan manajemen kelompok tani vanili organik yang baik dan profesional
18	BPSIP NTT	<i>Output kegiatan pendampingan penerapan standar bibit sapi Bali :</i> 1. Penilaian Kesesuaian bibit sapi bali dengan pengukuran linier tubuh berdasarkan SNI Bibit Sapi Potong -Bagian 4: Bali No. 7651-4:2020 2. Pelaksanaan pendampingan dengan metode bimbingan teknis (ceramah, praktek lapang dan demonstrasi) 3. Penilaian bibit sapi Bali dilakukan terhadap dua kelompok yaitu kelompok pemula dan kelompok Baki Tuan <i>Output kegiatan pendampingan penerapan standar abon daging sapi :</i> 1. Pengamatan proses produksi dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan Permenperin no 75 Tahun 2010 tentang CPPOB 2. Pengujian mutu produk abon daging sapi berdasarkan SNI Abon Sapi No. 3707-2021 3. Pelaksanaan pendampingan dengan metode diskusi 4. Pendampingan dan pengujian penerapan standar abon daging sapi dilakukan pada UMKM salah satunya adalah UD. Abon Jaya
19	BPSIP Kalimantan Barat	1. Sertifikat SNI : 6729-2016 (SISTEM PERTANIAN ORGANIK) pada POKTAN HARAPAN BARU (DESA GALANG KEC. SUNGAI PINYUH KAB. MEMPAWAH) pada komoditas nanas 2. Pendampingan SNI: 3166-2009 (STANDAR MUTU NENAS) pada POKTAN HARAPAN BARU (DESA GALANG KEC. SUNGAI PINYUH KAB. MEMPAWAH)-KOMODITAS NANAS 3. Pendampingan SNI pada POKTAN SEPAKAT BERJAYA (DESA SUNGAI BAKAU BESAR DARAT KEC. SUNGAI PINYUH KAB.MEMPAWAH)- KOMODITAS KELAPA, Standar Yang Diterapkan: SNI : 6729-2016 (SISTEM PERTANIAN ORGANIK) 4. Diseminasi: - o Bimbingan teknis Terkait SNI 6729:2016 dan SNI 3166:2009 - o Konsultasi Agribisnis
20	BPSIP Kalimantan Tengah	1. Mengidentifikasi kebutuhan penerapan SIP melalui FGD terhadap perwakilan petani kopi pada kelompok tani; hasil ⇒ mutu biji kopi sesuai SNI Nomor 2907-2008 2. Melakukan inventarisasi dan menentukan ketersediaan SIP untuk mengakomodir kebutuhan penerapan SIP; hasil ⇒ GAP (Permentan Nomor 49/Permentan/OT.140/4/2014) dan GHP (Permentan Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2012); 3. Identifikasi ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK); hasil ⇒ LSPro Puslitkoka (Jember) 4. Pengujian awal biji kopi: (1) mutu fisik biji kopi; hasil ⇒ belum sesuai SNI 2907-2008 (kadar air > 12,5%); (2) citarasa kopi hasil ⇒ <i>terlampir dok. Sertifikat (slide ke-7)</i> 5. Terlaksananya pengujian <i>sample</i> produk dari kebun kopi poktan/ petani untuk mengetahui kesesuaian penerapan standar di Kabupaten Lamandau untuk menuju SNI 2907-2008 6. Diseminasi: • Sosialisasi GAP <i>on coffee</i> dan GHP <i>on coffee</i> menuju SNI 2907-2008 • Bimbingan teknis materi GAP dan GHP

No	BPSIP	Output Kegiatan
21	BPSIP Kalimantan Selatan	- GAP dan PTM perbenihan cabai (Kepmentan No.42 tahun 2019) <i>Focus Group Discussin</i> (FGD) menentukan kebutuhan standar dengan stakeholder terkait (Kabid Horti Dinas, Penyuluh, PBT, Kelompok Tani) - Pembuatan SOP Budidaya Cabai Hiyung yang akan didiseminasikan kepada petani - Diseminasi: - Pedoman Umum SOP Budidaya Cabe Rawit Hiyung, - Bimbingan Teknis terkait produksi dan penanganan benih cabai hiyung oleh BPSI Sayuran - Membuat petak percontohan dan pendampingan
22	BPSIP Kalimantan Timur	- Pendampingan Sertifikat SNI sistem pertanian organik (SNI 6729:2016), Sertifikat organik Gapoktan Berkah Bersatu terbit pada tanggal 7 Desember 2023 - Perbaikan dokumen ketidaksesuaian harus diselesaikan paling lambat tgl 16 Desember (tanggal 7 Des 2023 semua dokumen perbaikan sudah dikirim ke LSO) - Diseminasi : Bimbingan Teknis
23	BPSIP Sulawesi Utara	Tujuh (7) kelembagaan petani (poktan) telah menerapkan GAP budidaya krisan untuk menghasilkan krisan potong sesuai SNI 4478:2014.
24	BPSIP Gorontalo	- Terdampinginya 1 (Satu) Lembaga (Pelaku Usaha) dalam menerapkan SNI 7763:2018 pupuk organik padat - Bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan telah tersusun Pedoman Sistem Manajemen Mutu Sesuai SNI ISO 9001:2015, SOP, Diagram Alir Proses Produksi Pupuk Organik sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk sertifikasi SNI Produk oleh LS-Pro - Rancang-bangun aplikasi sistem informasi Lembaga penerap SNI (korporasi petani organik) berbasis website untuk promosi produk - Digitalisasi implementasi sistem manajemen mutu (penggunaan QR Code) - Pendampingan penyiapan dokumen permohonan sertifikasi SNI ke Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Terakreditasi KAN (PT ICP ELABORASI SURABAYA); Pendampingan Pelaksanaan Sertifikasi Produk (Audit Eksternal); Audit sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2015 di pelaku usaha; dan Audit Lapang Proses Produksi Pupuk Organik Padat - Sertifikat kesesuaian SNI 7763:2018 telah terbit dan diserahkan ke pelaku usaha bersama dengan TIM MONEV BSIP PENERAPAN pada bulan Oktober 2023; Produk telah terdaftar di aplikasi bang beni BSN
25	BPSIP Sulawesi Tengah	- Sosialisasi dan bimbingan teknis SNI 7381:2022 Minyak Kelapa Virgin (VCO) di Kabupaten Banggai, pada tanggal 25 Juli 2023, jumlah peserta 16 IKM dan 1 perusahaan eksportir serta instansi terkait di Kab.Banggai - Pengujian VCO dan h memenuhi standar mutu
26	BPSIP Sulawesi Selatan	- Terlaksananya Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian pada pelaku utama dan pelaku usaha - Meningkatnya Kapasitas Pelaku dan ruang lingkup usaha yang menerapkan SNI/PTM dan standar mutu lainnya
27	BPSIP Sulawesi Tenggara	- Sosialisasi dan Pendampingan Penerapan Standar Mutu Biji Kakao SNI 2323-2008/Amd1:2010 - Pendampingan proses penanganan dan pengolahan biji kakao fermentasi di PT KKM - Progres tahapan pengenalan produk ke konsumen/buyer - Penyebaran diseminasi dalam bentuk Banner, Poster, Buku SNI, <i>Leaflet</i>, <i>Pamflet</i>

No	BPSIP	Output Kegiatan
28	BPSIP Maluku	1. Telah terlaksana pilot project percontohan berupa alat pengering sederhana untuk mengantisipasi musim hujan sebanyak 11 unit di Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. 2. Telah terlaksana pendampingan dengan metode bimbingan teknis (ceramah, praktek lapang dan demonstrasi) 3. Telah terlaksana pendampingan dengan metode bimbingan teknis (ceramah, praktek lapang dan demonstrasi)
29	BPSIP Papua	1. Telah telaksananya Demplot Pendampingan SNI 6128 : 2020 2. Telah dilakukan pendampingan pendaftaran untuk SNI Bina UMKM.
30	BPSIP Maluku Utara	1. Terdampinginya 2 (dua) lembaga dalam menerapkan standar yaitu Poktan Mirimoi Desa Simau, Kec. Galela, Kab. Halut dan Poktan Lestari Desa Kluting Jaya, Kec. Weda Selatan, kab. Halteng). 3. Terdiseminasinya 2 (dua) standar yaitu SNI 6729:2016 tentang Sistem Pertanian Organik dan SNI 6989:2021 tentang IndoGAP. 4. Dihasilkannya 3 (tiga) SNI Bina UMK yaitu dari UMK Seqanura dengan produk kopi instan (SNI 2983:2014 Bina UMK) dan selai buah (SNI 3746:2008 Bina UMK) dan dari UMK Rumah Ole-Ole dengan produk minuman sari buah (SNI 3719:2014 Bina UMK).
31	BPSIP Papua Barat	1. Telah terlaksana BIMTEK Perbenihan kakao terstandar, Pembagian Brosur Panduan SNI Mutu Biji Kakao sesuai GAP (<i>Good Agricultural Practices</i>). 2. Telah dilakukan penilaian Standar Mutu Biji kakao yang diproduksi PT Ebier Suth Cokran melalui LSPro BSIP Papua Barat yang saat ini sudah dalam tahap Audit Implementasi dengan menggunakan skema sertifikasi
32	BPSIP Sulawesi Barat	1. Identifikasi pelaku usaha, LSO dan SNI yang diterapkan 2. Sosialisasi dan pendampingan kelengkapan sertifikasi organik CV. Poki Cahaya Abadi, Kegiatan Audt Inpeksi oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) UPTD BPMKP Sulawesi Selatan; Audit inspeksi, pendampingan ketidak sesuaian, uji sampel 3. Penerbitan Sertifikat Produksi Organik untuk komoditas kopi organic dari CV Poki Cahaya Abadi
33	BPSIP Kepulauan Riau	1. Koordinasi dengan instansi terkait 2. Identifikasi calon lembaga penerap yang akan didampingi yakni di kelompok tani sumber kelapa 3. Identifikasi SNI yang akan diterapkan 4. Sosialisasi SNI 01-7157-2006.yang akan diterapkan ke lembaga/pelaku usaha. 5. Pendampingan SNI 01-7157-2006 di lembaga penerap

6.3. Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Pengujian penerapan standar instrumen pertanian yang dilakukan BPPSIP merupakan salah satu proses/upaya untuk melihat sejauh mana standar diterapkan pada suatu produk, proses, personal, jasa, dan sistem, berdasarkan standar SNI, PTM, dan standar internasional di negara tujuan ekspor.

Dari 33 BPSIP lingkup BBPSIP, terdapat 26 BPSIP yang melakukan kegiatan pengujian. Komoditas-komoditas yang telah diuji terdiri tanaman pangan, Perkebunan, hortikultura dan peternakan. BPSIP yang melakukan pengujian komoditas perkebunan, yaitu: Sulawesi Tengah, Maluku, Lampung, Kalimantan Tengah, Bali, Bengkulu, Jambi, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Sumatera barat, Sumatera Selatan, Sulawesi

Selatan, Bangka Belitung. BPSIP yang melaksanakan pengujian komoditas hortikultura, yaitu: Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa barat, maluku Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur. BPSIP yang melakukan pengujian tanaman Pangan, yaitu: NTB, Papua, dan DIY. Pada komoditas peternakan, yaitu NTT dan Jawa Tengah, dan 1 bidang masalah berupa sarana produksi pertanian dalam bentuk kegiatan penanganan pupuk organik padat yaitu BPSIP Gorontalo.

Pengujian umumnya dilakukan terhadap aspek produk atau proses, sementara hanya satu BPSIP yang melakukan pengujian pada aspek sistem yaitu BPSIP Bali. Penanganan pada produk dan sistem tujuannya untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil produksi.

Pengujian pada aspek produk berupa Ayam KUB, Sapi, Pisang, Manggis, Kelapa, Kopi, Kakao, Jagung, Padi, dan pupuk organik padat. Secara spesifik pengujian dilakukan pada hal-hal syarat mutu, kualitas biji, pemupukan, cara fermentasi, pengolahan, panen, dan pasca panen (komoditas Perkebunan); pemupukan, sanitasi kebun, mutu produk, cara panen, pengujian cemaran pestisida dan logam berat (komoditas hortikultura); dosis pupuk, cara tanam, seleksi tanam, panen, pascapanen, dan pengujian mutu beras (tanaman pangan); pengambilan sampel produk DOC dan Persyaratan mutu bibit sapi bali sesuai SNI (Peternakan) dan parameter/kandungan hara pupuk organik padat apakah telah sesuai SNI (bidang pupuk organik padat).

Pada pengujian komoditas perkebunan aspek yang banyak ditangani adalah teknologi pengolahan, pembenah tanah/kapur pertanian, mutu produk (tanah,

kadar air, benda asing, serangga hidup, biji berkapang, *aflatoksin*, Vit.C dan Vit. B9), biji kakao kering fermentasi, benih, pupuk, dan herbisida. Pada komoditas hortikultura menyangkut aspek pengolahan, budidaya, syarat mutu hasil, GAP buah pisang spesifik lokasi, perbenihan, dan uji tanah untuk melihat hubungan sumber cemaran timbal dengan kondisi tanah.

Dari seluruh pengujian yang dilakukan pada sub sektor perkebunan yang menghasilkan sertifikat SNI sebanyak 4 sisanya masih dalam proses pengujian dan menunggu proses terbitnya sertifikat SNI atau masih berlangsung pengujian. Untuk komoditas Hortikultura baru 2 BPSIP yang sudah menghasilkan sertifikat SNI yaitu BPSIP Maluku dengan Sert. No. 82/02-3-57-042-12/2023: Sertifikat Produk Prima 3 untuk produk PSAT Pokcay dan Sert. No. 82/02-3-11-043-12/2023: Sertifikat Produk Prima 3 untuk produk PSAT Bayam Merah; dan BPSIP Jawa Timur dengan SNI 3164:2009. Petani yang didampingi telah mendapat dokumen pemenuhan persyaratan SNI melalui program SNI bina UMK dan berhak menggunakan logo SNI bina UMK. Sedangkan komoditas Tanaman pangan belum menghasilkan sertifikat SNI. Pada subsektor peternakan sudah dihasilkan satu sertifikat SNI yaitu SNI 8405-1:2017 tentang bibit ayam umur sehari/kuri- bagian 1:KUB-1. Pada pupuk organik padat juga telah menghasilkan sertikat SNI yaitu SNI 7763:2018 Pupuk Organik Padat dari LSPRo PT ICP Elaborasi Surabaya, yang dilaksanakan oleh BPSIP Gorontalo.

Dokumentasi kegiatan pengujian penerapan SIP di BPSIP Kalsel dan Jambi, dapat dilihat pada Gambar 18 dan Gambar 19.



Gambar 18. Pelaksanaan pengujian penerapan budidaya cabai rawit Hiyung di Poktan Kurnia Mandiri Kelurahan Lianganggang Utara Kec. Lianganggang Kota Banjarbaru dan Kelompok tani Karya Baru Desa Hiyung Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin, Kalimantan Selatan.



Gambar 19. Pelaksanaan Pengujian Penerapan standar instrumen manggis di Kelompoktani Sari Puspa, Desa Puspahiang, Kecamatan Puspahiang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

6.4. ICARE

Kementerian Pertanian bersama dengan World Bank pada tahun 2022 telah menyusun Program *Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment* (ICARE) yang difokuskan pada komoditas-komoditas bernilai ekonomis tinggi, untuk mitigasi adanya risiko impor komoditas strategis yang cenderung terus meningkat, serta untuk meningkatkan nilai tambah (value-added) sektor pertanian dan tentunya untuk mendorong ekspor.

Melalui program ICARE yang didukung oleh Bank Dunia dan Bappenas, BSIP telah merancang pendekatan yang komprehensif untuk meningkatkan standar instrumen pertanian di Indonesia.

Program ICARE BSIP difokuskan pada pembangunan kawasan penerapan standar instrumen pertanian dengan dukungan dari korporasi petani. Program ini dijalankan selama 5 tahun, dimulai pada tahun 2023 sampai dengan 2027, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk BSIP,

Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Swasta, *off taker*, serta *stakeholder* lainnya. Lokasi kegiatan mencakup 9 provinsi di Indonesia, yakni Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Fokus komoditas

tahun 2023 yaitu tanaman pangan (padi dan jagung), hortikultura (kentang, pisang, mangga, jeruk), perkebunan (Kopi, kelapa, kakao) dan peternakan (kambing, domba, sapi perah, ayam KUB, dan sapi potong). Lebih rinci, lokasi dan komoditas ICARE dapat di lihat pada Gambar 20 dan Tabel 21.



Gambar 20. Lokasi dan komoditas ICARE di 9 Provinsi

Tabel 21. Lokasi dan komoditas ICARE di 9 Provinsi

No.	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Komoditas
1	Ulu Belu, Air Naningan dan Pulau Panggung	Tanggamus	Lampung	Kopi, ternak kambing
2	Cikajang, Cigedug, Cisarupan, Pasirwangi dan Sukaresmi	Garut	Jawa Barat	Kentang, ternak domba
3	Losari	Brebes	Jawa Tengah	Pisang, padi
4	Rembang, Sukorejo, dan Wonorejo	Pasuruan	Jawa Timur	Jagung, mangga
5	Tebas	Sambas	Kalimantan Barat	Jeruk, padi
6	Tombolo Pao dan Tinggimoncong	Gowa	Sulawesi Selatan	Kentang, ternak sapi perah
7	Praya, Praya Barat, dan Praya Tengah	Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat	Jagung, ternak ayam
8	Airmadidi, Kalawat, Talawaan, Dimembe, dan Kauditan	Minahasa Utara	Sulawesi Utara	Kelapa, jagung
9	Aere dan Lambandia	Kolaka Timur	Sulawesi Tenggara	Kakao, sapi potong

ICARE dirancang untuk mendukung Rantai Nilai Pertanian yang Berkelanjutan Secara Lingkungan dan Finansial serta Inklusif, sehingga dapat meningkatkan akses petani terhadap aset/sarana dan prasarana, serta layanan pertanian; terbangunnya kemitraan rantai nilai komoditas pertanian; meningkatnya penjualan hasil/produk pertanian korporasi petani; dan meningkatnya produktivitas pertanian.

Capaian Kegiatan ICARE TA 2023 di 9 Lokasi adalah sebagai berikut: (1) Validasi

lokasi proyek dan Penerima Manfaat (16.913 CPCL); (2) Pemetaan kawasan agribisnis lokal (9 peta poligon); (3) Pembentukan koperasi (25 Koperasi); (4) Penyusunan rencana agribisnis kawasan, berdasarkan identifikasi GAP rantai nilai (9 Rancangan Agribisnis Kawasan); (5) Bimbingan Teknis/Pelatihan teknis dan kelembagaan (3.874 peserta).

Dokumentasi kegiatan ICARE di beberapa BPSIP dapat di lihat pada Gambar 21-23.



Gambar 21. Demfarm perbenihan jagung di Desa Rap-Rap Kecamatan Airmadidi, Kab. Minahasa Utara, Sulut.



Gambar 22. Survei penilaian kinerja rantai nilai eksisting komoditas jeruk di Kalimantan Barat



Gambar 23. Workshop penyusunan rencana bisnis koperasi di Hotel Urban Pringsewu, Lampung

VII. PENYEBARLUASAN STANDAR

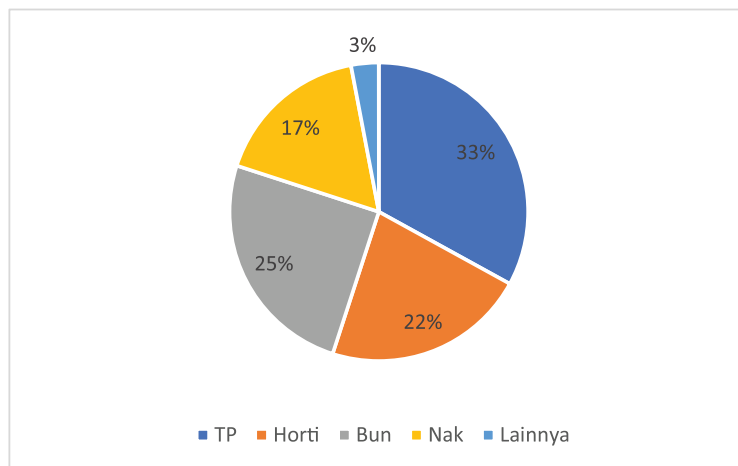
Pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil standar instrumen pertanian bersifat koordinatif. Secara umum, pelaksanaan kegiatan lingkup BBPSIP sudah menunjukkan kesesuaian dengan petunjuk pelaksanaan yang telah diterbitkan dan disosialisasikan kepada pelaksana kegiatan seluruh BPSIP Selindo. Terlihat dari kriteria standar instrumen pertanian yang didiseminasikan, yaitu berupa SNI dan PTM. Metode pelaksanaan, mendukung komoditas strategis nasional dan daerah, serta dari sisi metode menggunakan beragam metode diseminasi yang telah dianjurkan pada buku petunjuk pelaksanaan kegiatan.

BBPSIP dalam pelaksanaan kegiatan ini juga melakukan kegiatan diseminasi langsung berupa kegiatan temu lapang, percontohan penerapan, pameran, penyusunan dan memperbanyak materi

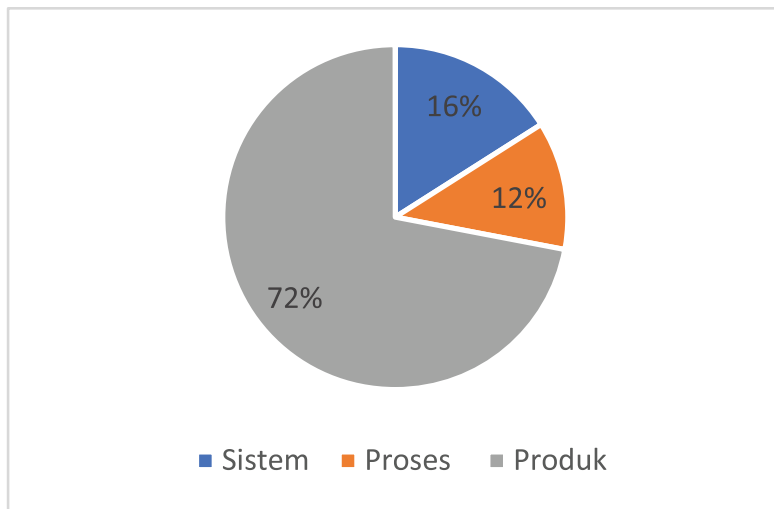
penyuluhan, serta melakukan advokasi kepada pelaksana kegiatan di BPSIP dengan pendekatan liaison officer. Sistem LO memiliki tantangan tersendiri agar berjalan efektif, perlu berbagai upaya perbaikan dan peningkatan kapasitas internal pelaksana kegiatan di BBPSIP sehingga mampu memberikan advokasi yang baik kepada BPSIP, serta perlu ditingkatkan kembali proses komunikasi dan koordinasi.

7.1. Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

Berdasarkan SNI yang didiseminasikan, diketahui sebanyak 33% SNI yang didiseminasikan merupakan SNI terkait komoditas tanaman pangan, 25% komoditas perkebunan, 22% komoditas hortikultura, 17% peternakan dan 3 % SNI lainnya (Gambar 24).



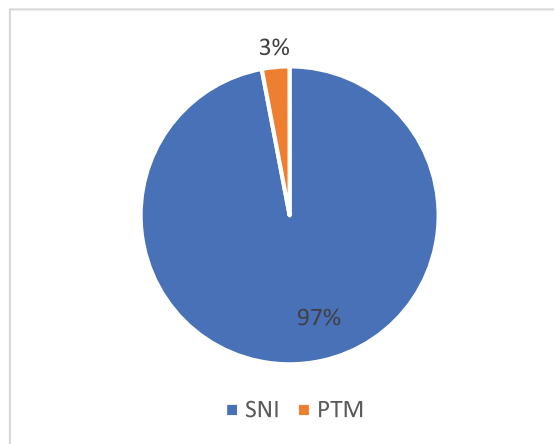
Gambar 24. SNI yang didiseminasikan lingkup BBPSIP berdasarkan sub sektor komoditas



Gambar 25. SNI yang didiseminasikan lingkup BBPSIP berdasarkan jenis SIP

Jika dilihat berdasarkan jenisnya, SNI yang diseminasikan sebagian besar (72%) berupa SNI produk, 16% SNI system dan 12 SNI Proses (Gambar 25). Sedangkan jika berdasarkan bentuknya, semua standar

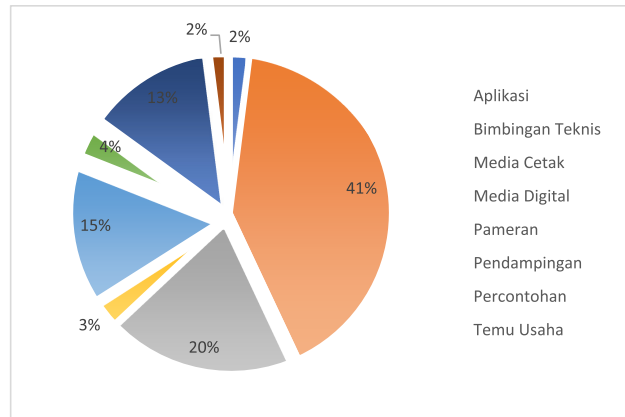
instrumen yang diseminasikan berupa Standar Nasional Indonesia (97%), dan 3% berupa Persyaratan Teknis Minimal (PTM) (Gambar 26).



Gambar 26. SNI yang didiseminasikan lingkup BBPSIP berdasarkan bentuk SIP

Dalam melaksanakan diseminasi standar instrumen pertanian, metode yang digunakan cukup beragam. Paling tidak tercatat 8 metode yang digunakan. Sebagian besar menggunakan metode

bimtek dalam mendiseminasikan standar instrumen pertanian (41%), perbanyakan media cetak (20%), dan pameran (15%) (Gambar 27).



Gambar 27. Metode Diseminasi yang digunakan

7.2. Taman Agro Standar dan Agro Eduwisata

Taman agro standar/agro eduwisata merupakan *display* teknologi inovatif pemanfaatan lahan pekarangan yang terkonsep dalam bentuk taman, didalamnya mencerminkan penataan area lahan pekarangan secara optimal. Komponen kegiatan ini terdiri dari: *display* taman dan *display* teknologi inovatif pemanfaatan lahan pekarangan. Secara teknis, *display* taman harus mengakomodasi fungsi pekarangan sebagai: warung hidup, apotik hidup, lumbung hidup, bank

hidup, dan memperhatikan estetika/keindahan. Sedangkan *display* teknologi inovatif pemanfaatan lahan pekarangan antara lain: media tanam, pola tanam, cara budidaya, penanganan HPT, sistem irigasi, pemupukan, dan perbanyakan tanaman sayuran, buah, toga, dan hias. Taman agro eduwisata melakukan kegiatan pendampingan teknologi inovatif pemanfaatan lahan pekarangan di bidang komoditas tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan; dengan maksud agar teknologi diterapkan sesuai dengan rekomendasi, seperti tersaji pada Gambar 28.



Sumber: data primer

Gambar 28. Teknologi Inovatif yang diterapkan Taman Agro Standar

Capaian kegiatan pengelolaan Taman Agro Standar tahun 2023 dalam bentuk layanan literasi informasi pertanian telah di akses oleh penerima manfaat periode 1 April s.d 31 Desember 2023 sebanyak 3.877 orang dengan rincian peminatan eduwisata sebanyak 13 volume kegiatan dengan kunjungan sebanyak 3.695 orang atau 95,3%, pendampingan/bimtek sebanyak 18 volume kegiatan dengan jumlah kunjungan sebanyak 177 orang atau sebesar 4,6%, dan PKL/Magang/Penelitian sebanyak 1 volume kegiatan yang diikuti 5 orang atau sebesar 0,1%.

Layanan Taman Agro Standar dikategorikan dalam 3 aktivitas layanan, yakni: PKL/Magang/Penelitian, Eduwisata, dan pendampingan/ bimbingan teknis. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 telah diakses oleh 3.877 orang, dengan rincian sebagai berikut:

▪ Pendampingan/Bimtek

Layanan pendampingan/bimtek adalah kegiatan yang lebih bersifat teknis, atau bisa dikatakan lanjutan tahapan setelah

window shopping. Layanan ini dalam tahun 2023 per 31 Desember 2023 berada dalam peringkat ke dua layanan yang paling banyak diminati. Sampai dengan rekaman data terakhir, tercatat diikuti sebanyak 177 orang atau sebesar 4,6% dengan 18 volume kegiatan. Adapun kegiatan dimaksud antara lain:

1) Kegiatan pendampingan Kebun Sekolah di SMPN 4 Bogor

Kegiatan pendampingan difokuskan pada pengembangan aktivitas kebun sekolah di SMPN 4 Bogor yang dilakukan oleh para siswa/i SMPN 4 Bogor yang terlibat aktif dalam organisasi OSIS dan KIR. Ruang lingkup tata kelola kebun sekolah adalah kebun benih, penataan layout tanaman serta budidaya vertiminaponik. Siswa/i didampingi dalam aktivitas budidaya dengan mengacu pada persyaratan teknis minimal (PTM) Hortikultura yang tercantum dalam Permentan No.22 Tahun 2021. Dokumentasi pendampingan Kebun Sekolah di SMPN 4 Bogor dapat dilihat pada Gambar 29.



Gambar 29. Pendampingan Kebun Sekolah di SMPN 4 Bogor

2) Kegiatan bimtek kegiatan budidaya hortikultura KWT Beringin Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal

Kegiatan temu teknis ini dilakukan atas kerjasama Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian Kota Bogor dengan Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian dalam rangka kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa pada tahun anggaran 2023.

Dukungan bimbingan teknis (bimtek) budidaya dan pascapanen pada Kelompok Wanita Tani Hortikultura Beringin, dimaksudkan untuk membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola usahatani mereka. Bimtek ini melibatkan peserta sebanyak 25 orang. Materi yang diberikan mencakup prapanen hingga pascapanen komoditas hortikultura, termasuk cara budidaya yang baik dan pengolahan hasil. Melalui bimtek ini, KWT dapat mempelajari cara budidaya yang baik, penanganan pascapanen yang tepat, dan pengolahan hasil hortikultura. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas dan nilai produk hortikultura serta mengurangi kerugian hasil yang disebabkan oleh penanganan yang kurang tepat.

- 3) Kegiatan pendampingan untuk PPL dan PPS Desa Benteng serta Ketua KWT Barokah Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor

Kunjungan Ketua KWT Barokah, Ibu Nugraheni didampingi oleh PPL Kabupaten Bogor Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kota Bogor, Ibu Titik Mulyadi dan Supardi, SP. dalam rangka mencari literasi informasi pertanian terkait masalah design Kebun Benih Desa (KBD) seluas 8.000 M² dan Teknis Budidaya Ubi Jalar yang terstandar. Selain terkait dua topik di atas, KWT Barokah sharing terkait kegiatan olahan pangan singkong yang diolah menjadi tepung moca serta rencana ikut berpartisipasi dalam even Festival Pangan Lokal berupa Lomba Kreasi Olahan Pangan yang diadakan oleh Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten Bogor pada tanggal 21 Agustus 2023. Pada kesempatan tersebut, didiskusikan pula terkait pemanfaatan daun singkong yang akan dijadikan pewarna dalam kreasi lomba dimaksud serta akan menyampaikan contoh pemanfaatan dari pohon industri singkong. Kemudian rencana akan segera diajukan permohonan narasumber pendampingan dari BBPSIP terkait dengan kegiatan budidaya ubi jalar yang terstandar, untuk mengoptimalkan permintaan pasar yang sudah tersedia di bawah naungan koperasi Institut Pertanian Bogor.

- 4) Kegiatan pendampingan KWT Kemuning Kelurahan Ciwaringin Kecamatan Bogor Tengah

Kegiatan pendampingan fokus pada pembahasan design layout Kebun Benih Desa (KBD) KWT Kemuning, dimana para pengurus KWT minta pendampingan teknis terkait hal tersebut. Konsep pembuatan KBD mengacu kepada Juknis Program P2L dari Ditjen Hortikultura yang mengampu kegiatan Program Pekarangan Lestari (P2L).

- 5) Kegiatan pendampingan di KWT Sempur Kelurahan Sempur Kecamatan Bogor Tengah

Kegiatan pendampingan dilakukan atas kerjasama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor dengan Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian dalam rangka kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa pada tahun anggaran 2023. Dukungan bimbingan teknis

(bimtek) budidaya dan pascapanen pada kesempatan ini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola usahatani mereka. Bimtek ini melibatkan peserta sebanyak 15 orang. Materi yang diberikan mencakup prapanen hingga pascapanen komoditas hortikultura, termasuk cara budidaya yang baik dan pengolahan hasil.

Melalui bimtek ini, mereka dapat mempelajari cara budidaya yang baik, penanganan pascapanen yang tepat, dan pengolahan hasil hortikultura. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas dan nilai produk hortikultura serta mengurangi kerugian hasil yang disebabkan oleh penanganan yang kurang tepat. Dokumentasi pendampingan di KWT Sempur dapat dilihat pada Gambar 30.



Gambar 30. Pendampingan di KWT Sempur

6) Kegiatan pendampingan KWT Kemuning Kelurahan Ciwaringin Kecamatan Bogor Tengah

Pendampingan kali ini dilakukan di KBD KWT Kemuning untuk membuat *display* di lahan seluas kurang lebih 1.500 M2. Desain di layout dibagi

menjadi beberapa bagian, yaitu: rumah persemaian seluas 20 M2, area tanaman sayuran, area tanaman toga, area tanaman pangan, serta area tanaman hias. Dokumentasi kegiatan pendampingan di KWT Kemuning dapat dilihat pada Gambar 31.



Gambar 31. Pendampingan di KWT Kemuning

- 7) Kegiatan pendampingan KWT Kenanga dan PPL Bogor Tengah

Pendampingan kali ini terkait dengan pengelolaan ketersediaan benih di KBD KWT Kenanga untuk bisa berkelanjutan. Ketua KWT Kenanga yang didampingi oleh PPL Bogor Tengah, berharap adanya jadwal pendampingan rutin terhadap KWT di Kota Bogor khususnya di Kecamatan Bogor Tengah yang dilakukan oleh BBPSIP guna mengoptimalkan literasi yang diperoleh oleh KWT terkait dengan kegiatan pertanian yang terstandar.

- 8) Kegiatan pendampingan KWT Sadulur, KWT Sawargi, dan KTD Sahate Kelurahan Tegallega Kecamatan Bogor Tengah pada tanggal 6 September 2023

Kegiatan pendampingan kali ini dilakukan di tiga kelompok tani di Kelurahan Tegallega Kecamatan Bogor Tengah, yang dilakukan bersama dengan PPL Kecamatan Bogor Tengah. Pendampingan pertama di KWT Sadulur yang merupakan salah satu KWT penerima program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PWKSS) yang telah mendapat bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Bank Indonesia berupa lima puluh buah *display* budidaya dalam ember (*budidamber*) dimana dalam pengelolaannya tidak optimal, menyebabkan bantuan *display* menjadi mangkrak. Pada saat pendampingan, disepakati untuk menghidupkan kegiatan bertani di KWT dilakukan melalui pengembangan KBD KWT dan kegiatan budidaya menggunakan

media polibag. Hal ini tidak terlepas mempertimbangkan kondisi lahan yang dimiliki oleh KWT yang tidak terlalu luas, berkisar 20 M2. Kemudian untuk KWT Sawargi, kendala yang dihadapi adalah belum terpenuhinya lahan untuk KBD sehingga kegiatan bertani tidak optimal. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak kelurahan adalah memanfaatkan lahan fasum yang terlihat di perumahan sekitar warga, dimana jaraknya relatif agak jauh dengan tempat tinggal. Kegiatan bertani KWT diarahkan menggunakan media polibag. Selanjutnya untuk KTD Sahate, dimana kelompok ini adalah kelembagaan yang baru terbentuk yang akan didaftarkan di Dinas Pertanian Kota Bogor. Penciri dari KTD Sahate, memanfaatkan lahan pembuangan sampah yang direstorasi oleh pemuda setempat dan dijadikan sebagai lahan pertanian di kawasan padat penduduk. Pada kesempatan tersebut, kehadiran BSIP diharapkan menjadi supporting terhadap aktivitas ketiga kelompok tani baik berupa pendampingan teknis maupun bantuan benih berkualitas untuk kegiatan budidayanya.

- 9) Kegiatan pendampingan PPL Kota Bogor pada tanggal 27 September 2023
- 10) Kegiatan pendampingan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Bogor pada tanggal 29 September 2023
- 11) Kegiatan pendampingan KWT dan PPL Tanah Sareal pada tanggal 29 September 2023
- 12) Kegiatan pendampingan KWT dan KTD Kecamatan Bogor Utara pada tanggal 10 Oktober 2023

- 13) Kegiatan pendampingan BPP IX Cibinong pada tanggal 24 Oktober 2023
- 14) Kegiatan pendampingan KWT Pancasona pada tanggal 18 Nopember 2023
- 15) Kegiatan pendampingan DKP Kabupaten Bogor pada tanggal 28 Nopember 2023
- 16) Kegiatan pendampingan Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur pada tanggal 30 Nopember 2023
- 17) Kegiatan pendampingan PSI Peternakan pada tanggal 15 Desember 2023
- 18) Kegiatan pendampingan KWT Anggrek pada tanggal 20 Desember 2023
- Adapun materi yang disampaikan pada 18 kegiatan layanan pendampingan/bimtek selama periode 1 April s.d 31 Desember 2023 sesuai dengan kebutuhan tema acara dan kebutuhan pengunjung, keragaannya seperti tersaji pada Tabel 22 berikut.

Tabel 22. Materi yang Disampaikan pada Layanan Pendampingan/Bimtek periode April-Desember 2023

No.	Uraian	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Materi Kegiatan
1.	SMPN 4 Bogor	3 Juli 2023	1	Layout Kebun sekolah
2.	KWT Beringin Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal	13 Juli 2023	25	Budidaya hortikultura
3.	PPL dan PPS Desa Benteng serta Ketua KWT Barokah Desa Benteng Kecamatan Ciampea	27 Juli 2023	4	Layout Kebun Benih Desa
4.	KWT Kemuning Kelurahan Ciwaringin Kecamatan Bogor Tengah	9 Agustus 2023	3	Layout Kebun Benih Desa
5.	KWT Sempur Kelurahan Sempur Kecamatan Bogor Tengah	16 Agustus 2023	20	Budidaya hortikultura
6.	KWT Kemuning Kelurahan Ciwaringin Kecamatan Bogor Tengah	18 Agustus 2023	15	Pengolahan tanah
7.	KWT Kenanga dan PPL Bogor Tengah	25 Agustus 2023	2	Benih Sayuran
8.	KWT Sadulur, KWT Sawargi, dan KTD Sahate Kelurahan Tegallega	6 September 2023	15	P2WKSS
9.	PPL Kota Bogor	27 September 2023	2	Budidaya tanaman terung
10.	Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Bogor	29 September 2023	2	Standardisasi Penyuluhan

No.	Uraian	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Materi Kegiatan
11.	KWT dan PPL Tanah Sareal	29 September 2023	3	Benih sayuran
12.	KWT dan KTD Kecamatan Bogor Utara	10 Oktober 2023	25	Budidaya Hortikultura
13.	BPP IX Cibinong	24 Oktober 2023	25	Standardisasi Penyuluhan
14.	KWT Pancasona	18 Nopember 2023	25	Budidaya Sayuran
15.	DKP Kabupaten Bogor	28 Nopember 2023	1	Benih Sayuran
16.	Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur	30 Nopember 2023	3	Tatakelola Agro Eduwisata
17.	PSI Peternakan	15 Desember 2023	7	Tatakelola Agro Eduwisata
18.	KWT Anggrek	20 Desember 2023	1	Budidaya tanaman anggrek

PKL/Magang/Penelitian

Taman agro eduwisata mendapatkan tugas untuk menjadi tempat kegiatan mahasiswa Magang/PKL/Penelitian dari empat Universitas pada tahun 2023, yakni: Universitas Jenderal Soedirman,

Universitas Ageng Tirtayasa, Universitas Negeri Sebelas Maret dan IPB University. Keragaan kegiatan PKL/Magang/ Penelitian dapat dilihat pada Tabel 23 dan dokumentasi kegiatan Magang/PKL/ Penelitian pada Gambar 32.



Gambar 32. Peserta Kegiatan Magang/PKL/Penelitian

Tabel 23. Materi Keragaan Mahasiswa PKL/Magang/Penelitian di BBPSIP

No.	Asal Perguruan Tinggi			Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta (orang)
	Prodi	Jenjang	Universitas		
1	Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian	S1	UNS	30 Jan s.d 28 Feb 2023	6
2	Teknologi Pangan	S1	Untirta	9 Feb s.d 8 Maret 2023	5
3	Agroteknologi	S1	Unsoed	9 Feb s.d 8 Maret 2023	3
4	Agroteknologi dan Pengembangan Masyarakat	Vokasi	IPB University	Juni – September	5
5	Rekayasa Komputer	Vokasi	IPB University	1 Agustus – 31 Desember	3

Sumber: data primer

7.3. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil SIP pada Pekan Nasional Petani Nelayan ke XVI tahun 2023

Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil standarisasi instrumen pertanian pada pengguna dan pemanfaatannya serta penjangkaran umpan baliknya. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah peran serta sebagai *infoguide* pada gelar percontohan pengembangan agribisnis pada kegiatan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan ke XVI tahun 2023 yang dilaksanakan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 5-19 Juni 2023. Peran *infoguide* dilakukan pada blok percontohan lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang menampilkan percontohan penerapan standar instrumen pertanian presisi. Komoditas yang ditampilkan cukup beragam, mulai dari tanaman pangan berupa sorgum, dan padi gogo, hortikultura

berupa percontohan buddidaya bawang merah, semangka, kabocha, tanaman hias, serta berbagai jenis tanaman buah dalam pot. Pada blok BSIP juga dicontohkan berbagai komoditas unggulan perkebunan (kopi, tebu, kelapa, tanaman pemanis dan serta, tanaman rempah, obat dan biofarmaka), serta komoditas peternakan (seperti kelinci, ayam KUB, dan kambing boerka).

Jumlah pengunjung blok BSIP yang tercatat sejumlah 512 orang. Komposisi pengunjung sebagian besar dari kelompok petani (60,16%), selanjutnya pegawai pemda 17,38%, dan penyuluh 13,67%. Gambaran komposisi pengunjung ini sesuai dengan target sasaran utama kegiatan PENAS Tani, yang ditujukan untuk para petani, dalam hal ini kontak tani nelayan andalan dari berbagai provinsi. Data pengunjung pada area Gelar Percontohan lingkup BSIP dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Data pengunjung pada area Gelar Percontohan lingkup BSIP

Komponen Pengunjung	Jumlah Pengunjung (orang)	%
Petani	308	60,16
Penyuluh	70	13,67
Pegawai Pemda	89	17,38
Guru/Dosen/Widyaiswara	9	1,76
Siswa/Mahasiswa	15	2,93
Lainnya	21	4,10
JUMLAH	512	100,00

7.4. Penyusunan dan Perbanyak Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian

Penyusunan dan perbanyak materi penyuluhan standar instrumen pertanian dalam bentuk brosur yang berisi SNI

yang dikeluarkan oleh BSN. Materi yang disusun sebanyak 20 SNI. Penyusunan materi penyuluhan juga dilakukan dalam media elektronik dan disebarluaskan melalui *platform youtube*. Materi penyuluhan secara rinci dapat dilihat Tabel 25.

Tabel 25. Daftar judul materi penyuluhan

Komoditas	No	Judul Materi
MEDIA TERCETAK		
Tanaman Pangan	1	SNI 8969:2021: IndoGAP Tanaman Pangan
	2	SNI 6233:2015: Benih Padi Inbrida
	3	SNI 224:2023: Gabah
	4	SNI 6128:2020: Beras
	5	SNI 6232:2015: Benih Jagung Bersari Bebas
	6	SNI 6944:2015: Benih Jagung Hibrida
Perkebunan	1	SNI 7381:2022: VCO
	2	SNI 01-3542-2004: Kopi Bubuk
	3	SNI 7934:2014: Coklat dan produk-produk coklat
	4	SNI 3392:2023: Cengkih
	5	SNI 01-3188-1992: Kopi biji, Penentuan kopi lolos ayakan, nilai cacat dan kotoran
Pupuk	1	SNI 7763 2018: Pupuk Organik Padat
	2	SNI 6729:2016: Sistem Pertanian Organik
Hortikultura	1	GAP Buah dan Sayur (Permentan 22/2021)
	2	SNI 3159:2013: Bawang merah (<i>Allium cepa</i> var. <i>ascalonicum</i>)
	3	SNI 3211:2009: Manggis

Komoditas	No	Judul Materi
Pernakan	1	SNI Ayam KUB
	2	SNI 3178:2013: Dedak padi - Bahan pakan ternak
	3	SNI 4483:2013: Jagung - Bahan pakan ternak
	4	SNI 4227:2013: Bungkil kedelai - Bahan pakan ternak
MEDIA ELEKTRONIK		
	1.	Budidaya Padi Inbrida Terstandar
	2.	Harga Cabai Anjlok ? Bikin Aja Abon Cabai
	3.	Bibit Ayam KUB-1 Terstandar SNI 8405-1: 2017
	4.	KOPI

7.5. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Instrumen Pertanian

Kinerja Anggaran

BBPSIP mendapatkan alokasi dana untuk Kegiatan penguatan kapasitas penerap Standar Instrumen Pertanian yang tersebar di Sembilan provinsi,

yakni DIY, Sulut, Jatim, Jateng, Lampung, Banten, Jabar, NTB,dan Sulsel dengan alokasi dana sebesar Rp 9,8 Milyar dan terealisasi sebesar 9,43 Milyar (96,21%). Lebih rinci, pagu dan realisasi kegiatan penguatan kapasitas penerap SIP lingkup BBPSIP tahun 2023 ditampilkan pada Tabel 26.

Tabel 26. Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap SIP lingkup BBPSIP 2023

No	Satker	Pagu	Realisasi	%
1	DI Yogyakarta	200.000.000	200.000.000	100
2	Sulawesi Utara	200.000.000	199.821.437	99,91
3	Jawa Timur	400.000.000	395.849.912	98,96
4	Jawa Tengah	400.000.000	395.339.797	98,83
5	Lampung	200.000.000	197.139.000	98,57
6	Banten	200.000.000	197.092.500	98,55
7	Jawa Barat	200.000.000	196.985.856	98,49
8	Nusa Tenggara Barat	200.000.000	196.262.006	98,13
9	Sulawesi Selatan	7.800.000.000	7.450.510.057	95,52
	Lingkup BBPSIP	9.800.000.000	9.429.000.565	96,21

Kinerja Fisik

Kegiatan penguatan kapasitas penerap standar pertanian dilaksanakan dalam bentuk pendampingan dalam rangka memberi informasi, pengetahuan

dan keterampilan para penerap standar, sehingga diharapkan dapat mengimplementasikan standar pertanian dalam rangka mendukung peningkatan produksi padi dan jagung. Kegiatan dilaksanakan di tujuh provinsi lokasi

pengembangan komoditas padi dan jagung nasional, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat.

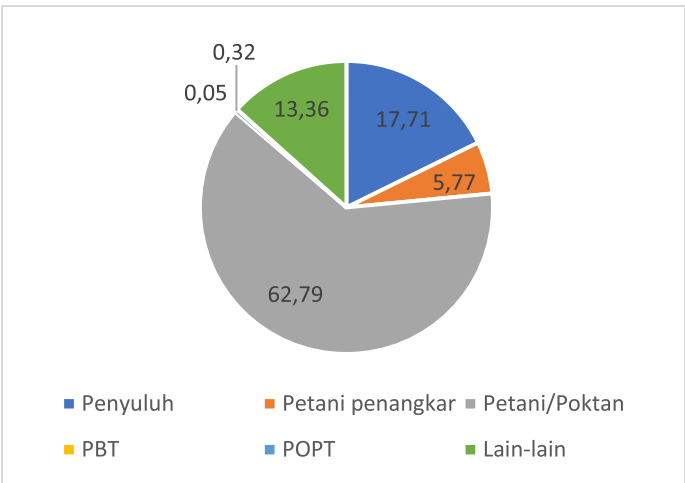
Peserta kegiatan secara umum terdiri dari penyuluh/PPL, petani penangkar dan petani. Peserta kegiatan mencapai 7.031 orang, dengan komposisi peserta 72,79% petani, 17,71% Penyuluh Pertanian, dan lainnya (Camat, Kepala Desa, Babinsa,

Bhabinkamtibmas) sebanyak 13,36% (Tabel 27; Gambar 33).

Cakupan materi yang disampaikan terdiri dari aspek: (1) Program dan kebijakan peningkatan produksi padi dan jagung; (2) *Good Agricultural Practices* (GAP) padi dan jagung; (3) Teknologi perbenihan padi dan jagung. Narasumber berasal dari institusi yang kompeten di bidang komoditas padi dan jagung mencakup perbenihan, GAP, GHP dan penerapan standar lainnya yang dibutuhkan di lokasi.

Tabel 27. Lokus Kabupaten lokasi pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas penerap standar tahun 2023

Provinsi/Kabupaten	Jumlah Peserta (orang)
Sulawesi Selatan	6.001
1. Makassar	306
2. Gowa	154
3. Takalar	154
4. Jeneponto	154
5. Bantaeng	154
6. Bulukumba	459
7. Sinjai	616
8. Bone	770
9. Soppeng	462
10. Wajo	462
11. Pare-pare	616
12. Barru	462
13. Pangkep	462
14. Maros	770
Jawa Timur	300
1. Lamongan	134
2. Ngawi	114
Jawa Tengah	166
1. Pemalang	166
Jawa Barat	154
1. Indramayu	154
Banten	154
1. Pandeglang	154
Nusa Tenggara Barat	154
1. Sumbawa Barat	154
TOTAL	7.031



Gambar 33. Komposisi Peserta Penguatan Kapasitas Penerap Standar

Respon peserta terhadap kegiatan penguatan kapasitas penerap standar, diukur melalui survei evaluasi kepada peserta kegiatan. Terdapat 10 aspek yang dievaluasi, yaitu: (1) kegiatan dapat meningkatkan pemahaman terkait kebijakan program peningkatan produksi tanaman pangan (padi/jagung); (2) kegiatan dapat meningkatkan pemahaman terkait perbenihan tanaman pangan (padi/jagung); (3) kegiatan dapat meningkatkan pemahaman terkait budidaya yang baik (GAP) tanaman pangan (padi/jagung); (4) kegiatan bermanfaat

untuk meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas; (5) materi sesuai dengan kebutuhan; (6) materi mudah difahami; (7) materi dapat diujicoba dan disebarluaskan kepada petani; (8) materi dapat disebarluaskan ke petani; (9) narasumber menyampaikan materi dengan jelas; dan (10) alokasi waktu penyampaian materi memadai. Secara umum, hasil penilaian peserta terhadap pelaksanaan kegiatan, sebagian besar peserta menyatakan setuju dan sangat setuju pada semua aspek yang diukur (Tabel 28).

Tabel 28. Respon peserta terhadap pelaksanaan penguatan kapasitas penerap standar, Tahun 2023

No	Pertanyaan	Penilaian				
		TS (%)	KS (%)	S (%)	SS (%)	Total (%)
1	Kegiatan dapat meningkatkan pemahaman terkait kebijakan program peningkatan produksi tanaman pangan (padi/jagung)	0,06	0,99	45,11	53,84	100
2	Kegiatan dapat meningkatkan pemahaman terkait perbenihan tanaman pangan (padi/jagung)	0,00	0,80	47,59	51,61	100
3	Kegiatan dapat meningkatkan pemahaman terkait budidaya yang baik (GAP) tanaman pangan (padi/jagung)	0,07	1,19	49,43	49,31	100

No	Pertanyaan	Penilaian				
		TS (%)	KS (%)	S (%)	SS (%)	Total (%)
4	Kegiatan dapat bermanfaat untuk meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas	0,09	1,45	50,90	47,57	100
5	Materi sesuai dengan kebutuhan	0,53	1,66	53,58	44,23	100
6	Materi mudah difahami	1,02	3,53	58,65	36,80	100
7	Materi dapat diujicoba dan disebarluaskan kepada petani	1,24	3,35	51,86	43,55	100
8	Materi dapat disebarluaskan kepada petani	0,94	4,34	49,54	45,17	100
9	Narasumber menyampaikan materi dengan jelas	0,60	2,33	50,53	46,54	100
10	Alokasi waktu penyampaian materi memadai	2,05	9,17	53,44	35,34	100

Keterangan: TS = tidak setuju; KS=kurang setuju; S=setuju; SS=Sangat setuju

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dapat di lihat pada Gambar 34-36.



Gambar 34. Penguatan kapasitas Penerap Standar di Sulawesi Selatan



Gambar 35. Penguatan kapasitas Penerap Standar di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah



Gambar 36. Penguatan kapasitas Penerap Standar di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur



VIII. DUKUNGAN DAN PEMANFAATAN HASIL STANDARDISASI

8.1. Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas Implementasi Kerjasama

Peningkatan layanan kerjasama dalam dan luar negeri dalam lingkup BBPSIP merupakan hal yang penting untuk memperluas jaringan kerjasama, pertukaran pengetahuan, dan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Beberapa faktor utama yang ditenggarai dapat meningkatkan layanan kerjasama dalam dan luar negeri di lingkup BBPSIP meliputi:

- Kebijakan yang mendukung: adanya kebijakan yang mendukung kerjasama dalam dan luar negeri akan memudahkan proses kerjasama antar lembaga atau negara.
- Teknologi informasi: pemanfaatan teknologi informasi untuk memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi antar pihak yang bekerjasama.
- Sumber daya manusia yang kompeten: ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman dalam kerjasama internasional.
- Kemitraan strategis: membangun kemitraan strategis dengan lembaga atau negara lain untuk meningkatkan kerjasama.

8.2. Implementasi Kerjasama Luar Negeri

8.2.1. *The Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI)*

BBSIP Penerapan mendapatkan kerjasama hibah dari *The Asian Food and Agriculture*

Cooperation Initiative (AFACI) dengan tema "*Improvement of Rural Agricultural Technology Extension System in Asia*". AFACI adalah badan kerjasama antar pemerintah dan multilateral yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dan mempromosikan pertanian berkelanjutan di negara-negara Asia melalui transfer dan berbagi pengetahuan dan teknologi. Untuk mewujudkan tujuannya, AFACI melaksanakan, mengelola, mendanai, dan mengkoordinasikan proyek multilateral, pelatihan internasional, lokakarya program, dan simposium. Sekretariat AFACI berkedudukan di *International Technology Cooperation Center (ITCC), Rural Development Administration* di Jeonju, Korea. AFACI beranggotakan 15 negara, yaitu: Bangladesh, Bhutan, Kamboja, Laos, Indonesia, Kyrgyzstan, Mongolia, Myanmar, Nepal, Filipina, Sri Lanka, Thailand, Uzbekistan, Vietnam, dan Korea.

BBSIP Penerapan mengajukan proposal berjudul "*Strengthening Capacity Building and Partnership among Agricultural Extension Providers in Indonesia*" untuk dilaksanakan selama 3 tahun pada tahun 2023 hingga 2026. Kegiatan kerjasama ini bertujuan untuk:

- identifikasi lokasi proyek, kondisi eksisting kompetensi individu dan skema kemitraan penyuluh pertanian saat ini
- merumuskan *grand design* untuk memperkuat kapasitas pembinaan dan kemitraan antar penyuluh pertanian

- peningkatan kapasitas penyuluh pertanian melalui *Training of Trainer* dan pelatihan tematik
- menerapkan model *grand design* dalam penguatan kemitraan antar penyuluh di Pos Penyuluhan Pertanian Desa (Posluhdes)
- merumuskan rekomendasi kebijakan di bidang kapasitas membangun dan kemitraan yang berkelanjutan antara penyuluh pertanian

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah: penyedia jasa penyuluhan pertanian yang terdiri atas penyuluh swadaya, penyuluh pemerintah, dan penyuluh swasta; serta institusi yang membawahi penyuluh pertanian termasuk pemerintah daerah.

Kick-off meeting kegiatan kerja sama luar negeri AFACI-RATES, pilot proyek penumbuhan dan pengembangan pos penyuluhan desa. Koordinasi Persiapan Penunjukan Lokasi Kegiatan AFACI-RATES. Seminar persiapan kerja sama AFACI-RATES tahun 2023. Survei lokasi CPCL kegiatan kerja sama AFACI di 6 kecamatan di Kabupaten Bogor. Pelaksanaan survei lapangan AFACI kegiatan kerja sama di Kabupaten Karawang (Jawa Barat), Kabupaten Tapin (Kalimatan Selatan), dan Kabupaten Tanah Laut (Kalimatan Selatan). Inisiasi kerja sama dengan perguruan tinggi dan *stakeholder* melalui FGD Proyek AFACI-RATES dengan topik Penumbuhan dan Pengembangan Posluhdes. *Baseline* kegiatan AFACI Ke Desa Jomin Timur dan Desa Pucung, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang. Untuk kegiatan AFACI, hasil *baseline* di Karawang menunjukkan bahwa keempat Desa yang menjadi CPCL masih belum memenuhi syarat awal untuk menjadi lokus kegiatan AFACI. Tim memutuskan untuk melakukan *baseline*

sekali lagi ke Jomin Timur dalam rangka identifikasi petani dan peternak potensial disana. Hasil yang didapatkan antara lain Desa Pucung menjadi desa utama sedangkan Desa Jomin Timur akan menjadi desa ikutan dalam kegiatan AFACI di Kabupaten Karawang. Untuk kegiatan AFACI, telah dilakukan *Baseline* kegiatan AFACI Ke Desa Jomin Timur dan Desa Pucung, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang. *Baseline* kegiatan ini selanjutnya akan dianalisis untuk ditindaklanjuti finalisasi penetapan lokasi kegiatan.

Hasil Kegiatan Tahun 2023

Setelah terbitnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi kelembagaan penyuluhan di daerah menjadi melemah. Situasi ini sedikit banyak memberikan tantangan tersendiri bagi penyuluh dalam menjalankan kegiatan penyuluhan di lapangan. Di sisi lain, Posluhdes belum berfungsi optimal untuk mengisi kesenjangan kebutuhan informasi dan pendampingan. Menurut data Simluhtan 2023, terdapat 45.000 penyuluh pemerintah, 28.000 penyuluh swadaya, 83.000 desa, dan hanya 6.000 Posluhdes. Oleh karena itu, petani progresif dan penyuluh swasta menjadi andalan untuk masa depan kegiatan penyuluhan pertanian terhadap terbatasnya jumlah penyuluh pemerintah, sebagai peningkatan peran Posluhdes. Memobilisasi dan mengoptimalkan peran petani progresif dan penyuluh swasta membutuhkan dukungan kebijakan yang sesuai.

Lokasi percontohan dipilih berdasarkan kriteria seperti jumlah penyuluh, jumlah BPP, jumlah desa dan kami melakukan analisis rasio untuk memilih rasio penyuluhan tertinggi per desa untuk

memberikan dampak yang lebih besar pada kegiatan AFACI. Terdapat tiga provinsi yang mewakili rasio penyuluhan tertinggi yaitu Jawa Barat (200), Jawa Tengah (200), Lampung (185). Mempertimbangkan masukan dari Tim GFRAS sebagai evaluator proposal kegiatan AFACI-RATES, yaitu: a) Peningkatan kedalaman informasi dan intensitas pendampingan, b) karena ini adalah kegiatan *pilot project*, maka Provinsi yang dipilih direncanakan sebanyak dua provinsi, dimana masing-masing provinsi akan diambil satu

kabupaten (beserta kecamatan terpilih). Tim kemudian melakukan *expert judgement* dan memilih Jawa Barat dan Kalimantan Selatan (mewakili luar Jawa). Dengan formulasi yang sama, tim menghitung jumlah penyuluhan dan atribut lainnya di tingkat provinsi dan didapatkan Bogor dan Karawang di Jawa Barat dan Pleihari di Kalimantan Selatan.

Sasaran kuantitatif kegiatan AFACI dirinci pada Tabel 29, sedangkan dokumentasi kegiatan AFACI dapat dilihat pada Gambar 37 dan 38.

Tabel 29. Sasaran Kuantitatif Kegiatan AFACI

Indikator	Tahun pertama (Desember 2022-November 2023)		
	Rencana (A)	Keluaran (B)	Tingkat (%)
Analisis kondisi infrastruktur saat ini dalam sistem penyuluhan pedesaan	1	1	100
Penetapan rencana aksi untuk penyuluhan pedesaan	1	1	100
Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas terkait penyuluhan pedesaan	4	4	100
Pembuatan manual penyuluhan teknologi yang terkait dengan proyek-proyek AFACI	2	2	100
Pengembangan manual penyuluhan teknologi	-	-	-
Jumlah penyuluh terlatih yang mampu menggunakan TIK untuk kegiatan penyuluhan pertanian (per lokasi)	30	30	100
Jumlah penyuluh pertanian terlatih yang mampu merancang media dan metode yang sesuai (per lokasi)	30	30	100

Sumber : data primer, diolah



Gambar 37. Pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan Posluhdes di GOR Sungai Riam, Kec. Pelihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan.



Gambar 38. Praktek identifikasi sumberdaya desa dan penggunaan media di Desa Sukaresi, Kec Tamansari, Kab. Bogor, Jawa Barat.

8.2.2. Layanan Konsultasi Padi

Dalam hal layanan Kerjasama luar negeri lingkup BBPSIP, tim RCM/LKP (Layanan Konsultasi Padi) BBPSIP melakukan pembuatan *handbook* atau *Guidelines* untuk *Working Package 4* bekerjasama dengan IRRI *Headquarter* dan PSITP. *Handbook* ini diharapkan akan menjadi acuan bagi BPSIP dalam pelaksanaan FGD, KII dan *Online Survey* yang menjadi bagian dari WP4. Pelaksanaan *online survey* telah selesai pada akhir Juni 2023. Kegiatan RCM ini dilaksanakan di 8 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan.

Untuk mendukung kegiatan ini, tim RCM BBPSIP melakukan inisiatif untuk membuat *handbook* atau *Guidelines* untuk *Working Package 4* bekerjasama dengan IRRI *Headquarter* dan PSITP. Guideline ini digunakan dalam pelaksanaan survey di lokasi RCM. Di Akhir tahun dilakukan monitoring kegiatan yang melibatkan BBPSIP di 3 lokasi yaitu Jawa Timur, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.

8.3. Implementasi Kerjasama Dalam Negeri

Kerjasama BBPSIP

Capaian layanan kerjasama dalam negeri BBPSIP mencapai 9 kegiatan.

Kerjasama yang berhasil terjalin meliputi kerjasama dengan beberapa institusi seperti universitas, lembaga standardisasi dan institusi lainnya. Judul dan jenis kerjasama dapat di lihat pada Tabel 30.

Tabel 30. Data Kerjasama BBPSIP dengan Kelembagaan Lainnya

No	Judul/Lembaga	Jenis Kerja Sama	Tanggal		Status
			Mulai	Selesai	
1	Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar- Kampus Merdeka / Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret	Perjanjian Kerja Sama	27 Juli 2021	27 Juli 2024	Aktif
2	Kerja Sama Produksi Benih dalam Rangka Penyediaan Benih Sumber Padi dan Kedelai / Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Perjanjian Kerja Sama	27 Agustus 2021	27 Agustus 2024	Aktif
3	Kerja Sama dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, serta Kegiatan-Kegiatan Lain yang Relevan dalam Bidang Peternakan / Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin	Nota Kesepahaman	16 Maret 2022	16 Maret 2027	Aktif
4	Pengembangan Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Dunia Kerja / Program Studi Peternakan Program Sarjana Strata Satu, Universitas Hasanuddin	Perjanjian Kerja Sama	16 Maret 2022	16 Maret 2027	Aktif
5	Pengembangan Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Dunia Kerja / Program Studi Teknologi Produksi Ternak Program Sarjana Diploma Empat, Universitas Hasanuddin	Perjanjian Kerja Sama	16 Maret 2022	16 Maret 2027	Aktif
6	Pengembangan Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Dunia Kerja / Program Studi Agribisnis Program Sarjana Diploma Empat, Universitas Hasanuddin	Perjanjian Kerja Sama	16 Maret 2022	16 Maret 2027	Aktif
7	Kerja Sama dalam Produksi Benih Kelapa / Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya	Nota Kesepahaman	13 Juni 2022	13 Juni 2025	Aktif
8	Fasilitasi Bimbingan Teknis Lembaga Sertifikasi Produk, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat / Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standar Nasional	Perjanjian Kerja Sama	15 Mei 2023	15 Mei 2024	Aktif
9	Penerapan Standar Instrumen Pertanian pada Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Riau / Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau	Perjanjian Kerja Sama	11 Juli 2023	11 Juli 2028	Aktif

Sumber: data primer, diolah

▪ Koordinasi Implementasi Kerjasama Lingkup BPSIP

Perjanjian kerja sama dilakukan antara BBPSIP dengan Direktorat Penguatan Penerapan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tentang Fasilitasi Bimbingan

Teknis Lembaga Penilaian Kesesuaian di BPSIP Papua Barat. Implementasi PKS ini telah dilakukan bimbingan teknis secara *online* di BPSIP Papua Barat dalam 4 tahap.

BBPSIP mengkoordinasikan kerjasama antara BPSIP Riau dengan Pemda

Riau terkait pengelolaan produk hasil standardisasi instrumen pertanian dan penerapan standar. Untuk memayungi PKS ini dibuat kesepakatan Bersama (MoU) antara Gubernur Riau dengan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Dokumentasi Penandatanganan MoU antara Kepala BSIP dengan Gubernur Riau dapat di lihat pada Gambar 39. Sebanyak dua kali pertemuan telah dilakukan dengan melibatkan BBSIP Penerapan yaitu diskusi terkait Nota Kesepahaman dan diskusi terkait PKS. *Draft* PKS akan difinalisasi dan selanjutnya memastikan tanggal penandatanganan MoU kedua pimpinan. Selain itu terdapat pelaksanaan koordinasi fasilitasi kegiatan program transformasi

KP Sitiung menjadi Pusat Material Genetik Kelapa Sawit milik Indonesia.

BBPSIP juga mengkoordinasikan kerjasama antara BSIP dengan Kabupaten Minahasa Selatan, yang selanjutnya diturunkan menjadi kerjasama antara Sekretariat BSIP dengan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan. Kerjasama ini meliputi penerapan standar, namun sampai akhir tahun turunan PKS belum terealisasi. Kerjasama lainnya yang dikoordinasikan oleh BSIP Penerapan yaitu antara Pemerintah Maluku Utara dengan BSIP dengan turunan perjanjian kerjasama Sekretariat BSIP dengan Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Utara.



Gambar 39. Dokumentasi Penandatanganan MoU antara Kepala BSIP dengan Gubernur Riau

Untuk menjaring kolaborasi lebih lanjut dengan BSN, BBPSIP melakukan koordinasi kegiatan pendampingan sarana pengujian lembaga sertifikasi ke Badan Standardisasi Nasional yang akan

ditindaklanjuti dengan pelaksanaan diskusi terkait penerapan standar. Koordinasi kegiatan pendampingan sarana pengujian lembaga sertifikasi ke Badan Standardisasi Nasional.

- Implementasi Kerjasama BBPSIP dengan Universitas

Penutupan kegiatan kerja sama Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MDKM) tahun 2022 dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta sebanyak 4 orang mahasiswa Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Penerimaan monitoring kegiatan kerja sama magang dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa Banten dan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Penutupan kegiatan kerja sama magang dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa Banten Prodi Teknologi Pangan sebanyak 5 orang, dan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto Prodi Agroteknologi sebanyak 3 orang. Layanan kerjasama dengan Vokasi IPB, BBPSIP Penerapan menerima lima mahasiswa Praktek Kerja Lapangan yang akan dilaksanakan selama 3 bulan (Juni-September). Kelima mahasiswa tersebut berasal dari jurusan Agroteknologi dan Pengembangan Masyarakat, Vokasi

IPB. Mereka mengambil tema budidaya tanaman sayuran dengan sistem hidroponik serta budidaya bunga telang dengan media tanam beda perlakuan. Dokumentasi Kegiatan Mahasiswa PKL di BBPSIP dapat dilihat pada Gambar 40.

Untuk layanan magang mahasiswa, BBPSIP menerima lima mahasiswa Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan selama 3 bulan (Juni-September). Kelima mahasiswa tersebut berasal dari jurusan Agroteknologi dan Pengembangan Masyarakat, Vokasi IPB. Mereka mengambil tema budidaya tanaman sayuran dengan sistem hidroponik serta budidaya bunga telang dengan media tanam beda perlakuan. Pada periode Agustus – Desember 2023, BBPSIP menerima praktek kerja lapang mahasiswa Sekolah Vokasi IPB University Prodi Rekayasa Komputer yang merancang alat pengukur kesuburan tanah secara langsung/*portable*.



Gambar 40. Dokumentasi Kegiatan Mahasiswa PKL

- Implementasi Kerjasama dengan Lembaga Lain

Tindak lanjut kerja sama dengan RS Hermina Mekarsari dengan bantuan dan pendampingan penanaman benih

tanaman buah di Kecamatan Cileungsi dalam rangka kegiatan Bakti Sosial *Go Green* memperingati HUT RS Hermina Mekarsari. Dokumentasi penyerahan benih dapat di lihat pada Gambar 41.



Gambar 41. Dokumentasi penyerahan benih pada kegiatan Bakti Sosial Go Green kerjasama dengan RS Hermina Mekarsari

Kerjasama Lingkup BBPSIP

Kerjasama dalam negeri lingkup BBPSIP mitra kerjasama dapat di lihat pada mencapai 80 judul kegiatan. Judul dan Tabel 31.

Tabel 31. Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup BBPSIP

No.	Judul Kerja Sama	Nama Mitra Kerja Sama
1.	Nota Kesepahaman Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Dunia Kerja	Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin
2.	Pengembangan Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Dunia Kerja	Program Studi Peternakan Program Sarjana Strata Satu Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin
3.	Pengembangan Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Dunia Kerja	Program Studi Teknologi Produksi Ternak Program Diploma Empat Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin
4.	Pengembangan Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Dunia Kerja	Program Studi Agribisnis Peternakan Program Sarjana Strata Satu Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin
5.	Pengembangan Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Dunia Kerja	Program Studi Teknologi Pakan Ternak Program Diploma Empat Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin
6.	Nota Kesepahaman Kerja Sama dalam Produksi Benih Kelapa	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya
7.	Tridharma Perguruan Tinggi dan Implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako

No.	Judul Kerja Sama	Nama Mitra Kerja Sama
8.	Penyebarluasan Informasi Iklim dan Sumber Daya Air di Sektor Pertanian	Perhimpunan Meteorologi Pertanian Indonesia (PERHIMPI)
9.	Pendidikan, Pelatihan, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	Fakultas Pertanian, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI)
10.	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala
11.	Penelitian, Pengembangan dan Peningkatan Produksi Pertanian di Sumatera Utara	Pemuda Tani Indonesia Sumatera Utara
12.	Penelitian, Pengembangan dan Peningkatan Produksi Pertanian di Sumatera Utara	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)
13.	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan, Peternakan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah
14.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, perkebunan dan Hortikultura	Litbangda Madina
15.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura di Kabupaten Toba	Pemkab Toba
16.	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mandailing Natal
17.	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pemkab Tapanuli Utara
18.	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pemkab Serdang Bedagai
19.	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Universitas Pembangunan Panca Budi
20.	Penelitian, Pengembangan dan Peningkatan Produksi Pertanian di Sumatera Utara	PT. Daun Agro Nusantara
21.	Penyusunan Penelitian Analisis Produksi Katekin Gambir di Kabupaten Pakpak Bharat	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pakpak Bharat
22.	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pemkab Mandailing Natal
23.	Pendidikan, Penelitian /Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi Mendukung Pembangunan Pertanian	Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
24.	Kerjasama Kelitbangan dan inovasi pertanian	Universitas Sumatera Utara
25.	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pemkab. Pakpak Bharat
26.	Kerjasama Bidang Pendidikan, penelitian dan Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi	Universitas Darma Agung

No.	Judul Kerja Sama	Nama Mitra Kerja Sama
27.	Penelitian , pengkajian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan Penerapan mendukung pembangunan pertanian spesifik lokasi di provinsi Sumatera Utara	Polbangtan Medan
28.	Penelitian, pengkajian dan diseminasi teknologi Pertanian tanaman pangan Hortikultura dan Peternakan	Pemerintahan Kabupaten Batu Bara
29.	Nota Kesepahaman dalam Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Lulusan SMK Negeri 1 Gunung Kijang Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Kebutuhan Sektor Industri dan Dunia Kerja	SMK Negeri 1 Gunung Kijang, Kompetensi Keahlian: Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
30.	Penempatan Mahasiswa Magang	Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Andalas
31.	Sinergi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Layanan dan Pendampingan Teknologi Pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
32.	Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan di Bidang Pertanian	Universitas Sriwijaya
33.	Pelaksanaan Layanan Pembinaan Kemandirian, Sarana Edukasi Asimilasi (SAE) dan sarana asimilasi kerja sosial dalam rangka pengembangan intelektual kemandirian dalam bidang teknologi tepat guna spesifik lokasi bagi warga binaan permasyarakatan kelas IIA Pangkalpinang	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung
34.	Perjanjian Kerja Sama Swakelola Bantuan Teknis berupa Pembuatan Demplot dan Pendampingan Teknologi Budidaya Cabai Produksi Lipat Ganda (Proliga) Pesantren Al Kirom – Pandeglang	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten
35.	Perjanjian Kerjasama Pembinaan Kemandirian (Pelatihan Keterampilan) Bidang Pertanian bagi warga binaan Lapas Kelas II A Serang	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang
36.	Pengkajian dan Diseminasi Teknologi Budidaya padi Ramah Lingkungan dengan Aplikasi Pupuk Hayati "POMI", Pestisida Nabati "PESTOR", Fungisida Nabati "PESNAB", dan Pembenah Tanah Organik Humic Acid "SAMHUMAT"	Asosiasi Bio-Agroinput Indonesia (ABI)
37.	Uji Efektivitas Multilokasi dan Multikomoditi Pupuk Bio Fosfat	PT PetroKimia Gresik
38.	Demfarm uji adaptasi dan inovasi teknologi jagung	PT Megah Utama Mentari (MUM)
39.	Kerja sama penelitian dan pengembangan pertanian di kabupaten Kotabaru	Pemda Kabupaten Kotabaru

No.	Judul Kerja Sama	Nama Mitra Kerja Sama
40.	Kerja sama penelitian dan pengembangan pertanian di kabupaten Tabalong	Pemda Kabupaten Tabalong
41.	Meningkatkan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan deseminasi inovasi teknologi	Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan alam (MIPA) universitas Lambung Mangkurat
42.	Nota Kesepakatan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan BPSIP Bali	Universitas Udayana
43.	Kegiatan Magang/Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Penelitian	Universitas Warmadewa
44.	Peningkatan Kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi	Fakultas Pertanian dan Bisnis, Universitas Mahasaraswati Denpasar
45.	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan SDM	Fakultas Peternakan, Universitas Udayana
46.	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	PSDKU Mataram - Universitas Mahasaraswati Denpasar
47.	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Universitas Mataram
48.	Pengembangan Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Magang/PKL Mahasiswa untuk Mendukung Kegiatan Merdeka Belajar	Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Universitas Mataram
49.	Jual Beli Beras Sorgum dan Tepung Sorgum di Kabupaten Kupang	Fasilitasi MOU antara Kelompok Tani Sahabat dengan CV. Beomofu Elba Jaya (merek Mama ANA)
50.	Jual Beli Beras Sorgum dan Tepung Sorgum di Kabupaten Kupang	Fasilitasi MOU antara Kelompok Tani Sahabat dengan PT. Beta Moringa Indonesia (MEREK LA MORINGA)
51.	Kerjasama di bidang Penelitian, Pengabdian masyarakat dan Magang Mahasiswa	Fakultas Ekonomi Universitas Teknologi Sulawesi Utara
52.	Kerjasama di bidang Penelitian, Pengabdian masyarakat dan Magang Mahasiswa	Fakultas Pertanian Universitas Teknologi Sulawesi Utara
53.	Kerjasama di bidang Penelitian, Pengabdian masyarakat dan Magang Mahasiswa	Fakultas Teknik Universitas Teknologi Sulawesi Utara
54.	Kerjasama di bidang Penelitian, Pengkajian Teknologi Pertanian, Pengabdian masyarakat dan Magang Mahasiswa *)	Fakultas Pertanian UNSRAT Manado
55.	Pengembangan Sumber Daya Manusia, Magang, dan Pendampingan Teknologi Spesifik Lokasi di Maluku Utara	Universitas Halmahera

No.	Judul Kerja Sama	Nama Mitra Kerja Sama
56.	Program Kerja Sama Penyelenggaraan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dalam bentuk Magang, Pendampingan/ Pembimbingan, dan Diseminasi Inovasi Teknologi Spesifik Lokasi	Universitas Halmahera
57.	Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi Mendukung Program Strategis Pemerintah Provinsi Maluku	Dinas Pertanian Provinsi Maluku
58.	Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi Mendukung Program Strategis Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah	Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tengah
59.	Pengkajian dan Diseminasi serta Pengembangan di Bidang Pertanian	Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura Ambon
60.	Pengkajian dan Diseminasi serta Pengembangan di Bidang Petanian	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), Universitas Pattimura Ambon
61.	Kerja Sama Penggunaan Lahan Pertanian di Kabupaten Keerom	PT Duta Indofarma Papua
62.	Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura

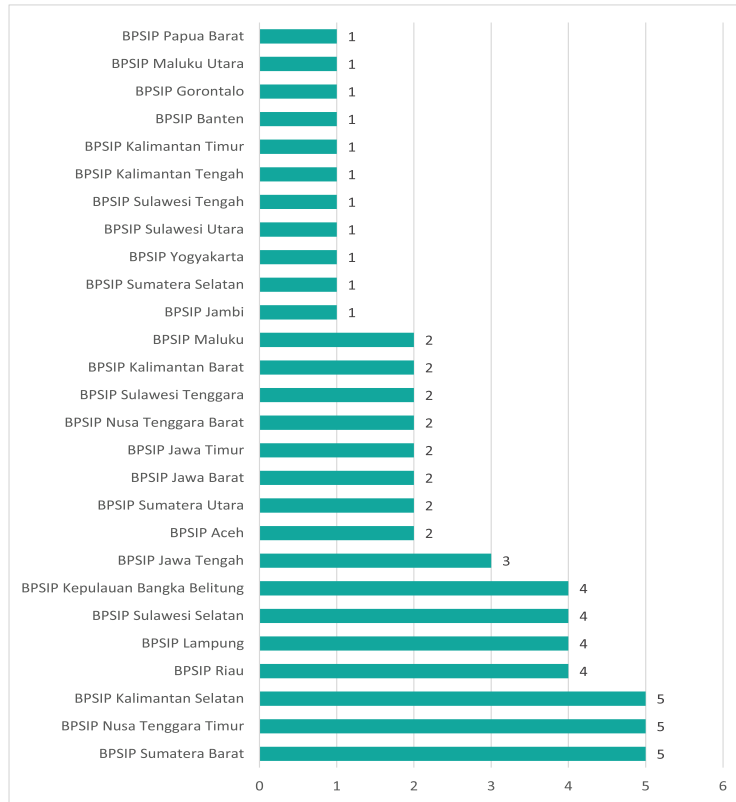
Sumber: data primer, diolah

8.4. Pemanfaatan Instalasi Pengujian dan Penerapan SIP

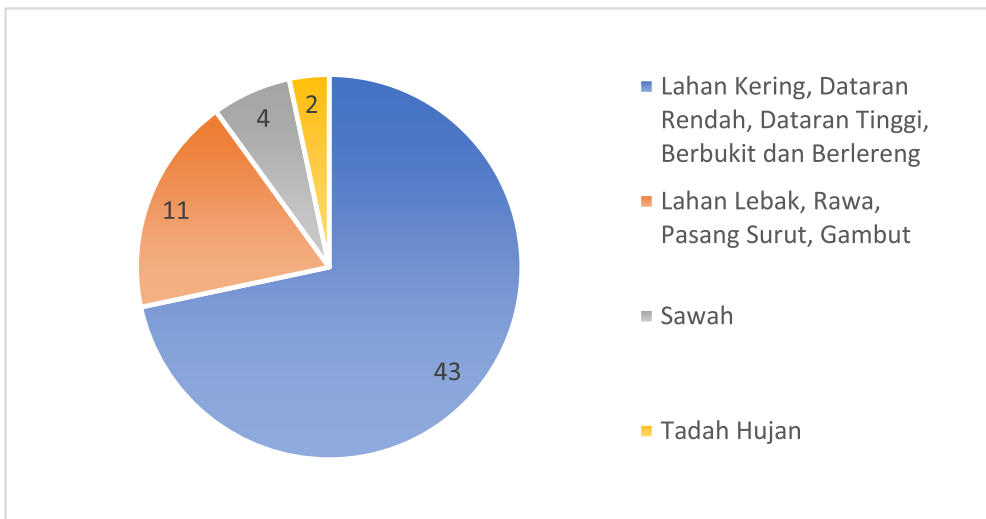
Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) merupakan lahan milik BPSIP yang digunakan untuk pengujian dan penerapan standar instrumen pertanian. Pemanfaatan IP2SIP merujuk pada PMK No 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara dan Keputusan Menteri Pertanian No 93/Kpts/KB.410/M/1/2019 tentang Optimalisasi Kebun Percobaan pada UPT lingkup Balitbangtan. Pemanfaatan IP2SIP selain sebagai kebun produksi benih sumber, juga menjadi wahana kerjasama antara BPSIP dengan mitra kerjasama, seperti instansi pemerintah lain, lembaga penelitian, perguruan tinggi, BUMN,

BUMD, swasta, koperasi, kelompok tani, dan LSM. Kerjasama pemanfaatan kebun meliputi kerjasama penelitian, perbenihan/perbibitan, plasma nutfah, serta pemanfaatan lahan lainnya seperti sewa, dan bagi hasil.

IP2SIP lingkup BBPSIP sebanyak 60 unit, yang tersebar pada beberapa agroekosistem. Sebanyak 43 IP2SIP berada di lahan kering, dataran rendah, dataran tinggi, berbukit maupun berlereng, 4 IP2SIP berada di lahan sawah, 11 IP2SIP berada di lahan lebak, rawa, lahan pasang surut, dan lahan gambut, serta 2 IP2SIP di lahan tadah hujan. Sebaran jumlah IP2SIP per BPSIP dapat di lihat pada Gambar 42, sedangkan sebaran IP2SIP berdasarkan agroekosistem dapat di lihat pada Gambar 43.



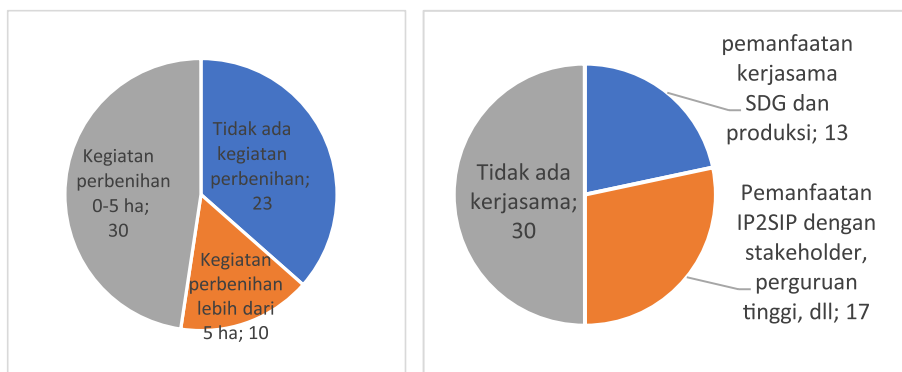
Gambar 42. Sebaran IP2SIP Lingkup BBPSIP



Gambar 43. Sebaran IP2SIP lingkup BBPSIP berdasarkan agroekosistem

Berdasarkan fungsinya, pemanfaatan IP2SIP dapat dibedakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu: kegiatan perbenihan, kerjasama pemanfaatan IP2SIP dengan *stakeholder*, dan

pemanfaatan untuk produksi, SDG dll. Sebaran IP2SIP Lingkup BBSIP Penerapan Berdasarkan Pemanfaatannya dapat di lihat pada Gambar 44.



Gambar 44. Sebaran IP2SIP Lingkup BBPSIP Berdasarkan Pemanfaatannya

Pengembangan IP2SIP dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang mempengaruhi kemajuan dan keberlanjutan IP2SIP. Beberapa permasalahan utama yang menyebabkan hambatan dalam pengembangan IP2SIP antara lain: (1) Kurangnya SDM yang terlatih; (2) Keterbatasan anggaran; (3) Alsintan yang tidak layak pakai; (4) Kurangnya akses terhadap pasar, teknologi, dan informasi bagi para pelaku IP2SIP; (5) Kurangnya suplai air; dan (6) Faktor keamanan masih kurang.

8.5. Pengembangan Laboratorium

Dalam melaksanakan fungsi koordinasi, BBPSIP melakukan pendampingan terhadap sarana pengujian lembaga sertifikasi yang dimiliki BPSIP. Sarana pengujian yang dimiliki BPSIP adalah laboratorium yang

tersebar diseluruh Indonesia. Pelaksanaan pengembangan, penerapan, dan penilaian kesesuaian standar instrumen pertanian sangat ditentukan oleh kapasitas laboratorium yang tersedia. Oleh karena itu, sejalan dengan program Kementerian Pertanian yaitu program nilai tambah dan daya saing industri, BSIP menetapkan tiga kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, salah satunya adalah pengembangan laboratorium. Laboratorium harus memiliki kompetensi untuk melakukan pengujian melalui akreditasi oleh lembaga yang kompeten yaitu Komite Akreditasi Nasional (KAN).

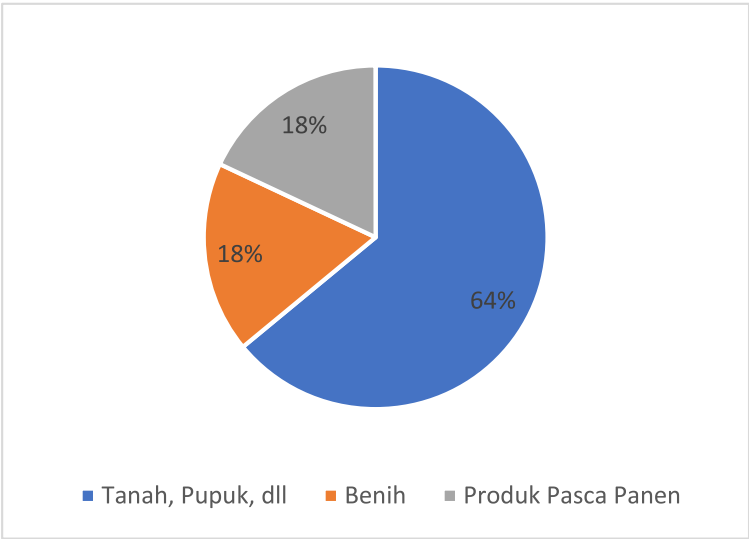
BBPSIP memiliki 33 laboratorium eksisting yang tersebar di seluruh Indonesia. Data eksisting laboratorium BPSIP lingkup BBPSIP Tahun 2023 tertuang dalam Tabel 32 berikut ini.

Tabel 32. Data Laboratorium Eksisting BPSIP Tahun 2023

No.	Nama UPT	Jenis Layanan Laboratorium	Nomor Akreditasi
1.	BPSIP Pabar	Lab. Pengujian Pasca Panen	LP-1345-IDN
2.	BPSIP Jawa Barat	Lab. Pengujian Mutu Benih Padi dan Kedelai	LP-982-IDN
3.	BPSIP NTB	Lab. Pengujian Kimia Tanah	LP-394-IDN
4.	BPSIP Lampung	Lab. Pengujian Kimia Tanah	LP-1110-IDN
5.	BPSIP Bengkulu	Lab. Pengujian Kimia Tanah	LP-1106-IDN
6.	BPSIP Jateng	Lab. Pengujian Kimia Tanah	LP-936-IDN
7.	BPSIP Sumut	Lab. Pengujian Kimia Tanah, Tanaman, Pupuk dan Air	LP-863-IDN
8.	BPSIP DIY	Lab. Pengujian Kimia dan Fisika Tanah, Tanaman, Pupuk dan Air	LP-1751-IDN
9.	BPSIP Kaltim	Lab. Pengujian Tanah	LP-610-IDN
10.	BPSIP Aceh	Lab. Pengujian Tanah, Pupuk Organik, dan Tanaman	Belum
11.	BPSIP Sumbar	Lab. Pengujian Tanah	Belum
12.	BPSIP Sumsel	Lab. Pengujian Kimia Tanah dan Mutu Beras	Belum
13.	BPSI Riau	Lab. Pengujian Kimia Tanah	Belum
14.	BPSIP Kepri	Lab. Pengujian Pasca Panen	Belum
15.	BPSIP Jambi	Lab. Pengujian Tanah	Belum
16.	BPSIP Banten	Lab. Pengujian Mutu Benih	Belum
17.	BPSIP DKI Jakarta	Lab. Pengujian Mutu Benih	Belum
18.	BPSIP Jawa Timur	Lab. Pengujian Tanah	Belum
19.	BPSIP Kalsel	Lab. Pengujian	Belum
20.	BPSIP Kalbar	Lab. Pengujian	Belum
21.	BPSIP Kalteng	Lab. Pengujian	Belum
22.	BPSIP Sulteng	Lab. Pengujian Kimia Tanah	Belum
23.	BPSIP Gorontalo	Lab. Pengujian Kimia Tanah	Belum
24.	BPSIP Sulut	Lab. Pengujian Mutu Benih	Belum
25.	BPSIP Sultra	Lab. Pengujian Tanah dan Pupuk	Belum
26.	BPSIP Sulbar	Lab. Pengujian Pasca Panen	Belum
27.	BPSIP Sulsel	Lab. Pengujian Kimia Tanah, Pupuk, Tanaman, dan Air	Belum
28.	BPSIP NTT	Lab. Pengujian Kimia Tanah	Belum
29.	BPSIP Maluku	Lab. Pengujian Kimia Tanah	Belum
30.	BPSIP Maluku	Lab. Pengujian Pasca Panen	Belum
31.	BPSIP Papua	Lab. Pengujian Tanah	Belum
32.	BSIP Babel	Belum punya laboratorium	Belum
33.	BSIP Bali	Belum punya laboratorium	Belum

Dari Tabel 32 terlihat bahwa sebanyak 22 laboratorium BPSIP (66,7%) belum terstandar/terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017. Hanya 9 laboratorium BPSIP (27,3%) sudah terstandar/ terakreditasi, dan terdapat 2 BPSIP (6%) belum memiliki laboratorium yaitu BPSIP Bali dan BPSIP Bangka Belitung.

Berdasarkan jenis analisis yang dilakukan, laboratorium di lingkup BBPSIP terbagi menjadi laboratorium tanah dan pupuk (64%), laboratorium benih (18%), dan laboratorium pasca panen (18%) (Gambar 45).



Gambar 45. Jenis Laboratorium lingkup BBPSIP

Upaya pengembangan Laboratorium dilakukan melalui:

a. Peningkatan Kapasitas SDM

Peningkatan kapasitas SDM laboratorium BPSIP Lingkup BBPSIP tahun 2023 yang telah dilakukan

diantaranya pelatihan Petugas Pengambil Contoh (PPC) dan Auditor Internal. Jumlah peserta, waktu dan tempat pelaksanaan, dan penyelenggara pelatihan dapat dilihat pada Tabel 33 berikut.

Tabel 33. Peningkatan Kapasitas SDM Laboratorium Lingkup BPPSIP Tahun 2023

No.	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
1.	Petugas Pengambil Contoh (PPC)	58	Semarang, 11-13 Des. 2023	Sekretariat BSIP
2.	Auditor Internal	14	Jogyakarta Desember 2023	Sekretariat BSIP

b. Kerja Sama Laboratorium Lingkup BSIP

Dari hasil identifikasi dan verifikasi di lapangan telah terjadi jejaring kerja sama antara laboratorium BPSIP dengan laboratorium lainnya lingkup BSIP. Salah satu contoh bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh laboratorium BPSIP Jawa Barat adalah uji banding hasil analisis mutu

benih dengan Laboratorium Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Padi Sukamandi. Contoh bentuk kerjasama lainnya adalah pelatihan staf teknis BPSIP Banten dengan laboratorium Pengujian Mutu Beras dan Pascapanen Serealia Karawang. Data kerja sama tersebut dapat dilihat dengan detail pada Tabel 34 berikut.

Tabel 34. Kerja Sama Laboratorium BPSIP

No	Nama BPSIP	Bentuk Kerjasama	Nama Mitra Kerjasama	Tahun Pelaksanaan
1	BPSIP Kalimantan Barat	Kalibrasi Peralatan Laboratorium	Balai Standardisasi Perindustrian Pontianak	2023
2	BPSIP Banten	Pelatihan Teknis Uji Mutu Benih	BBPSI Pascapanen Karawang	2023
3	BPSIP Jawa Timur	Uji Banding Hasil Analisis Sampel Uji Profisiensi	BPSI Aneka Kacang BPSI Tanah dan Pupuk Bogor	2023 2023
4	BPSIP Sulsel	Kalibrasi Peralatan Lab. Uji Profisiensi Layanan Uji Mutu Pupuk Organik	BPSMB Makassar BPSI Tanah dan Pupuk Bogor Perusahaan Swasta Produsen Pupuk	2023 2023 2023
5	BPSIP Jawa Barat	Uji Banding Hasil Analisis Mutu Benih Padi	BBPSI Padi Sukamandi	2022
6	BPSIP Papua Barat	Pelatihan Persiapan LSPro	BSN	2023

c. Peluang Pemanfaatan Laboratorium oleh Pihak Lain

Peluang pemanfaatan laboratorium terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh pihak lain di daerah sangat berpeluang besar. Sebagai contoh saat ini laboratorium BPSIP Papua Barat sebagai laboratorium pasca panen hanya bisa melakukan analisis kadar abu, kadar air, lemak dan protein. Sementara ada pihak lain (perusahaan

coklat PT Cokran, pihak Kepolisian Daerah Papua Barat) ingin melakukan pengujian bahan yang berbahaya yang terkandung dalam buah coklat dan bahan berbahaya lain yang ada dalam beras yang beredar di masyarakat. Kaitanya dengan hal tersebut diatas laboratorium BPSIP segera melakukan ruang lingkup analisis untuk menjawab kebutuhan tersebut. Pemanfaatan jasa laboratorium BPSIP dapat dilihat pada Tabel 35.

Tabel 35. Pemanfaatan Jasa Laboratorium BPSIP

No.	Nama BPSIP	Jenis Jasa	Pengguna Jasa	Tahun
1.	BPSIP Sulsel	Uji Pupuk	Produsen Pupuk	2023
		Uji Tanah dan Pupuk	Dinas Pertanian Prov. Sulsel	2023
		Uji Pupuk Organik	Petani	2023
		Uji Tanah dan Pupuk	Mahasiswa Tugas Akhir	2023
2.	BPSIP Papua Barat	Uji Analisis Proksimat	Dosen, Mahasiswa UNIPA,	2023
3.	BPSIP Jawa Timur	Uji Tanah dan Pupuk	Perusahaan Swasta (PT. Sang Hyang Sri, PT. Cheil Jedang, PT. Agri Makmur Pertiwi, Gresik Gold, B, CV Indo Pratama) Dinas Pertanian, Peneliti, Dosen, Mahasiswa dan Petani	2000-2023

- d. Persiapan akreditasi bagi laboratorium yang dibekukan akreditasinya

Terdapat lima laboratorium lingkup BPSIP yang sebelumnya telah mendapatkan akreditasi namun dibekukan, yaitu laboratorium BPSIP Banten, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

- e. Perencanaan Penambahan Ruang Lingkup Analisis

Penambahan ruang lingkup analisis perlu dilakukan sesuai kebutuhan pengguna di daerah masing-masing terutama bagi daerah yang mempunyai produk yang berpotensi ekspor bahkan sudah rutin melakukan ekspor. Sebagai contoh Pemerintah Daerah Maluku saat ini sudah sering melakukan ekspor buah pala ke luar

negeri. Salah satu persyaratan ekspor tersebut harus melakukan pengujian terlebih dahulu. Saat ini pengujian buah pala dilakukan di Surabaya dikarenakan lab. BPSIP atau lab lain di daerah Maluku belum mempunyai lab yang terstandar/terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017. Selain itu arahan Plt. Kepala BSIP pada acara Rakoord. Laboratorium Mutu Beras dan Pascapanen Serealiala beberapa waktu lalu di Karawang memerintahkan Sekretaris Badan untuk melakukan perencanaan penambahan ruang lingkup analisis mutu beras dan benih terutama bagi daerah pemasok beras nasional yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Rencana Penambahan Ruang Lingkup Analisis Laboratorium BPSIP dapat dilihat pada Tabel 36 berikut.

Tabel 36. Rencana Penambahan Ruang Lingkup Analisis Laboratorium BPSIP

No.	Nama BPSIP	Jenis Ruang Lingkup	Alasan Penambahan Ruang Lingkup	Tahun
1.	BPSIP Banten	Pengujian Mutu Beras	Menjawab Permintaan Pengguna	2023
2.	BSIP Papua Barat	Pengujian Mutu Produk Pertanian	Menjawab Permintaan Pengguna/ Perusahaan Eksportir Coklat dan Pala	2024
3.	BSIP Jatim	Pengujian Kadar Air, Kadar Abu, Protein dan Lemak	Menjawab Permintaan Perusahaan Swasta dan UMKM	2024

f. Pengembangan Laboratorium Terstandar Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) ISO/IEC 17065:2012

Pengembangan Laboratorium ISO/IEC 17025:2017 Menjadi LSPro SNI ISO/IEC

17065:2012 dianggap berpotensi untuk beberapa laboratorium. Laboratorium yang telah berproses dan berpotensi menjadi LSPro dapat dilihat pada Tabel 37.

Tabel 37. Pengembangan Laboratorium Menuju LSPro

No.	Nama BPSIP	Ruang Lingkup LSPro	Tahapan yang sudah Dilaksanakan	Tahun Pengajuan
1.	BPSIP Papua Barat	Mutu produk kopi, pala dan kakao	Sudah submit/ pendaftaran	2023
2.	BPSIP Sulsel		Baru Tahapan Koordinasi dengan BSN	2024

BPSIP Papua Barat saat ini sedang berproses menuju LSPro dan telah dibuatkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Standardisasi Nasional

tentang pelaksanaan bimtek terhadap SNI ISO/IEC 17065:2012 sesuai dengan tahapan seperti tertuang pada Tabel 38 berikut.

Tabel 38. Tahapan Pelaksanaan Bimtek SNI ISO/IEC 17065:2012

Tahap	Kegiatan	Durasi	Pelaksanaan
I	Bimbingan Teknis Pemahaman SNI ISO/IEC17065:2012 dan SNI ISO/IEC 17067	2 hari	Online
II	Bimbingan Teknis Penyusunan dokumen sistem mutu: ▪ Pengembangan dokumen mutu (Manual, Prosedur, Form serta dokumen pendukung yang diperlukan. ▪ Menyusun dokumen skema sertifikasi	3 hari	Online

Tahap	Kegiatan	Durasi	Pelaksanaan
III	- Review dan penyempurnaan dokumen mutu. - Persiapan implementasi dokumen sistem mutu.	3 hari	Online atau offline
IV	Pelatihan Audit internal SNI ISO/IEC 19011:2018	3 hari	Online atau offline
V	Melakukan Pra Audit dan Kelayakan kesiapan akreditasi oleh tim bimtek	2 hari	Online atau Di LPK (offline)

Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala yang menghambat sehingga laboratorium BPSIP belum bisa terstandar/terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017. Diantaranya masalah SDM, sarana dan prasarana laboratorium, serta anggaran.

Transformasi kelembagaan Badan Litbang Pertanian menjadi BSIP menyisakan beberapa persoalan yang harus segera diatasi. Berdasarkan laporan pengelola laboratorium, beberapa staf pengelola laboratorium banyak yang mutasi ke BRIN. Selain itu beberapa SDM pengelola laboratorium masih banyak yang belum mengikuti pelatihan yang dipersyaratkan oleh Komisi Akreditasi Nasional. Beberapa BBPSIP belum memiliki SDM yang sesuai dengan kebutuhan laboratorium, contohnya BPSIP Kalimantan Barat belum memiliki tenaga analis yang sangat dibutuhkan dalam operasional laboratorium. Solusi yang ditawarkan segera melakukan rekrutmen tenaga baru melalui pemetaan jabatan. Selain itu bisa juga dengan Relokasi SDM dari UK/UPT yang berlebih kepada BPSIP yang belum memiliki SDM yang dibutuhkan.

Selain SDM pengelola laboratorium, sarana dan prasarana juga menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap ruang

lingkup operasional laboratorium, saat ini masih banyak laboratorium yang belum lengkap peralatannya sesuai ruang lingkup analisisnya, laboratorium juga belum rutin melakukan kalibrasi alat oleh lembaga yang kompeten. Pada Tahun 2023 tidak teralokasi anggaran untuk pendaftaran akreditasi, yang ada anggaran belanja modal untuk pembelian peralatan laboratorium, namun anggaran belanja modal inipun tidak terserap sesuai perencanaan awal karena terkendala dengan persyaratan TKDN, yaitu ijin pembelian dan penggunaan alat tersebut surat ijinnya tidak turun dari Menteri Pertanian.

Anggaran laboratorium belum dialokasikan secara proporsional, beberapa kasus laboratorium BBPSIP yang dibekukan akreditasinya salah satunya dikarenakan pihak Komite Akreditasi Nasional (KAN) tidak bisa melakukan surveilen karena tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan audit eksternal yang rutin dilaksanakan.

Pada akhir tahun 2023, BPSIP Sulsel telah melakukan pendaftaran reakreditasi dan saat ini dalam proses Verifikasi Komite Akreditasi Nasional (KAN), sehingga diharapkan segera terdapat penambahan jumlah laboratorium menuju akreditasi SNI-ISO/IEC 17025:2017, yang semula berjumlah 9 menjadi 10 laboratorium.

Terdapat 1 Laboratorium Terakreditasi SNI-ISO/IEC 17025:2017 menuju Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro) yaitu BPSIP Papua Barat. Tahapan yang sudah dilaksanakan adalah pemenuhan kompetensi SDM LSPPro SNI ISO/IEC 17065:2012; SNI ISO/IEC 17067: 2013; SNI ISO/IEC 9001:2015; SNI ISO/IEC 19011:2018; PPC (SNI 19-0429-1989 & 19-0428-1998); HACCP, CPPOB, Implementasi Dokumen Sistem Mutu, yang terdiri dari Audit Internal, Audit Klien (Lembaga yg akan disertifikasi), Tinjauan Manajemen, Pengajuan Akreditasi LSPPro

BPSIP Papua Barat ke KAN melalui aplikasi KANMIS.

8.6. Kerjasama Kemitraan

Tahun 2023 BBPSIP mendapatkan kegiatan kemitraan sebanyak 6 kegiatan (Tabel 39), sedangkan kegiatan kemitraan lingkup BBPSIP sebanyak 22 kegiatan (Tabel 40). Kegiatan kemitraan ini secara umum bertujuan untuk mensosialisasikan standar instrument pertanian kepada *stakeholders*.

Tabel 39. Kegiatan kemitraan BBPSIP TA 2023

No	Judul
1.	Pengembangan Media Penyuluhan Mendukung Penerapan Pertanian Terstandar
2.	Peningkatan Mutu SDM Melalui Tata Kelola Kelembagaan Standardisasi
3.	Bimbingan Teknis Standardisasi Sistem Penggunaan Beras Inpari IR <i>Nutrizinc</i> Untuk Pencegahan <i>Stunting</i>
4.	Workshop Peningkatan Kualitas Kompetensi Sumberdaya Manusia dan Standar Pelayanan Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
5.	Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Standar Instrumen (<i>Good Agricultural Practices</i> dan <i>Good Handling Practices</i>) Untuk Komoditas Kopi Arabika Mendukung Peningkatan Mutu dan Daya Saing Ekspor Kopi di Sulawesi Selatan
6.	Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang Terstandar untuk Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga dan Mewujudkan Pola Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)

Tabel 40. Kegiatan Kemitraan Lingkup BBPSIP

No	Judul	Instansi
1.	Pendampingan Teknologi Budidaya Ternak Kambing di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur	BPSIP Nusa Tenggara Timur
2.	Bimbingan Teknis Penerapan Standar Budidaya Sorgum di Nusa Tenggara Timur	BPSIP Nusa Tenggara Timur
3.	Bimbingan Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan Terstandar di Provinsi Sulawesi Barat	BPSIP Sulawesi Barat
4.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM, Petani dan Penyuluh Pertanian dalam Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Sulawesi Barat	BPSIP Sulawesi Barat
5.	Diseminasi Penerapan Produksi Benih Varietas Unggul Baru (VUB) Kedelai Toleran Kekeringan Terstandar di Sulawesi Selatan	BPSIP Sulawesi Selatan

No	Judul	Instansi
6.	Bimbingan Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan Terstandar di Sulawesi Selatan	BPSIP Sulawesi Selatan
7.	Bimbingan Teknis pemanfaatan Urban Farming dengan sistem pertanian terstandar di Sulawesi Selatan	BPSIP Sulawesi Selatan
8.	Produksi dan Diseminasi Benih Padi Terstandar Mendukung Swasembada Pangan di Sulawesi Selatan	BPSIP Sulawesi Selatan
9.	Bimbingan Teknis Perbenihan Padi Terstandar di Sulawesi Selatan	BPSIP Sulawesi Selatan
10.	Bimbingan Teknis Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari Dengan System Pertanian Terstandar di Sulawesi Selatan	BPSIP Sulawesi Selatan
11.	Penerapan Standar Pelepasan Varietas DXP Kelapa Sawit Hasil Persilangan Sumberdaya Genetik Kebun Percobaan Sitiung	BPSIP Sumatera Barat
12.	Bimbingan Teknis Perbenihan Padi Gogo Terstandar sebagai Upaya Antisipasi Dampak El Nino dan Kekeringan di Sumatera Barat	BPSIP Sumatera Barat
13.	Sistem Integrasi Sapi-Kelapa Sawit (SISKA) Terstandar di Kalimantan Selatan	BPSIP Kalimantan Selatan
14.	Pembuatan Kebun Hijauan Pakan Ternak (HPT) Terstandar di Kalimantan Selatan	BPSIP Kalimantan Selatan
15.	Pengembangan Tanaman Hortikultura dan Hijauan Pakan Ternak Terstandar Spesifik Lokasi di Kalimantan Tengah	BPSIP Kalimantan Tengah
16.	Pendampingan Penerapan Budidaya Jagung Mendukung Food Estate di Kabupaten Gunung Mas	BPSIP Kalimantan Tengah
17.	Bimbingan Teknis Penerapan GAP Budidaya Tanaman Pangan (Padi) Terstandar di Provinsi Bengkulu	BPSIP Bengkulu
18.	Bimbingan Teknis Budidaya Manggis Terstandar di Kabupaten Tasikmalaya, Subang dan Purwakarta	BPSIP Jawa Barat
19.	Pengendalian Lalat Buah Skala Luas Dan Pendampingan Kelembagaan Penerapan GAP/GHP Pada Kawasan Salak Pondoh Mendukung Peningkatan Ekspor	BPSIP Yogyakarta
20.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh Menghadapi El Nino untuk Mewujudkan Kemandirian Benih Tanaman Pangan di Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara	BPSIP Kalimantan Timur
21.	Bimbingan Teknis Penyiapan Pangan Berkelanjutan Antisipasi El Nino di Kalimantan Timur	BPSIP Kalimantan Timur
22.	Akreditasi LSP Pro BSIP Papua Barat (SNI ISO/IEC 17065 2012)	BPSIP Papua Barat

Gambaran beberapa kegiatan kemitraan BBPSIP adalah sebagai berikut:

8.6.1. Peningkatan Mutu SDM Melalui Tata Kelola Kelembagaan Standardisasi

Sumber daya manusia menjadi modal penting dalam memajukan sektor pertanian di Indonesia. Faktor penggerak terbesar yang akan berperan secara langsung dalam kegiatan pertanian bukan hanya sarana produksi melainkan SDM pertaniannya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pertanian terus dilakukan oleh pemangku kebijakan untuk memajukan sektor pertanian.

Tuntutan pembinaan mutu SDM merupakan langkah antisipatif dalam menghadapi persaingan global, di mana dalam kondisi tersebut akan mendorong semakin tingginya mobilitas tenaga kerja sektor pertanian. Untuk itu dibutuhkan tata kelola peningkatan SDM pertanian itu sendiri yang memenuhi standar kompetensi.

Tujuan kegiatan adalah melakukan inisiasi pembentukan tata kelola kelembagaan standardisasi mutu SDM pertanian. Keluaran dari kegiatan adalah terbentuknya tata kelola kelembagaan standarisasi mutu SDM Pertanian yang diwujudkan dalam dokumen persyaratan umum pembentukan lembaga penilaian kesesuaian. Ruang lingkup kegiatan meliputi persiapan dan pembentukan kelembagaan standardisasi SDM sampai dengan dokumen usulan lengkap dan siap dilakukan proses akreditasi.

Pelaksanaan kegiatan meliputi :

1. Pertemuan dan konsolidasi internal: bertujuan untuk memperoleh dukungan manajemen sebagai langkah

awal menyusun dan membentuk kelembagaan sertifikasi person bidang pertanian

2. Desk study : bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan dan literasi lainnya untuk menyusun konsep/ rancangan pembentukan lembaga yang sesuai dengan kebutuhan serta mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan
3. Studi banding bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mengelola kelembagaan dari lembaga sejenis.
4. Bimbingan teknis pemahaman SNI ISO/IEC 17024 : 2012 bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kesamaan visi bagi calon pengelola kelembagaan dan manajemen
5. Bimbingan teknis penyusunan dokumen sistem mutu bertujuan untuk memberikan pendampingan bagi calon pengelola dan manajemen dalam menerjemahkan panduan SNI ISO/IEC 17024 : 2012 ke dalam dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk mendirikan lembaga sertifikasi.
6. Workshop penyusunan dokumen sistem mutu: a) pengembangan dokumen mutu (manual, prosedur, form serta dokumen pendukung yang diperlukan), b) menyusun dokumen skema sertifikasi
7. a) Penelaahan dan penyempurnaan dokumen mutu;
b) Persiapan implementasi dokumen sistem mutu pendampingan penyusunan dokumen.

Tata Kelola SDM yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Penilaian Kesesuaian mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Penilaian Kesesuaian. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi persyaratan acuan. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Penilaian Kesesuaian terhadap personal dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Person (LSP). Pembentukan LSP mengacu pada SNI ISO/IEC 17024:2012 yang berisi persyaratan umum, dokumen pendukung pembentukan, serta akreditasi LSP. Upaya untuk mewujudkan LSP yang terakreditasi ditempuh beberapa tahapan kegiatan.

Tahapan kegiatan meliputi Bimbingan Teknis Pemahaman SNI ISO/IEC 17024:2012 oleh Tim BSN yang diikuti oleh sedikitnya 40 orang karyawan/karyawati BBPSIP perwakilan dari Panitia Pembentuk LPK, perwakilan dari Tim Kerja dan fungsional. Hasil dari Bimtek tersebut

adalah peningkatan pengetahuan tentang sertifikasi person, akreditasi, penilaian kesesuaian dan persyaratan umum mendirikan LPK. Tahap selanjutnya adalah merancang skema, ruang lingkup, calon asesor dan dokumen persyaratan lainnya. Skema yang diajukan adalah Petugas Pengambil Contoh komoditas pupuk dan pestisida. Dokumentasi pelaksanaan Bimtek dapat di lihat pada Gambar 46.

Hasil bimbingan teknis dan pendampingan yang dilakukan oleh Tim BSN adalah tersusunnya persyaratan umum mendirikan LPK yang terdiri atas dokumen kebijakan mutu, manual mutu, prosedur dan formulir. Sampai dengan akhir Desember 2023 telah berhasil disusun persyaratan dimaksud. Tahap selanjutnya adalah review dokumen oleh tim fasilitator.

Kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah waktu dan tenaga teknis yang terlibat dalam penyusunan dokumen system mutu terbatas sehingga target penyelesaian menjadi mundur. Selain itu, terdapat kesulitan mengatur jadwal antara fasilitator dengan tim pelaksana dalam evaluasi dokumen.



Gambar 46. Bimtek Penyusunan Dokumen Sistem Mutu SNI/IEC 17024:2012

8.6.2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Standar Instrumen (*Good Agricultural Practices* dan *Good Handling Practices*) Untuk Komoditas Kopi Arabika Mendukung Peningkatan Mutu dan Daya Saing Ekspor Kopi di Sulawesi Selatan

Penerapan standar instrumen pertanian *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP) Perkebunan merupakan upaya mempersiapkan produk Perkebunan Indonesia untuk siap menghadapi persaingan globalisasi perdagangan dunia seiring dengan meningkatnya pangsa pasar. Kopi merupakan salah satu kelompok komoditas Perkebunan yang memiliki pasar ekspor potensial dengan pangsa pasar yang semakin berkembang. Pengembangan kopi untuk ekspor ditentukan oleh proses produksi yang baik dan penanganan hasil yang memenuhi standar.

Kopi merupakan salah satu kelompok komoditas Perkebunan yang memiliki pasar ekspor potensial dengan pangsa pasar yang semakin berkembang. Pengembangan kopi untuk ekspor ditentukan oleh proses produksi yang baik dan penanganan hasil yang memenuhi standar. Sebagai salah satu Negara produsen dan eksportir terbesar ke empat di dunia dengan share produksi sebesar 7,13 % dan share ekspor sebesar 6,40% terhadap total dunia (Widaningsih, 2022). Indonesia rata-rata hanya menghasilkan 0,76 ton/ha - 0,8 ton/ha (Anonim, 2020a). Sementara produktivitas di Sulawesi Selatan baru mencapai rata-rata 0,604 ton/ha.

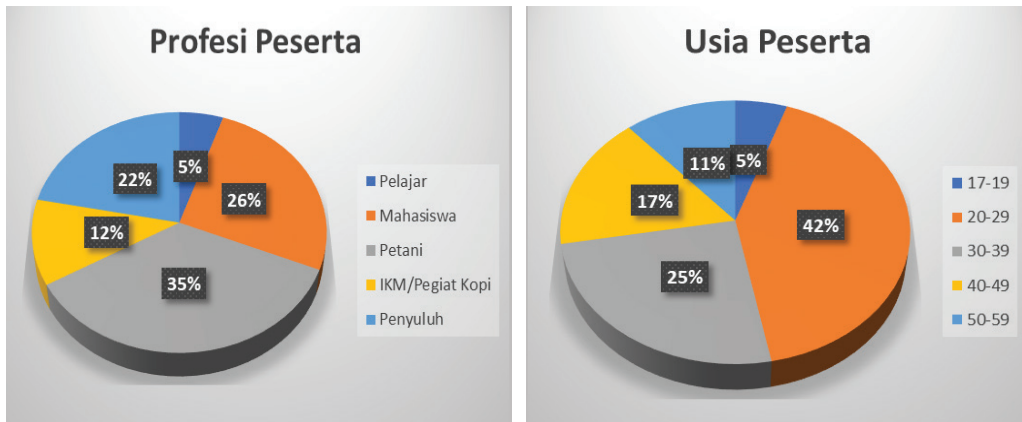
Komoditi kopi telah dikenal oleh penduduk Sulawesi Selatan sejak abad ke-17. Tetapi komersialisasi komoditi kopi baru dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan melakukan pemerataan penanaman kopi di daerah pegunungan di Wilayah Pemerintahan Langsung (*Gouvernements Landen*) sejak tahun 1860. Kopi tersebut dibudidayakan dan diproduksi di *Bergregentschappen* di Distrik Utara, Bantaeng di Distrik Selatan, Bulukumba dan Sinjai di Distrik Timur, dan Pulau Selayar. Luas perkebunan kopi di Sulsel saat ini sekitar 12,5 persen dari luas kopi Nasional dengan Produksi kopi robusta 9.804 ton dan kopi arabika 21.994 ton. Namun demikian, produktivitas kopi arabika di daerah ini masih rendah dibandingkan produktivitas secara nasional.

Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Standar Instrumen (*Good Agricultural Practices* dan *Good Handling Practices*) Untuk Komoditas Kopi Arabika Mendukung Peningkatan Mutu Dan Daya Saing Ekspor Kopi di Sulawesi Selatan Dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan pada 15-16 November 2023, bertujuan untuk: a. Mendiseminasikan standar instrumen pertanian GAP dan GHP pada komoditas kopi untuk mendukung ekspor kopi di Sulawesi Selatan; b. Meningkatkan kompetensi SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) dalam penerapan GAP dan GHP sesuai standar terhadap 250 peserta (petani, penyuluh, dan *stakeholder* lainnya) dalam pengelolaan usahatani di Kawasan pengembangan kopi Sulawesi Selatan; dan c. Menjaring umpan balik petani dan pelaku usaha terhadap informasi penerapan standar instrumen Pertanian

GAP dan GHP komoditas kopi yang di diseminasikan.

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu daerah penghasil kopi utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Ditanam di dataran tinggi, di hutan-hutan di kaki gunung Moncong Lompobatang, kopi Bantaeng menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian hutan. Kopi Bantaeng telah dikenal oleh penduduk di abad ke XVII. Tetapi komersialisasi komoditi kopi baru dilakukan oleh VOC dengan melakukan penanaman kopi di daerah pegunungan di wilayah Hindia Belanda sekitar tahun 1860 (abad XIX) di Distrik Utara di Toraja dan Enrekang dan di Distrik Selatan yaitu Zuiderdistricten Bantaeng, Oosterdistricten Bulukumba dan lain-lain. Pada era setelah kemerdekaan kawasan di kecamatan Uluere, Tompobulu dan Eremerasa terkenal sebagai daerah penghasil Kopi Merk (sebutan produk kopi robusta) dan kopi Bonthain (kopi arabika).

Demografi peserta, berdasarkan usia antara 17-59 tahun, tingkat pendidikan lebih rendah dari SLTA-Sarjana dengan latar profesi petani, pelajar, mahasiswa, penyuluh, dan pelaku usaha (Gambar 47). Tingkat keberhasilan diukur berdasarkan hasil pre test dan post tes menunjukkan terjadi peningkatan pemahaman dan pengetahuan GAP dan GHP kopi 54%. Bimtek dianggap peserta sudah tepat sasaran dan tingkat kepuasan mencapai 3,58 dengan nilai IKM konversi 89,60. Mutu layanan A dan Kinerja Unit pelayanan sangat baik. Perkiraan dampak hasil kegiatan terjadi peningkatan kesehatan tanaman, peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas produk dan meningkatnya produk standar kualitas ekspor serta peningkatan pendapatan petani dan pelaku usaha. Dokumentasi pelaksanaan bimtek dapat dilihat pada Gambar 48 dan 49.



Gambar 47. Sebaran profesi dan usia Peserta



Gambar 48. Pembukaan Bimtek dan Praktikum GAP Kopi Arabika di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan



Gambar 49. Pembukaan Bimtek dan Praktikum GHP Kopi Arabika di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan

Kualitas unsur pelayanan publik BSIP Penerapan dipersepsikan Baik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat 89,6 dan dengan mutu pelayanan Sangat Baik (A). Selanjutnya salah satu umpan balik dari peserta yang menjadi perhatian adalah diharapkan adanya bantuan benih dan pengawalan lebih lanjut untuk berhasilnya penerapan GAP di lokasi budidaya dan GHP pada pasca panennya.

8.6.3. Bimbingan Teknis Implementasi Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang Terstandar untuk Meningkatkan pendapatan rumah tangga dan Mewujudkan Pola Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi Seimbang Dan Aman (B2SA)

Pemanfaatan pekarangan rumah bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pangan,

obat, serta rasa estetika, dapat dilakukan secara efektif dari penataan tanaman yang saling mendukung. Meskipun pemanfaatan lahan pekarangan hanya dilakukan sebagai pekerjaan sampingan, pekarangan berperan dalam mendukung kehidupan sosial ekonomi rumah tangga, khususnya rumah tangga petani. Beberapa penelitian menemukan pengaruh positif program KRPL terhadap pendapatan rumah tangga dan peningkatan asupan gizi keluarga. Melalui pendampingan, outcome dari pengembangan P2L akan berdampak meningkatkan pada pola konsumsi sayuran dan buah pada masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) yang pada akhirnya meningkatkan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penderasan informasi dan pendampingan

penerapan standar instrumen pertanian implementasi pekarangan pangan Lestari.

Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang Terstandar untuk Meningkatkan pendapatan rumah tangga dan Mewujudkan Pola Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi Seimbang Dan Aman (B2SA) bertujuan : 1) Mendiseminasikan standar instrumen pertanian P2L pada kelompok Masyarakat; 2) Meningkatkan kompetensi SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) dalam penerapan P2L sesuai standar terhadap 500 peserta (petani, KWT, Patenai Milenial, dan *stakeholder* lainnya) dalam pengelolaan P2L di Kawasan masyarakat perdesaan maupun perkotaan ; dan 3) Menjaring umpan balik petani dan pelaku usaha terhadap informasi penerapan standar instrumen Pertanian P2L yang didiseminasikan.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini diperoleh luaran antara lain: a) Terdiseminasinya standar instrumen pertanian P2L pada kelompok Masyarakat di Sulawesi Selatan; b) Meningkatnya kompetensi SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) sebanyak 500 peserta (petani, KWT, Patenai Milenial, dan *stakeholder* lainnya) dalam pengelolaan P2L di Kawasan masyarakat perdesaan maupun perkotaan di Sulawesi Selatan. c)

Terjaringnya beberapa informasi dari petani dan pelaku usaha terkait penerapan standar instrumen Pertanian P2L dalam Kawasan pengembangan.

Secara umum semua pelaksanaan kegiatan di 3 lokasi, yaitu: Maros, Pangkajene dan Kepulauan, dan Pare-Pare, berjalan lancar. Berdasarkan hasil pre dan post-test, peserta bimtek mendapatkan tambahan pengetahuan dan keterampilan dan terdapat peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Selain itu, evaluasi dengan metode Dartboard ketahu bahwa peserta merasakan kegiatan bimtek sudah tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan, atau dengan kata lain bimtek tersebut mampu menjawab kebutuhan petani. Secara umum kualitas unsur pelayanan publik BBPSIP dipersepsikan Baik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat 83,30 – 88,3 dan dengan mutu pelayanan B (Baik) hingga Sangat Baik (A). Selanjutnya salah satu umpan balik dari peserta yang menjadi perhatian adalah diharapkan adanya bantuan benih dan bimbingan teknis lebih lanjut untuk mensukseskan program Pangan Pekarangan Mandiri (P2L), tidak hanya terkait budidaya namun juga terkait pasca panen dan strategi pemasaran sebagai sebuah kawasan agribisnis baru. Dokumentasi Bimtek dapat di lihat pada Gambar 50-52.



Gambar 50. Bimtek P2L di Kabupaten Maros, Sulsel, 1 Desember 2023



Gambar 51. Bimtek P2L di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulsel, 4 Desember 2023



Gambar 52. Bimtek P2L di Kabupaten Pare pare, Sulsel, 6 Desember 2023

8.7. Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) BBPSIP terus berinovasi dalam memberikan pelayanan prima kepada pemohon dan pengguna informasi publik, baik dari perorangan atau badan hukum, kelompok masyarakat, instansi pemerintah maupun masyarakat umum. PPID BBPSIP TA 2023 terdapat 67 layanan, terdiri dari layanan permohonan informasi 934 layanan; layanan magang sebanyak 21 layanan; dan 12 kali kunjungan agro eduwisata. Untuk meningkatkan kualitas layanan, PPID BBPSIP terlibat aktif dalam pelaksanaan bimbingan teknis pelayanan prima penyusunan standar

pelayanan publik yang dilaksanakan BSIP, melaksanakan publik hearing standar pelayanan publik, melaksanakan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan penyusunan standar pelayanan publik dan publik hearing lingkup BBPSIP.

Hasil pemeringkatan keterbukaan informasi publik (KIP) Kementerian Pertanian tahun 2023 termasuk dalam kategori Informatif. Kategori KIP lingkup BBPSIP, terdapat 8 BPSIP yang memperoleh predikat Informatif, 4 BPSIP dengan predikat Menuju Informatif, 9 BPSIP dengan predikat Cukup Informatif, 7 BPSIP dengan predikat Kurang Informatif, dan 5 BPSIP dengan predikat Tidak Informatif. Lebih rinci, dapat dilihat pada Tabel 41.

Tabel 41. Daftar Hasil Penilaian Tahap Pertama Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BBPSIP TA 2023

No.	UPT	Predikat
1.	BPSIP Pertanian Riau	Informatif
2.	BPSIP Pertanian Gorontalo	Informatif
3.	BPSIP Bengkulu	Informatif
4.	BPSIP DKI Jakarta	Informatif
5.	BPSIP Kalimantan Barat	Informatif
6.	BPSIP Banten	Informatif
7.	BPSIP Jawa Timur	Informatif
8.	BPSIP Sumatera Selatan	Informatif
9.	BPSIP Jambi	Menuju Informatif
10.	BPSIP Papua Barat	Menuju Informatif
11.	BPSIP Maluku	Menuju Informatif
12.	BPSIP Nusa Tenggara Barat	Menuju Informatif
13.	BPSIP Jawa Barat	Cukup Informatif
14.	BPSIP Sumatera Barat	Cukup Informatif
15.	BPSIP Nusa Tenggara Timur	Cukup Informatif
16.	BPSIP Bangka Belitung	Cukup Informatif
17.	BPSIP Kalimantan Selatan	Cukup Informatif
18.	BPSIP Bali	Cukup Informatif
19.	BPSIP Papua	Cukup Informatif
20.	BPSIP Sulawesi Barat	Cukup Informatif
21.	BPSIP Kalimantan Timur	Cukup Informatif
22.	BPSIP Kalimantan Tengah	Kurang Informatif
23.	BPSIP Jawa Tengah	Kurang Informatif
24.	BPSIP Sulawesi Selatan	Kurang Informatif
25.	BPSIP Kepulauan Riau	Kurang Informatif
26.	BPSIP Aceh	Kurang Informatif
27.	BPSIP Sulawesi Tengah	Kurang Informatif
28.	BPSIP Sumatera Utara	Kurang Informatif
29.	BPSIP Lampung	Tidak Informatif
30.	BPSIP Maluku Utara	Tidak Informatif
31.	BPSIP Sulawesi Tenggara	Tidak Informatif
32.	BPSIP Yogyakarta	Tidak Informatif
33.	BPSIP Sulawesi Utara	Tidak Informatif

Pada penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Kementan 2023, yang diselenggarakan oleh Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, BBPSIP dianugerahi predikat satker "Informatif" kategori pelaksana UPT eselon 2. Sedangkan kategori "informatif" pelaksana UPT Eselon 3 didominasi dari lingkup BSIP, yaitu BSIP Riau, Bengkulu,

Gorontalo, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Banten. Pemingkatan ini merupakan capaian dan sekaligus amanah untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelayanan publik. Dokumentasi penganugerahan KIP predikat satker Informatif dapat di lihat pada Gambar 53.



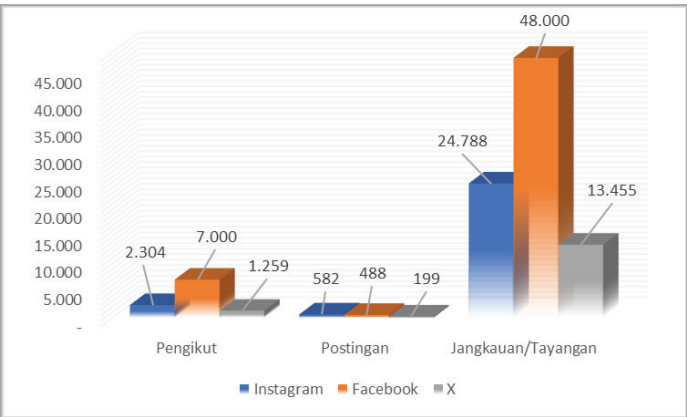
Gambar 53. PPID BBPSIP menerima penghargaan keterbukaan informasi publik dengan predikat satker "Informatif" kategori pelaksana UPT eselon 2.

8.8. Penyediaan Bahan Informasi Standar Instrumen Pertanian (Medsos)

Media Sosial (Medsos) BBPSIP dioptimalisasikan untuk penyediaan dan penyebaran informasi tentang standar instrumen pertanian. Media sosial menjadi *platform* untuk membangun citra positif pemerintah. Dengan menyajikan konten yang informatif, inspiratif, dan berdampak positif, institusi pemerintah dapat memperkuat kepercayaan masyarakat.

Media sosial BBPSIP yaitu Instagram, Facebook, dan Twitter atau X. Kinerja pengelolaan media sosial Instagram BBPSIP selama tahun 2023 menyampaikan sebanyak 582 postingan, dengan total jangkauan 24.788 akun, dengan total akun berinteraksi sebanyak 2.788 akun. Jumlah pengikut 2.304 akun. Kinerja pemanfaatan media sosial Facebook dalam diseminasi informasi standar instrument pertanian dan informasi lain terkait aktivitas

BBPSIP selama kurun waktu satu tahun (2023), sebanyak 488 postingan, dengan jangkauan postingan mencapai 48.000, interaksi postingan 16.087, dan sebanyak 4.915 tanggapan. Kinerja ini tentu saja harus ditingkatkan utamanya dalam mempeluas jangkauan dan interasi dengan pengikut *fanspage Facebook* BBPSIP. Diketahui bahwa sebagian besar pengakses *Fanspage Facebook* BBPSIP adalah berjenis kelamin laki-laki, dengan sebaran asal wilayah cukup beragam. Media sosial *Twitter* atau X merupakan salah satu *platform* media social yang digunakan dalam mendiseminasi informasi standar instrumen pertanian serta aktivitas yang dilaksanakan. Tahun 2023 akun X BBPSIP telah memosting 199 cuitan, dengan jumlah penayangan mencapai 13.455 kali. Perbandingan jumlah pengikut, jumlah postingan dan jangkauan medsos BBPSIP disajikan pada Gambar 54.



Gambar 54. Perbandingan jumlah pengikut, jumlah postingan dan jangkauan medsos BBPSIP (Instagram, Facebook dan X) tahun 2023

8.9. Temu Informasi Seputar Standardisasi (Temu Inspirasi)

BSIP Penerapan menggagas acara webinar secara *hybrid* dengan nama Temu Informasi Seputar Standardisasi (TEMU INSPIRASI), acara ini *launching* pada tanggal 7 Juni 2023. Sesuai dengan judulnya, Temu Inspirasi merupakan ajang untuk mendiseminasikan standar instrumen pertanian, dengan menghadirkan narasumber yang

kompeten di bidangnya. Peserta Temu Inspirasi berasal dari berbagai kalangan, seperti penyuluh pertanian, praktisi pertanian, akademisi, petani, petani milenial, pustakawan dan *stakeholder* lainnya. Selama tahun 2023, BBPSIP telah menyelenggarakan 4 kali Temu Inspirasi dengan jumlah peserta mencapai 980 orang. Secara rinci, pelaksanaan Temu Inspirasi Tahun 2023 dapat di lihat pada Tabel 42.

Tabel 42. Pelaksanaan Temu Inspirasi Tahun 2023

Temu Inspirasi Ke	Tema	Tanggal Pelaksanaan	Narasumber	Materi	Jumlah Peserta (orang)
1	Fenomena El Nino terhadap Sektor Pertanian: Bagaimana Antisipasinya?	7 Juni 2023	• BBPSI Sumberdaya Lahan pertanian: Dr. Asmarhansyah • PSI Tanaman Pangan: Nia Romania, SP,M.Phil • Pelaku Usaha Pertanian: <i>Owner</i> Agrowisata Barro Tani Manunggal: Dwi Sartono, SP	• Irigasi Hemat Air pada Berbagai Komoditas Pertanian • Varietas Tanaman Pangan Tahan Kekeringan Untuk Mengatasi Dampak El-Nino dan Logistiknya • Bertanam Saat Kekurangan Air	380

Temu Inspirasi Ke	Tema	Tanggal Pelaksanaan	Narsumber	Materi	Jumlah Peserta (orang)
2	Penerapan Standar Bidang Pertanian: Bagaimana Langkah dan Strateginya?	12 Juli 2023	- BSN: Tegar Ega - CEO <i>Forest Coffee</i>: Andi Cahyadin	- Strategi dan Langkah Operasional Penerapan Standar pada Pelaku Usaha <i>Best Practise</i> Penerapan Standar Mutu Pertanian	200
3	<i>Sharing Experience</i> Akselerasi Akreditasi Perpustakaan	7 Agustus 2023	- Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia - BSIP Penerapan	- Akselerasi Akreditasi Perpustakaan dan Membedah Instrumen Akreditasi Perpustakaan Khusus <i>Sharing Experience</i> Persiapan Akreditasi Perpustakaan	300
4	Petani Milenial sebagai Penggiat Standardisasi? Kenapa Tidak?	31 Oktober 2023	- Petani Milenial Perternakan: Rizky Bayu Pradana - Petani milenial Hortikultura: Didin Silahudin	- Petani Milenial dan Standardisasi Sektor Perternakan - Petani Milenial dan Standardisasi Sektor Hortikultura	100

8.10. Perpustakaan

Perpustakaan BBPSIP dengan nomor NPP 3271034A000002 tergolong kedalam perpustakaan khusus. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dijelaskan bahwa perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.

Perpustakaan BBPSIP menyediakan layanan baca, layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan bimbingan pemustaka, layanan bercerita, layanan anak, layanan penelusuran katalog *online* dan layanan literasi informasi.

Jumlah Koleksi perpustakaan yang tercatat hingga saat ini adalah 3.650 Judul buku dengan jumlah eksemplar sebanyak 5.026 buah buku fisik baik itu buku monograf, buku terbitan berkala hingga *ephemeral* seperti *leaflet* atau brosur dan 40 konten digital atau *ebook* yang didominasi oleh koleksi yang bersubjek pertanian. Penelusuran dapat dilakukan melalui Komputer/PC OPAC yang terkoneksi internet di Perpustakaan BBPSIP, atau gadget pribadi yang dapat diakses melalui laman <http://183.91.66.157/bbp2tp/opac> dengan menggunakan kata kunci judul, pengarang, subjek dan sebagainya. Jumlah pemustaka yang mengunjungi Perpustakaan BBPSIP selama tahun 2023 sebanyak 303 orang

Tahun 2023 Perpustakaan BBPSIP meraih Sertifikat Akreditasi A dalam

kategori Perpustakaan Khusus. Penyerahan Sertifikat Akreditasi oleh Kadis Perpustakaan & Kearsipan Daerah, Provinsi Jawa Barat, Kamis 11 Januari 2024 di Graha Pustaloka. Raihan sertifikat akreditasi karena terpenuhinya Standar nasional perpustakaan: (1) standar koleksi, (2) standar Saprass, (3) standar pelayanan

Perpustakaan, (4) standar SDM, (5) standar Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, (6) inovasi dan kreativitas perpustakaan berbasis otomasi, serta prestasi perpustakaan yang didukung dengan komitmen pimpinan. Sertifikat Akreditasi A Perpustakaan BBPSIP dapat dilihat pada Gambar 55.



Gambar 55. Sertifikat Akreditasi A Perpustakaan BBPSIP pada kategori Perpustakaan Khusus

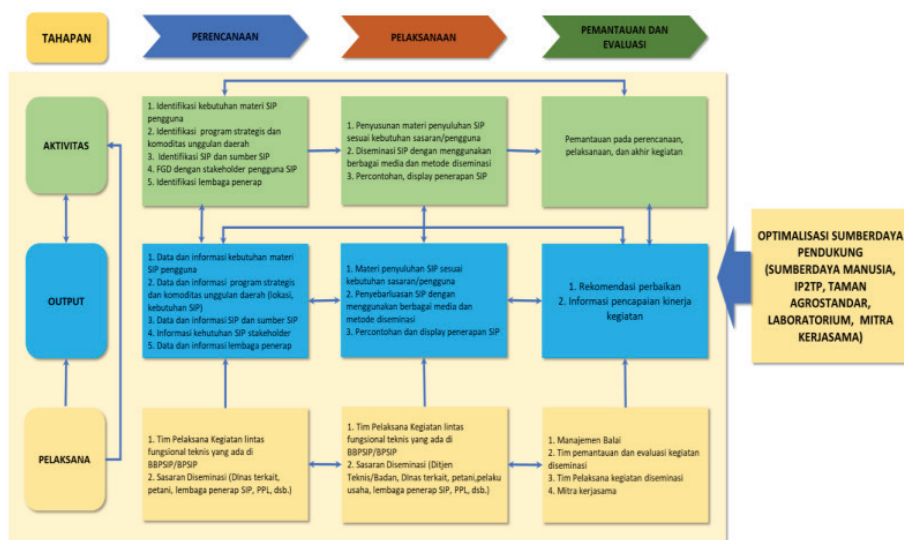
IX. PETUNJUK PELAKSANAAN

Tahun 2023, BBPSIP telah menyusun 3 buah Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kegiatan, yaitu Juklak Diseminasi Standar Instrumen Pertanian, Juklak Penerapan Standar Instrumen Pertanian dan Juklak Tata Kelola UPBS. Juklak yang telah disusun menjadi acuan bagi BPSIP dalam melaksanakan kegiatan. Selain Juklak, BBPSIP juga menerbitkan Pedoman Umum Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Instrumen Pertanian

9.1. Juklak Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

Juklak Diseminasi Standar Instrumen Pertanian menjadi petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan diseminasi, meliputi: (1). Penyusunan materi penyuluhan standar

instrumen pertanian; (2). Percontohan penerapan standar instrumen pertanian; (3). Layanan konsultasi di Taman Agro Standar, dan Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP); (4). Peningkatan kapasitas penerima diseminasi melalui Forum Pertemuan seperti: bimbingan teknis, pelatihan, dan kegiatan pertemuan lainnya; (5). Optimalisasi diseminasi standar instrumen pertanian melalui spektrum diseminasi *multi channel*, media cetak, elektronik, dan media sosial; dan (6). Optimalisasi sumber daya pendukung diseminasi, yaitu: displai penerapan, serta Laboratorium Diseminasi. Proses bisnis pelaksanaan diseminasi standar instrumen pertanian seperti digambarkan pada Gambar 56.

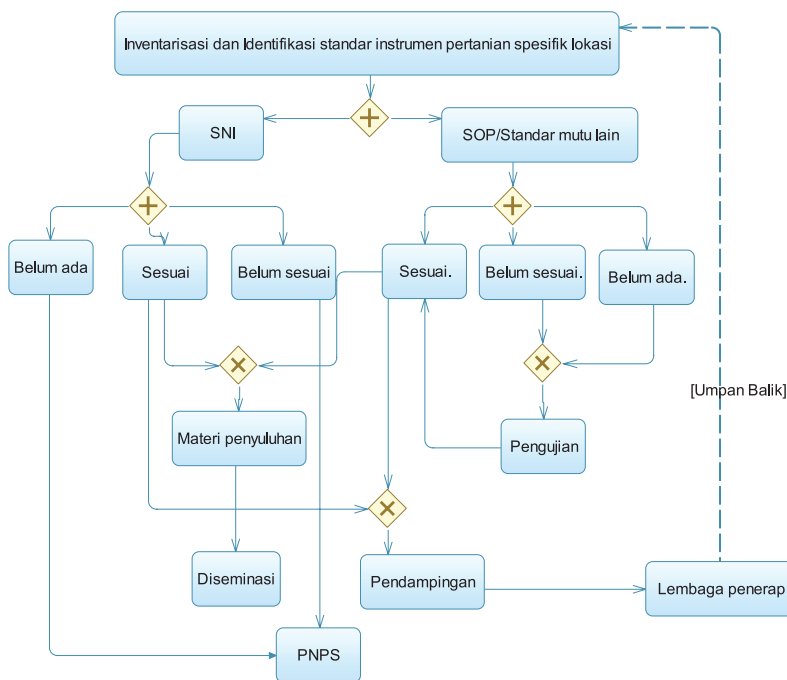


Gambar 56. Proses Bisnis Pelaksanaan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

9.2. Juklak Penerapan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi

Juklak Penerapan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi memberikan acuan bagi BPSIP dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan penerapan standar instrumen pertanian. Ruang lingkup Juklak penerapan standar

instrumen pertanian spesifik lokasi, meliputi kegiatan: (1). Inventarisasi dan Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi; (2). Pengujian Standar Instrumen Pertanian; (3) Pendampingan Penerapan standar instrumen pertanian; dan (4). Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerapan SIP. Diagram kegiatan Penerapan SIP dapat dilihat pada Gambar 57.



Gambar 57. Diagram Kegiatan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi

9.3. Juklak Tata Kelola UPBS

Juklak Tata UPBS menjadi panduan bagi seluruh UPBS lingkup BBPSIP dalam melaksanakan pengelolaan benih/bibit yang terstandar. Ruang Lingkup petunjuk pelaksanaan tata kelola UPBS di seluruh UPBS BPSIP, yaitu:

1. Lembaga/Organisasi Tata Kelola UPBS Tanaman/Ternak

Pengelolaan UPBS di seluruh BPSIP mencakup sistem manajemen, sistem produksi dan sistem distribusi, didukung tersedianya sarana dan prasarana dan tenaga terampil yang memadai. Komponen Lembaga/ organisasi tata kelola UPBS terdiri dari :

- a. Sumber daya manusia
 - b. Sarana dan prasarana (sarpras)
 - c. Pendanaan dan Pengelolaan Keuangan
 - d. Kerja sama
2. Sistem Pengelolaan Benih/bibit terstandar

Suatu rangkaian proses pengelolaan benih sumber tanaman/bibit ternak, terdiri dari: (1) Produksi perbanyakan benih/bibit; (2) panen; (3) pasca panen, dan proses pengemasan, pelabelan, dan pengangkutan untuk benih/bibit; (4) Distribusi.

3. Sistem Manajemen Mutu

Sistem Manajemen Mutu (SMM) tata kelola UPBS tanaman dan ternak

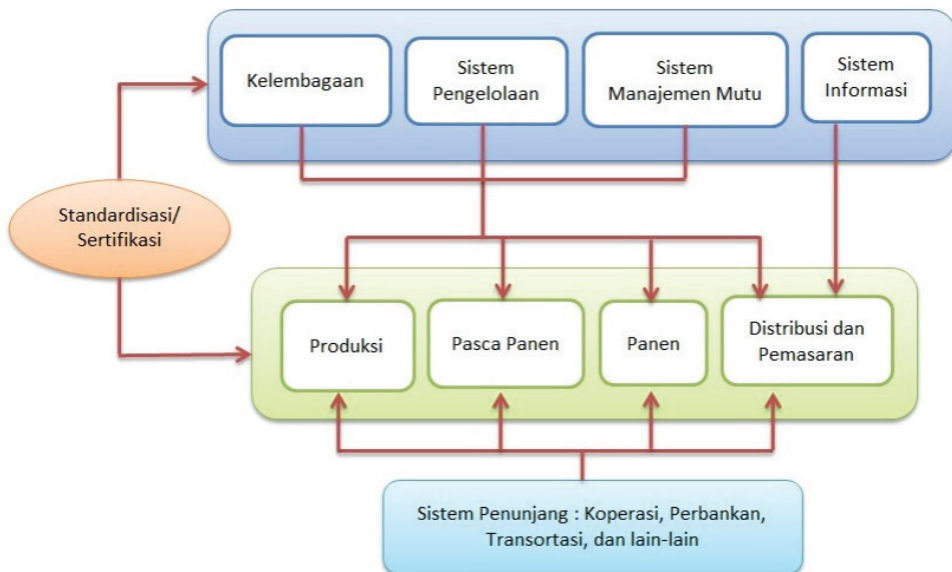
mengikuti pedoman ISO 9001:2015 tentang persyaratan sistem manajemen mutu, meliputi:

- a. Pengendalian mutu benih terstandar, terdiri dari : monitoring, evaluasi, koreksi, dan tindakan korektif.
- b. Sertifikasi produk

4. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan sebuah sistem formal dan terorganisir yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi.

Gambar skema tata cara/mekanisme tata Kelola UPBS terstandar dapat dilihat pada Gambar 58, dan cover juklak pada Gambar 59.



Gambar 58. Skema Sistem Tata Kelola UPBS Terstandar



Gambar 59. Cover Juklak Tata Kelola UPBS Tahun 2023

9.4. Pedoman Umum Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian

Pedoman Umum ini disusun untuk memberikan acuan dan kerangka kerja bagi para pendamping kegiatan penguatan kapasitas penerap standar pertanian, untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja penerapan standar, yang mendukung peningkatan produksi padi dan jagung. Cover pedum dapat dilihat pada Gambar 60.

Kementerian Pertanian melaksanakan Upaya Khusus Percepatan dan Perluasan

Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung. Percepatan dan perluasan tanam pada komoditas padi dan jagung perlu diimbangi dengan penerapan standar. Penerapan standar instrumen pertanian yang tepat dapat membantu petani untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang memiliki peranan dalam pendampingan penerapan standar instrumen pertanian yaitu penerapan penggunaan benih bermutu, *Good Agricultural Practices* serta *Good Handling Practices* padi dan jagung.

Pendampingan percepatan produksi komoditas pertanian strategis merupakan salah satu metode guna mengatasi permasalahan pokok yang dihadapi selama ini terutama yang berkaitan dengan peningkatan produksi komoditas strategis. Untuk itu diperlukan langkah terobosan untuk penguatan kapasitas

pelaku utama pendukung peningkatan produksi padi dan jagung. Pelaku utama bidang pertanian ini merupakan penerap standar yang akan menerapkan standar pertanian untuk mencapai peningkatan produksi padi dan jagung, yaitu penyuluh, penangkar, dan petani.



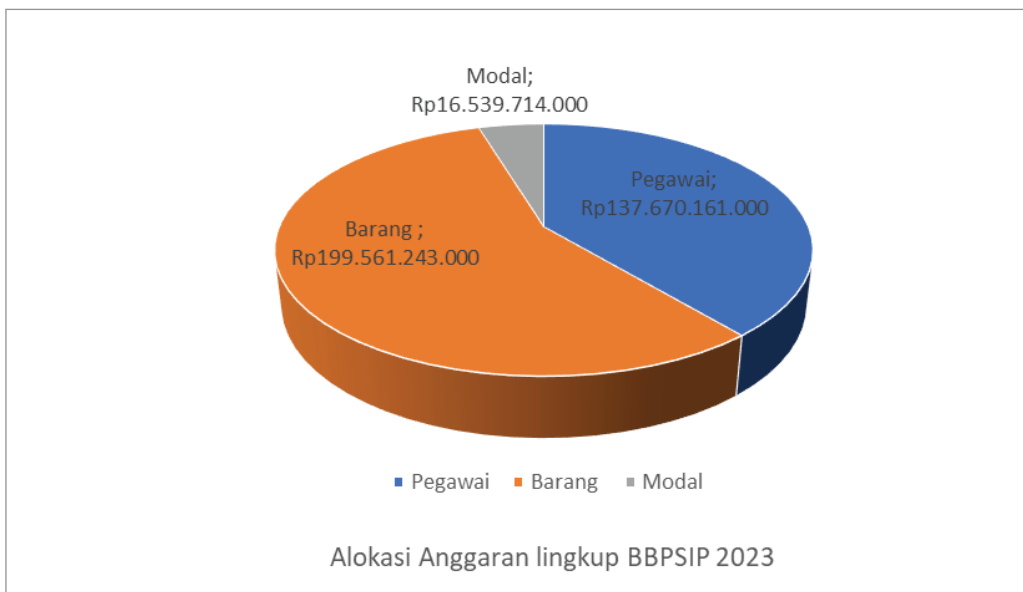
Gambar 60. Cover pedum Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian



IX. KINERJA KEUANGAN

Pada tahun 2023, lingkup BBPSIP mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 264.157.413.000,- yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Seiring dengan dinamika adanya perubahan

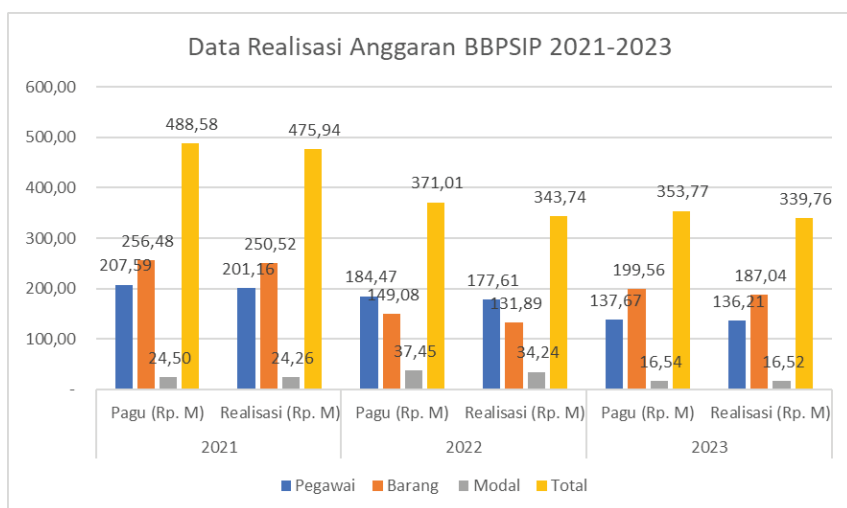
kebijakan nasional maka dilakukan penyesuaian anggaran, maka pagu total anggaran Lingkup BBPSIP menjadi Rp. 353.771.118.000,-. Rincian alokasi anggaran lingkup BBPSIP TA 2023 dapat dilihat pada Gambar 61.



Gambar 61. Alokasi anggaran lingkup BBPSIP TA 2023

Realisasi anggaran Lingkup BBPSIP 2023 berdasarkan data SPAN adalah sebesar Rp. 339.764.813.922,- (96,0%), terdiri dari belanja pegawai 98,9%, belanja barang 93,7% dan belanja modal

99,9%, dengan sedangkan sisa anggaran sebesar Rp 14.006.304.078,- (4 %). Data kinerja keuangan lingkup BBPSIP sejak 2021 – 2023 (dalam satuan Milyar rupiah) ditampilkan pada Gambar 62.



Gambar 62. Kinerja keuangan lingkup BBPSIP Tahun 2021 – 2023

Selain realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja, juga digambarkan realisasi anggaran berdasarkan *output* kegiatan. Secara rinci realisasi per *output* dapat dilihat pada Tabel 43, realisasi anggaran

pengelolaan produk instrumen pertanian terstandar dapat dilihat pada Tabel 44, dan realisasi anggaran dukungan dan manajemen pada Tabel 45.

Tabel 43. Realisasi Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

No	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	SATUAN	TARGET	DES	PROGRES %	PAGU	REALISASI	%
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri					59.107.278.000	48.145.342.027	81,45
6916	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian					59.107.278.000	48.145.342.027	81,45
6916.ADA.114	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan	Standar	52	66	126,92	3.531.080.000	3.514.613.577	99,53
6916.AEF.109	Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan	orang	18.540	24.267	130,89	31.792.918.000	20.968.971.984	65,95
6916.BDB.101	Lembaga Penerap Standar yang didampingi	Lembaga	34	53	194,12	4.700.119.000	4.662.496.366	99,2
6916.CAG.109	Sarana Laboratorium Standardisasi	Unit	16	21	131,25	3.783.161.000	3.774.054.648	99,76
6916.QDB.101	Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment	Lembaga	9	14	155,56	15.300.000.000	15.225.205.452	99,51

Tabel 44. Realisasi Anggaran Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar

HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas						32.474.589.000	32.168.543.752	99,06
6915	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar						32.474.589.000	32.168.543.752	99,06
6915.CAG.101	Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar	Unit	231.5	220	95		28.724.838.000	28.506.664.333	99,24
6915.CAG.102	Produk Instrumen Tanaman Perkebunan Terstandar	Unit	113.000	116.930	103,48		1.377.834.000	1.370.475.979	99,47
6915.CAG.103	Produk Instrumen Tanaman Hortikultura Terstandar	Unit	10.000	10.000	100		150.000.000	149.617.225	99,74
6915.CAG.104	Produk Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Terstandar	Unit	44.379	62.143	140,03		2.221.917.000	2.141.786.215	96,39

Tabel 45. Realisasi Anggaran Dukungan dan Manajemen

WA	Program Dukungan Manajemen											
1809	Dukungan Manajemen, Fasilitas dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian											
1809.EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	34	34	100	71.009.818.000	70.873.899.857	259.660.698.682	262.189.251.000	71.009.818.000	70.873.899.857	99,04
6918	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian											
6918.EBA.956	Layanan BMN	Layanan	31	31	100	2.675.434.000	2.625.037.733	188.786.798.825	191.179.433.000	2.675.434.000	2.625.037.733	98,12
6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan	1	1	100	300.000.000	299.888.504		300.000.000		299.888.504	99,96
6918.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	100	150.000.000	146.924.000		150.000.000		146.924.000	97,95
6918.EBA.962	Layanan Umum	Layanan	33	33	100	7.591.018.000	7.510.020.905		7.591.018.000		7.510.020.905	98,93
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	36	36	100	148.556.243.000	146.498.151.570		148.556.243.000		146.498.151.570	98,61
6918.EBB.951	Layanan Sarana Internal	Unit	11	11	100	140.007.000	140.000.000		140.007.000		140.000.000	100
6918.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	Unit	8	9	112,5	12.616.546.000	12.606.101.058		12.616.546.000		12.606.101.058	99,92
6918.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	Orang	1.884	1.884	96,87	2.328.389.000	2.286.451.401		2.328.389.000		2.286.451.401	98,2
6918.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan	35	35	100	11.583.741.000	11.491.381.092		11.583.741.000		11.491.381.092	99,2
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	34	34	100	2.259.251.000	2.240.619.896		2.259.251.000		2.240.619.896	99,18
6918.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	34	34	100	2.978.804.000	2.942.222.666		2.978.804.000		2.942.222.666	98,77
TOTAL						353.771.118.000	339.974.584.461		353.771.118.000		339.974.584.461	96,1

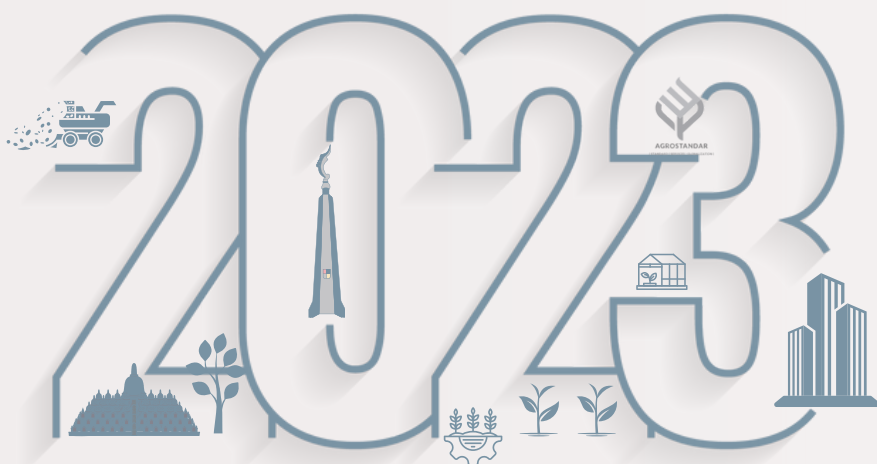


X. PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan TA 2023 telah terlaksana dengan baik, meliputi kegiatan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, kegiatan Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar, kegiatan Dukungan Manajemen, *Quick Win* BSIP, Bimtek perbenihan serta Kerjasama dan kemitraan. Secara keseluruhan *output* telah tercapai, namun terdapat kegiatan yang mengalami kendala, seperti kegiatan sarana pengujian lembaga sertifikasi yang terkendala dalam pengadaan alat, terkait

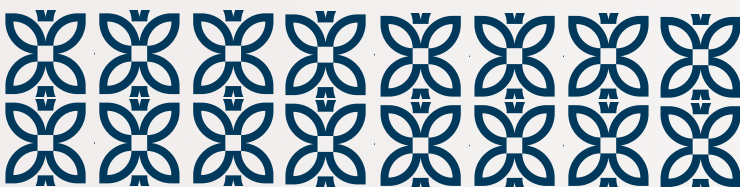
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dimana alat-alat laboratorium yang dibutuhkan secara umum merupakan produk impor. Kendala lainnya adalah adanya *el nino* sehingga pelaksanaan kegiatan lapang menjadi terhambat.

Selanjutnya laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perencanaan ke depan dan merupakan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh BBPSIP.



**BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2023



@ BSIP PENERAPAN

